

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN BAROS
KABUPATEN SERANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Sosial Pada Kosentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



oleh:

Galih Pratama

NIM 6661100753

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Pratama

NIM : 6661100753

Tempat Tanggal Lahir: Mesuji, 14 Mei 1992

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini mengandung plagiat, maka gelar kesarjaan saya bisa di cabut.

Serang, 25 April 2016



Galih Pratama
NIM. 6661100753

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Galih Pratama

NIM : 6661100753

Judul Proposal : **PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN DI KECAMATAN BAROS KABUPATEN
SERANG**

Serang, April 2016

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Listvaningsih, S.Sos., M.Si
NIP: 197603292003122001

Pembimbing II



Yeni Widayastuti, S.Sos., M.Si
NIP: 197602102005012003

Mengetahui

Dekan Fisip Untirta



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP: 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : GALIH PRATAMA
NIM : 6661100753
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPILITAN KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 15 Juni 2016
dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 21 Juni 2016

Ketua Penguji :

Dr. Dirlanudin, M.Si

NIP. 196103091987031001

Anggota :

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si

NIP. 197108242005011002

Anggota :

Listivaningsih, S.Sos., M.Si

NIP. 197603292003122001



Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listivaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

"Jasa sendiri tiada dirasa

Jasa orang lain tiada dilupa

Teman sejati kunci ceria

Maghfiroh Allah kunci surga"

"Jadikan kepandaian sebagai
kebahagiaan bersama,
sehingga mampu meningkatkan rasa
ikhlas tuk bersyukur atas kesuksesan"

Skripsi ini kupersembahkan:

Kedua orang tua ku tercinta, keluarga
besarku, calon pendamping hidupku
dan teman-teman semua yang selalu
mendukung setiap langkah ku.

ABSTRAK

Galih Pratama. NIM 100753. 2016 Skripsi. Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Listyaningsih, S.Sos., M.Si Pembimbing II Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si

Penelitian ini mengenai pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Dengan dilatarbelakangi oleh belum lengkapnya syarat administrasi dan buruknya koordinasi dan sosialisasi serta belum tercukupi infrastruktur penunjang. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. didasarkan dari teori implementasi Van Matter dan Van Horn (2008) yang terdiri dari enam dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif penentuan informannya menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data melakukan observasi dan wawancara langsung serta dokumentasi. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini triangulasi dan mengadakan *member chek* Teknik analisis data penelitian mengikuti konsep Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan Agropolitan di Baros masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya keseriusan dan komitmen dari lembaga pemerintah terkait untuk mendukung pengembangan Agropolitan, belum terjalinnya kerjasama yang harmonis antara Bappeda dengan Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata serta tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan pengembangan Agropolitan di Baros. peneliti memberikan saran yaitu lembaga pemerintah terkait perlu meningkatkan kerjasama, koordinasi, sosialisasi dan pembangunan kapasitas serta peningkatan wawasan untuk mendukung sepenuhnya pengembangan Agropolitan di Kecamatan Baros.

Kata Kunci: Agropolitan, Pengembangan Pertanian, Kebijakan Publik

ABSTRACT

Galih Pratama. NIM 100753. 2016 Thesis. Implementation of Agropolitan Development In Baros Serang District. public administration department social and politics faculty. University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Advisor Listyaningsih, S. Sos., M.S 2nd Advisor Yeni Widyastuti, S. Sos., M.Si

This research the about implementation of Agropolitan development in Baros Serang District. Background of research are incomplete requirement administration and bad coordination, socialization and not enough supporting infrastructure. The research aim for knowing the implementation of agropolitan development program in Baros, Serang District. The teory of Van Matter and Van Horn (2008) pilled up by six dimation which is standard andpolicy purpose, resource, characteristics of agent implementer, attitude/tendency the implementer. Communication between organitation and implementer activity, social environment, economy and politic. The metod which is use in this research is qualitative metod with descriptive approach, determination informar by purposive technic. Accumulation data technic by perform observation and direct interview and documentation. Validity data examination in this research is triangulation and take a member chek. Analysis data technic research attend to Prasetya Irawan's concept. The results showed that the implementation of the development Agropolitan in Baros is not quite optimal. This is evident from the effort seriousness and commitment of the relevant government agencies to support the development Agropolitan, established harmonic cooperation between planning and development regional agency, departmen of agriculture, departmen of public job, departmen of tourism and public is not involved within the agropolitan development in Baros. The recommendation of yhis research are that the related goverment need to increase cooperation, coordination, and socialization and development the capacity, enhancement knowledge for fully supports the agropolitan development in Baros Subdistrict.

Key Words: Agropolitan, Development Agricultural, Policy Implementation

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa hambatan dan kesulitan berarti. Skripsi ini penulis buat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa tingkat akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang”.

Hasil penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Maka dengan ketulusan hati dan dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan dan rasa hormat serta terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukroman, S.Ikom., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Riswanda, Ph.D selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam setiap tahapan bimbingan yang telah dilakukan.
8. Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap bimbingan yang dilakukan selama ini.
9. Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam setiap bimbingan yang telah dilakukan selama ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

11. Kepala beserta *seluruh* pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang yang telah banyak membantu memberikan data dan saran dalam penelitian ini.
12. Kepala beserta seluruh pegawai Dinas Pertanian yang telah banyak membantu memberikan data dan saran dalam penelitian ini.
13. Camat Kecamatan Baros serta pegawai yang telah banyak membantu memberikan data dan saran dalam penelitian ini.
14. Lurah Baros yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
15. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi serta semangat yang tiada terkira.
16. Keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa yang selalu mengiringi tiap langkah penulis.
17. Teman-teman Kelas A/Reguler (Diky, Unggun, Azil, Dindin, Wahyu, dkk) serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
18. Terima kasih pula kepada semua temen-teman anggota Mapalaut Semoga akan terus menjadi penyemangat untuk penulis.

Akhirnya penulis tak berhenti mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian materi. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis mengharapkan masukan, baik kritik maupun saran dari pembaca yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi yang memebaca dan semoga skripsi ini dapat membantu para peminat ilmu

Administrasi Negara. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi khalayak yang ingin mengetahui tentang Pelaksanaan Program pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Serang.

Serang, April 2016

Penulis

Galih Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Identifikasi Masalah 20

1.3 Pembatasan Masalah 21

1.4 Rumusan Masalah 21

1.5 Tujuan Penelitian 21

1.6 Manfaat Penelitian 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI

DASAR

2.1 Landasan teori 23

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 25

2.1.2 Analisis Kebijakan Publik	27
2.1.3 Model Analisis Kebijakan Publik.....	28
2.1.2 Konsep Pelaksanaan	29
2.1.3 Pengertian Program	32
2.1.4 Konsep Wilayah	33
2.1.5 Konsep Wilayah Pertanian	35
2.1.6 Konsep Perencanaan Wilayah	37
2.1.7 Konsep Kawasan Agropolitan	41
2.1.7.1 Pengertian Kawasan Agropolitan.....	41
2.1.7.2 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan	43
2.1.7.3 Prinsip Kawasan Agropolitan	45
2.1.7.4Strategi dan Tujuan Pengembangan Kawasan Agropolitan	46
2.1.7.5 Pengelolaan Kawasan Agropolitan	49
2.1.7.6 Persyaratan Kawasan Agropolitan	51
2.1.8 Peningkatan Produksi Dengan Konsep Agropolitan	52
2.1.9 Mekanisme Pengembangan Kawasan Agropolitan	54
2.1.10 Sistem Agribisnis.....	57
2.1.11 Sistem Agroindustri.....	58
2.1.12 Sistem Agrowisata.....	59
2.2 Penelitian Terdahulu	60
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	63
2.4 Asumsi Dasar Penelitian	68

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Metode Penelitian	69
3.2 Fokus Penelitian	70
3.3 Lokasi Penelitian	70
3.4 Fenomena Yang Diamati	71
3.4.1 Definisi Konsep.....	71
3.4.2 Definisi Operasional.....	71
3.5 Instrumen Penelitian.....	73
3.6 Informan Penelitian	74
3.7 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	75
3.8 Pengujian Keabsahan Data.....	83
3.9 Jadwal Penelitian.....	84

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	86
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang.....	86
4.1.2 Gambaran Umum Lokasi Agropolitan Kabupaten Serang	87
4.1.3 Gambaran umum Pengembangan Agropolitan Kabupaten Serang.....	94
4.2 Deskripsi Data	96
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	96
4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	99
4.2.3 Analisis Data	100
4.2.3.1 Pengumpulan Data Mentah	100

4.2.3.2 Transkrip Data	100
4.2.3.3 Koding Data.....	101
4.2.3.4 Kategori Data.....	101
4.2.3.5 Pentimpulan Data Sementara.....	101
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	106
4.4 Pembahasan.....	132
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	152
5.2 Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Arahan Struktur Ruang Kawasan Agropolitan	11
Tabel 1.2 Monografi BP3K Kecamatan Baros	14
Tabel 3.1 Definisi Konsep Penelitian	72
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	74
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara.....	77
Tabel 3.4 Waktu Pelaksanaan Penelitian	85
Tabel 4.1 Bentuk Topografi dan Ketinggian desa-desa di Kecamatan Baros.....	88
Tabel 4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk desa-desa di Kecamatan Baros	92
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	93
Tabel 4.4 Daftar Informan.....	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Kecamatan Baros.....	10
Gambar 1.2 konsep Sistem Agropolitan	11
Gambar 1.3 Rencana Penepatan Bangunan-Bangunan.....	14
Gambar 1.4 Arah Struktur Ruang Kawasan Agropolitan.....	18
Gambar 1.5 Peta Jaringan Jalan	20
Gambar 2.1 Model Pendekatan <i>The Policy</i> Implementasi	35
Gambar 2.2 Mekanisme Penyelenggaraan Agropolitan.....	60
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Model Prastya Irawan	83
Gambar 4.1 Struktur Kawasan Agropolitan.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan wilayah merupakan salah satu bentuk transformasi suatu wilayah sebagai bagian dari eksplorasi sumber daya alam untuk menciptakan daya saing tinggi terhadap suatu daerah. Pengembangan wilayah juga merupakan bagian penting dalam pembangunan suatu daerah. Pengembangan wilayah pada umumnya dilakukan oleh suatu daerah untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pengembangan wilayah harus dilakukan dengan baik, sehingga diperlukan adanya komitmen daerah serta peran aktif dari masyarakat sebagai pihak yang menikmati pengembangan wilayah tersebut.

Salah satu ruang yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan wilayah adalah wilayah kawasan pertanian dan oleh karena itu dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Serang “Terwujudnya Masyarakat Yang Berkualitas Menuju Kabupaten Serang Yang Agamis, Adil dan Sejahtera” terdapat 7 misi pembangunan yang hendak dicapai, salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal sebagai roda pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan di Kabupaten Serang, khususnya Kecamatan Baros, yaitu melalui pengembangan Kawasan Agropolitan.

Kawasan Agropolitan merupakan pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi desa yang dipadukan dengan pembangunan sektor industri melalui pengembangan prasarana dan sarana layaknya perkotaan yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Dengan kata lain, pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan penguatan sentra-sentra produk pertanian yang berbasiskan pada kekuatan internal sehingga perdesaan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan daya kompetensi, baik secara interregional maupun intraregional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan Kawasan Agropolitan membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari segenap aparatur pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kawasan ini dapat berlangsung secara terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien sehingga tercipta keterpaduan dengan pembangunan sektor lainnya dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pengembangan kawasan berbasis pembangunan juga tidak bisa lepas dari konsep hubungan antara sistem sosial (*social System*) dan lingkungan alam atau sistem ekologi (*ecological system*). Dalam pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan kajian dampak lingkungan adalah hal yang sangat penting. Karena suatu rencana ataupun perencanaan adalah suatu keputusan hal ini menurut (Siagian 2003:4) perencanaan adalah suatu proses pemikiran yang matang serta penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dan telah dikatakan pula bahwa pada hakikatnya rencana adalah suatu keputusan.

Ada tiga alasan mengapa aspek sosial dalam kajian dampak lingkungan diperlukan pada pengambilan keputusan/program adalah *Pertama*, keberadaan suatu kegiatan mempunyai dampak positif dan negatif tidak hanya mengganggu kelangsungan usaha atau kegiatan tersebut melainkan mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat tersebut. *Kedua* penilai atau respon masyarakat terhadap kegiatan atau usaha tersebut berbeda-beda dan berubah-ubah. Sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh lapisan atau kelompok tertentu tidak selalu bermanfaat oleh lapisan atau kelompok lainnya. *Ketiga* dalam kurun waktu yang sama kehidupan masyarakat boleh jadi bersentuhan dengan berbagai usaha atau kehidupan sekaligus. (Helmi 2012:7)

Isu lain dalam proses perencanaan pembangunan yaitu antara “*top down*” dan “*bottom up*”, atau antara pendekatan “*central approach*” dan “*local approach*”. Pendekatan “*top down*” atau “*central approach*” berarti perencanaan pembangunan utamanya datang dari pemerintah pusat, atau dari lembaga pemerintah dibandingkan dari masyarakat bawah. Pendekatan “*bottom up*” atau “*local approach*”. merupakan perencanaan pembangunan yang utamanya dari masyarakat bawah. Mekanisme perencanaan pembangunan dengan “*bottom up*” dimulai dari rapat pada tingkat desa (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/LKMD). Membahas usulan proyek yang diusulkan oleh LKMD untuk disahkan kepala desa dan diserahkan ke Camat. Kemudian di tingkat Kecamatan diadakan rapat UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) kemudian hasilnya diserahkan pada Tingkat Kabupaten diadakan RAKORDA BANGDES dan di Provinsi diadakan RAKORDA BANGDES Tingkat I. pada tingkat pusat di bahas

oleh masing-masing Provinsi bersama dengan BAPPENAS dan lembaga lain yang mempunyai program masuk desa.

Bila pada awal Orde Baru, kegiatan ekonomi yang berbasis sumberdaya hayati praktis hanya dalam bentuk pertanian primer (*on-farm agribusiness*), maka dewasa ini sedang terjadi industrialisasi yang ditandai oleh ciri berikut. *Pertama*, berubahnya orientasi kegiatan ekonomi dari orientasi peningkatan produksi kepada orientasi pasar. *Kedua*, berkembangnya kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer (*on-farm agribusiness*), serta kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer (*on-farm agribusiness*) baik di pasar domestik maupun pasar internasional. *Ketiga*, semakin kuatnya keterkaitan antara kegiatan produksi dan perdagangan sarana produksi pertanian primer (*on-farm agribusiness*) dengan usahatani, antara pertanian primer (*on-farm agribusiness*) dengan kegiatan pengolahan hasil pertanian primer serta keterkaitannya dengan konsumen. *Keempat*, motor penggerak (*prime mover*) kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya hayati sedang mengalami proses perubahan. Bila di masa lalu penggerak utama adalah pertanian primer, maka dengan perubahan orientasi tersebut di atas, beralih ke industri pengolahan hasil pertanian primer (agroindustri hilir). Artinya, bila di masa lalu kegiatan pertanian primer menentukan kegiatan industri pengolahan, maka dewasa ini kegiatan industri pengolahanlah yang menentukan kegiatan pertanian primer dan selanjutnya menentukan kegiatan penyediaan sarana produksi. (Kemen PU Agropolitan dan minapolitan 2012:19)

Berlangsungnya proses industrialisasi di atas, telah mengubah kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya hayati, dari sekedar bentuk pertanian primer menjadi suatu sektor ekonomi modern dan besar (mega sektor) yang kita namakan sebagai sektor agribisnis. Industrialisasi pertanian primer yang menjadi sektor agribisnis, berimplikasi pada cara melihat, mengevaluasi, mengelola dan membangun kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya hayati. Bila di masa lalu kegiatan ekonomi tersebut hanya dilihat, dievaluasi, dikelola dan dibangun terbatas pada subsektor pertanian, maka dewasa ini dan terutama di masa yang akan datang, kegiatan ekonomi tersebut harus dilihat sebagai suatu sektor agribisnis, dimana sub sektor agribisnis hulu, sub-sektor *on-farm agribisnis*, sub-sektor agribisnis hilir merupakan suatu kesatuan kegiatan ekonomi yang integral.

Berkaca pada kondisi tersebut, diperlukan upaya- upaya pengembangan kawasan perdesaan yang mencakup segala aspek kehidupan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki perdesaan. Sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai produk unggulan di setiap daerahnya, pengembangan ekonomi Indonesia hendaknya berorientasi pada pembangunan agribisnis yang berbasis pertanian. Maka, pengembangan Kawasan Agropolitan pun menjadi alternatif solusi pembangunan kawasan perdesaan.

Kawasan Agropolitan memungkinkan pembangunan dengan tetap berbasis pada sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi desa yang dipadukan dengan pembangunan sektor industri melalui pengembangan prasarana dan sarana layaknya perkotaan yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Dengan kata lain, pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan penguatan sentra - sentra

produk pertanian yang berbasiskan pada kekuatan internal sehingga perdesaan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan daya kompetensi, baik secara interregional maupun intraregional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan Kawasan Agropolitan membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari segenap aparatur pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan kawasan ini dapat berlangsung secara terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien sehingga tercipta keterpaduan dengan pembangunan sektor lainnya dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pengembangan Kawasan Agropolitan pun menjadi salah satu program pengembangan permukiman perdesaan yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Permukiman. Dengan program yang terfokus pada penyediaan dan kemajuan infrastruktur perdesaan, yaitu berupa prasarana dan sarana yang memadai dan mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kawasan Agropolitan, khususnya masyarakat perdesaan.

Kabupaten Serang mempunyai keinginan untuk mengembangkan kawasan agropolitan di wilayahnya. Salah satu faktor dari kawasan agropolitan, yaitu kawasan tersebut harus memiliki komoditas unggulan dan akses ke kawasan yang tidak sulit dijangkau pengunjung. Kawasan Agropolitan merupakan sistem fungsional desa-desa dengan hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat agropolitan dan desa-desa penunjang di sekitarnya. Sistem ini mengembangkan sistem dan usaha agribisnis di pusat Agropolitan serta melayani dan mendorong

kegiatan pertanian atau Agribisnis di wilayah sekitarnya. Dengan kata lain, sistem ini akan mengembangkan sistem dan usaha agribisnis di pusat Agropolitan, serta melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian pedesaan dalam hal ini yang menjadi kawasan Agropolitan dan wilayah sekitarnya.

Dalam mewujudkan keinginan di atas pertama-tama pemda kabupaten Serang menetapkan Kecamatan Waringinkurung sebagai calon kawasan Agropolitan kabupaten Serang dengan alasan memiliki komoditas unggulan, yaitu melinjo dan duren. Akan tetapi berdasarkan hasil survei kami tahun 2004 (Tim LPPM, IPB), bahwa akses ke Kecamatan Waringinkurung itu tidak mudah, serta topografi bergelombang sampai berbukit, sehingga tidak layak menjadi lokasi wisata atau lokasi Agropolitan. Walaupun, dari segi komoditas unggulan memang ada terutama melinjo, sehingga terkenal dengan emping akan tetapi faktor akses tidak memungkinkan. Atas dasar kenyataan tersebut Kecamatan Waringinkurung tidak layak menjadi kawasan agropolitan, sehingga rencananya dibatalkan.

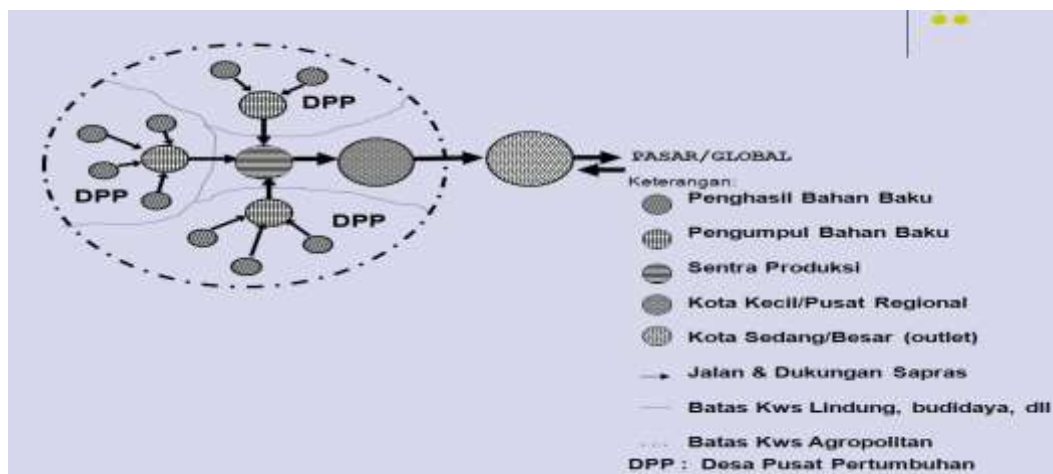
Selanjutnya atas dasar adanya komoditas unggulan pula, yaitu durian si potret, dan strategi serta kondisi geografi yang sesuai untuk kawasan Agropolitan maka pemerintah Kabupaten Serang memilih Baros sebagai pengganti Kecamatan Waringinkurung. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, dalam hal ini dinas pertanian Kabupaten Serang yang mewakili pemda Serang meminta kami tim Departemen Ilmu Tanah - Faperta - IPB untuk studi wilayah kecamatan Baros tentang kemungkinan dijadikan kawasan agropolitan. Studi ini diberi judul "Master Plan Agropolitan" Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi

Banten. Studi ini penekanannya dalam aspek fisik, jadi belum studi ke dalam aspek ekonomi.

Studi tentang “Master Plan Agropolitan di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dari aspek Fisik” telah selesai dengan diselenggarakannya presentasi laporan pada hari Kamis 22 Desember 2011 di BPP Kecamatan Baros, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang beserta staf dan para Ketua Kelompok Tani dari desa terpilih. Sebagaimana nama studi ini Master Plan, maka laporan ini tidak menyinggung perencanaan detail, akan tetapi hanya berupa konsep awal dalam rangka mengaplikasikan proyek Agropolitan mengacu kepada studi karakteristik tanah yang dijadikan dasar evaluasi lahan atau pengkelasan lahan untuk setiap komoditas unggulan. Kemudian dilanjutkan dengan studi sumberdaya manusia atau SDM pada saat ini, bagaimana seharusnya SDM apabila proyek berjalan. Terakhir dari studi ini adalah penataan ruang di wilayah kecamatan Baros yang dijadikan sentral pengembangan Agropolitan. Kemudian pada tahun tanggal 20 Desember 2012 dibuatlah Detailed Engineering Design (DED) dari Dinas Pertanian dengan bekerja sama dengan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Padjadjaran hal ini sebagai lanjutan dari pembuatan kajian masterplan pada tahun 2011 hal ini dilakukan karena pada tahun 2015 ditargetkan sudah mapan dan terlaksana dan memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. (Dinas Pertanian Kab. Serang 2013)

Sebagai model dalam pengembangan perdesaan, Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros dengan 14 desanya (Gambar 1.1) dikembangkan berdasarkan

satuan-wilayah yang menunjang masing-masing sub sistem Agribisnis secara efisien dan efisien yang berorientasi pasar. Kegiatan usaha pada setiap sub sistem Agribisnis diselenggarakan pada wilayah-wilayah dengan keunggulan dan fungsi masing-masing yang secara spasial diintegrasikan untuk melayani permintaan pasar.



Gambar: 1.1 Konsep Dasar Pengembangan Kawasan Agropolitan (Dinas Pertanian Kab. Serang)

Dalam pembangunan Agropolitan Baros sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya pembangunan pertanian melalui sistem agribisnis ini dapat diidentifikasi melalui ke empat sub-sistemnya, yaitu: 1) Sub-sistem Agribisnis Hulu (*upstream off-farm agribusiness*), 2) Sub-sistem Agribisnis Budidaya *on-farm* (*on-farm agribisnis*), 3) Sub-sistem Agribisnis Hilir (*downstream off-farm agribusiness*) dan 4) Sub-sistem Agribisnis Pendukung (Dinas Pertanian Kabupaten Serang 2013).



Gambar:1.2 Konsep Sistem Agribisnis (Dinas Pertanian Kab. Serang)

Perencanaan Agropolitan di Kecamatan Baros mengacu pada konsep dasar perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan satu atau beberapa wilayah pendukung kegiatan usaha pada setiap sub sistem agribisnis berdasarkan keunggulan dan fungsi ruang masing-masing. Beberapa satuan wilayah tersebut secara spasial disatukan menjadi kawasan terintegrasi menjadi kawasan agropolitan. Untuk mewujudkan kawasan agropolitan ini, disusun *MasterPlan* Pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Dalam penyusunan Master Plan terdapat 5 komponen yang terdiri atas (1) Penetapan sektor unggulan, (2) Penetapan unit-unit kawasan pengembangan, (3) Sistem infrastruktur, (4) Penetapan pusat agropolitan, (5) Sistem kelembagaan (Dinas Pertanian Kabupaten Serang 2013).

Terkait dengan penetapan pusat Agropolitan dan penetapan unit-unit kawasan pengembangan, perlu dilakukan analisis struktur dan pola ruang kawasan Agropolitan Kecamatan Baros. Berdasarkan hasil kajian “Analisis Ekonomi Wilayah Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros” telah ditetapkan struktur ruang kawasan agropolitan Kecamatan Baros adalah sebagai berikut: (a) Desa Baros

sebagai pusat Agropolitan (b) Desa Panyirapan dan Desa Sindangmandi sebagai pusat pendukung/layanan agropolitan (c) Desa-desa lainnya sebagai *hinterland*/unit-unit produksi/kawasan layanan.

Tabel 1.1
Arahan Struktur Ruang Kawasan Agropolitan
Berdasarkan “Analisis Ekonomi Wilayah Kawasan Agropolitan Baros”

Pusat Agropolitan	Pusat Pendukung/Pusat Layanan	Hiterland/Kawasan Layanan
Desa Baros	Panyirapan	Sinarmukti
		Sidamukti
		Padasuka
		Sukamanah
		Sukaindah
		Sukamenak
	Sindangmukti	Cisalam
		Curug Agung
		Tamansari
		Sukacai

(Sumber: Dinas Pertanian Kab. Serang)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, perlu dilakukan penetapan Pusat Agropolitan. Dalam rencana struktur ruang kawasan Agropolitan Kecamatan Baros, Desa Baros ditetapkan sebagai Pusat Agropolitan tersebut, sedangkan Desa Panyirapan dan Desa Sindangmandi ditetapkan sebagai pusat pendukung (lihat Tabel 1.1). Sementara itu, dari pola ruang kawasan eksisting di Kecamatan Baros, dapat dilihat bahwa seluruh desa memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan. Untuk itu maka dapat dikatakan bahwa seluruh desa di Kecamatan Baros merupakan kawasan *hinterland* dari Pusat Agropolitan Baros.

Sebagai desa yang ditetapkan sebagai Pusat Agropolitan, Desa Baros diarahkan untuk berfungsi sebagai: (1) Pusat perdagangan (Terminal Agribisnis) dan transportasi (2) Out let hasil-hasil pertanian (3) Gudang penyimpanan hasil

dan sarana produksi pertanian (4) Penyediaan sarana promosi dan pusat informasi pengembangan harga (5) Lembaga keuangan. Sedangkan untuk Desa Panyirapan dan Desa Sindang Mandi yang ditetapkan sebagai Pusat Pendukung/ Pusat Kawasan Pertanian diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai: (1) Pusat produksi pertanian (2) Intensifikasi pertanian (3) Produksi tanaman siap jual (4) Sub Terminal Agribisnis (5) Pengolahan hasil (6) Kelompok Tani, Gapoktan (7) Koperasi (8) Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) (9) Pusat penelitian. (Bapeda Kab. Serang)

Terkait dengan fungsi yang diarahkan pada Pusat Agropolitan Baros, maka pada kawasan pusat agropolitan ini direncanakan bangunan-bangunan berikut ini: Pasar, Terminal agribisnis, Pabrik skala percontohan, Tempat penjualan bibit, Tempat workshop, Tempat bongkar muat, Kantor pengelola, Masjid, Cafe, Gazebo.



Gambar1.3 Rencana Penempatan Bangunan-Bangunan *Masterplan* (Bapeda Kab. Serang)

Konsep Agropolitan merupakan strategi pembangunan yang dipercepat dengan memperkenalkan unsur gaya hidup (manajemen) kota yang disesuaikan dengan lingkungan dan budaya perdesaan (*internalized*) sehingga mendorong

masyarakat desa untuk produktif dan tetap tinggal di perdesaan. Hal ini mengurangi migrasi, mengurangi keretakan social (*social dislocation*) dalam proses pembangunan serta membangun jaringan dengan sektor dan daerah lain.

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterikatan desa dan kota. Hal ini dapat terwujud melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di Kawasan Agropolitan. Sementara itu, pengembangan kawasan ini juga ditujukan untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi Kawasan Agropolitan melalui strategi pengembangan sebagai berikut ; meningkatkan diversifikasi ekonomi perdesaan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, baik berupa hasil produksi maupun olahan., meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan permodalan dengan memfasilitasi ketersediaan layanan yang dibutuhkan petani dan masyarakat. Layanan dapat berupa penyediaan sarana produksi, sarana pascapanen, dan permodalan yang tersedia di kawasan dalam jumlah, jenis, waktu, kualitas, dan lokasi yang tepat, meningkatkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam upaya memajukan industri pertanian sesuai kebutuhan masyarakat. Prasarana dan sarana publik yang disediakan pemerintah dilaksanakan dengan pendekatan kawasan, yaitu memerhatikan hasil identifikasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, serta tingkat perkembangan Kawasan Agropolitan, mewujudkan permukiman perdesaan yang

nyaman dan tertata, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui pengaturan dan pelaksanaan *masterplan* Kawasan Agropolitan secara konsisten dan terkoordinasi.

Tabel 1.2
Monografi BP3K Kecamatan Baros
Tahun 2014

No	Desa	Lahan sawah	Lahan darat	Jumlah	Jumlah Kelompok Tani	Kelas Kelompok			
						P	L	M	U
1	Baros	365	101	466	6	1	2	1	2
2	Sukamanah	89	71	160	5	0	1	3	2
3	Suka cai	142	71	213	5	1	1	2	1
4	Penyirapan	110	74	184	7	2	1	2	2
5	Suka Indah	102	61	163	4	0	4	0	0
6	Sidamukti	223	95	318	7	2	1	3	1
7	Sinarmukti	88	140	228	5	1	2	2	0
8	Padasuka	89	126	215	4	1	1	0	2
9	Tejamari	131	142	273	5	0	0	2	0
10	Sukamenak	131	125	256	5	3	0	2	0
11	Sindangmandi	81	235	316	5	0	1	3	1
12	Tamansari	102	253	355	3	0	1	1	1
13	Cisalam	151	205	356	5	0	1	2	2
14	Curug Agung	81	247	328	4	1	2	1	0
Jumlah		1885	1946	3831	70	12	22	23	13

(Sumber:UPTD Pertanian Kec. Baros 2014)

Dalam pengembangan Kawasan Agropolitan, terurai mekanisme pengajuan usulan pengembangan Kawasan Agropolitan. Cakupan mekanisme berupa prosedur pengajuan lokasi dan proses pemilihan/penilaian Kawasan Agropolitan. Berkenaan dengan prosedur pengajuan lokasi, mekanismenya meliputi kegiatan- kegiatan berikut ini; usulan dari Kabupaten oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten mengajukan usulan mengenai Kawasan Agropolitan. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten telah melakukan identifikasi potensi dan masalah terlebih dahulu. Identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui

kondisi dan potensi lokal, yaitu komoditas unggulan. Lokasi Kawasan Agropolitan yang berada di dalam kawasan kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. pemerintah Pusat menilai kesiapan lokasi untuk dapat dikembangkan sebagai Kawasan Agropolitan. Penilaian dilakukan Berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan potensi lokasi kawasan yang diusulkan.

Persyaratan administrasi berupa dokumen perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, *Masterplan*, RPIJM, dan DED. Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diusulkan dapat dipenuhi jika telah memenuhi kondisi berikut, apabila kelengkapan administrasi dan potensi kawasan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan, apabila kelengkapan administrasi belum terpenuhi semua, tetapi kawasan yang diusulkan memiliki potensi yang baik, dilihat dari profil kawasan tersebut, maka kawasan ini akan diberi kesempatan untuk melengkapinya. Apabila dalam kurun waktu 1 tahun belum terlengkapi, dana bantuan pembangunan pada tahun berikutnya akan dihentikan untuk sementara.

Pemilihan wilayah sebagai kawasan sentra produksi atas pertimbangan potensi komoditas unggulan, kesesuaian lahan dan agroklimat, kesesuaian lembaga pelayanan dan akses distribusi produksi. Pertimbangan lain adalah keberadaan sumber air. Secara fungsional hubungan antar pusat pertumbuhan pada kawasan agropolitan dapat digambarkan pada Gambar 1.3



Gambar 1.4 Struktur Arahan Tata Ruang Kawasan Agropolitan Kec. Baros. Sumber: Disnas Pertanian Kabupaten Serang

Dari gambar di atas menjelaskan pusat Agropolitan memiliki fungsi yang lebih tinggi yaitu sebagai lokasi pelayanan berbagai kegiatan pertanian lanjutan seperti jasa, pemasaran serta penghubung antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Keterkaitan antara pusat agropolitan dengan pusat lainya dengan *hinterland*-nya memiliki sarana dan prasarana yang berbeda sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait implementasi pengembangan kawasan Agropolitan. Permasalahan yang mendasar terkait pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros ialah adalah *Pertama*, Program pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang ini belum memiliki peraturan daerah ataupun surat keputusan dari pemerintah Kabupaten Serang untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan program pengembangan kawasan Agropolitan. Bapak Dahlan Pada 20 April 2015 (Badan Perencanaan Pembangunan Bapeda Kabupaten Serang) mengatakan bahwa memang belum ada peraturan dari

pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan Agropolitan, akan tetapi program itu masuk dalam program unggulan Bupati Serang dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang. Ibu Rory (Bagian Pembangunan Ekonomi Bapeda) juga mengatakan hal yang sama ketika di konfirmasi pada tanggal 20 April 2015 bahwa landasan hukum terkait pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan ialah Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Kabupaten Serang Jadi belum ada Surat Keputusan yang dijadikan aturan dan mekanisme dalam menjalankan program ini.

Dan selain itu yang *kedua*, Peneliti menilai sosialisasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan kurang begitu menjelaskan mengenai isi dan tujuannya. Masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang program Agropolitan ini, bahkan yang tau sekalipun tidak paham dengan aturan dan sistem dari program Agropolitan. Di satu sisi pengembangan Agropolitan merupakan terobosan baru yang dipandang positif, karena dapat menjadi stimulan bagi peningkatan pembangunan perdesaan. Tetapi di sisi lain peneliti mengkhawatirkan sosialisasi Program Agropolitan yang belum begitu maksimal dapat menyebabkan kurangnya pemahaman aparatur desa dan warga desa dalam mengimplementasikan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan yang baru ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan sekretaris Camat Kecamatan Baros bapak Suhada mengenai kurangnya sosialisasi Program ini. Dalam wawancara peneliti tanggal 22 Juni 2015, kami pihak pemerintah kecamatan tidak mengetahui persis mengenai program Agropolitan itu, akan tetapi memang program itu sedang sedang digulirkan di kecamatan Baros ini. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Hedi Suhaedi, SP (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Baros) memang sosialisasi terkait Agropolitan ini ada akan tetapi masih sangat kurang. Ditataran pemerintah kecamatan dan perangkat desa pun masih kurang apalagi ke masyarakat yang berada di Kecamatan Baros ini.

Ketiga, Belum adanya koordinasi yang baik dan misi yang sama antara Satuan Kerja Perangkat Dinas pertanian, perhubungan, pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum. (Wawancara pada tanggal 28 Januari dengan Pak Ayi Nugraha Kepala Seksi Tanaman Holti Dinas Pertanian Kabupaten Serang) yang terlibat dalam pengembangan kawasan Agropolitan Baros ini, padahal koordinasi merupakan suatu usaha yang sikron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Apabila Koordinasi tidak terjaga bahkan tidak ada bagaimana dapat tercipta keadaan yang seragam, selaras dan harmonis dalam menjalankan program Agropolitan ini. Pak Suhada juga mengatakan bahwa memang koordinasi belum terjalin dengan baik dalam pelaksanaan program Agropolitan ini padahal seharusnya di tahun 2015 ini harus lebih baik dari tahun 2014.

Keempat, Keempat, Permasalahan lainnya dalam bidang infrastruktur/ sarana pendukung sub sistem Agribisnis hulu seperti kios-kios saprotan, gudang, parkir dan tempat bongkar muat masih belum dimiliki oleh desa-desa yang berada di Kecamatan Baros. Begitu pula dengan infrastruktur/ sarana pendukung sub sistem Agribisnis usaha tani, seperti penyediaan air baku untuk meningkatkan produksi, banyak desa-desa di Kecamatan Baros yang hanya menggunakan air hujan untuk mengairi tanam-tanaman lahan keringnya, seperti tanaman durian dan pisang. Pada infrastruktur/ sarana pendukung sub-sistem pengolahan hasil seperti gudang penyimpanan yang dilengkapi sarana pengawetan/ pendinginan (*cold storage*) dan *packing house* untuk tempat sortasi dan pengepakan masih belum dimiliki dan industri kecil untuk mengolah hasil panen tanaman-tanaman lahan kering, seperti melinjo menjadi emping, pisang menjadi sale pun masih belum ada di Kecamatan Baros. Untuk infrastruktur/ sarana dan prasarana sub sistem hasil pemasaran hasil seperti pasar tradisional yang terdiri dari kios-kios, los-los peralatan parkir, dan tempat bongkar muat barang serta prasarana dan sarana sub-terminal agribisnis masih belum dimiliki oleh Kecamatan Baros. Untuk infrastruktur/ sarana dan prasarana sub-sistem penunjang pun seperti sarana kelembagaan, seperti Badan Pengelolaan Agropolitan, Kantor Perbankan, Koperasi, Unit-unit Usaha Agropolitan masih belum dimiliki oleh Kecamatan Baros. Hal ini terjadi karena belum optimal nya program Agropolitan jadi, ketika program Agropolitan ini sudah berjalan dengan bagus dan optimal maka akan tersedia infrastruktur yang baik.

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti ungkapkan dalam latar belakang masalah, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang menyangkut pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang yaitu:

1. Program pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang ini belum ada Surat Keputusan Kelompok Kerja dari pemerintah Kabupaten Serang untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan program pengembangan kawasan Agropolitan.
2. Kurangnya sosialisasi terkait Program Pengembangan Kawasan Agropolitan hal ini terlihat dari masyarakat yang tidak mengetahui Program Agropolitan tersebut.
3. Belum adanya koordinasi yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Dinas pertanian, perhubungan, pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengimplentasikan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang oleh sebab itu dalam pelaksanaannya belm dapat berjalan dengan baik.
4. Dalam bidang infrastruktur/ sarana pendukung sub sistem Agribisnis hulu seperti kios-kios saprotan, gudang, parkir dan tempat bongkar muat masih belum dimiliki oleh desa-desa yang berada di Kecamatan

Baros. Keadaan ini merupakan imbas dari tidak sempurnanya program Agropolitan ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Setelah mengidentifikasi beberapa masalah yang penulis paparkan maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait Pelaksanaan Program dan faktor-faktor penghambat Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang tahun 2014.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti buat, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana Pelaksanaan Program Serta Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang ?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Program pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang ?”.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai program yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam menjalankan program yang dibuat oleh pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam mengamati fenomena sosial, dan khasanah ilmu pengetahuan lain selama mengikuti program studi Ilmu Administrasi Negara. Manfaat penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi atau referensi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Teori dalam administrasi mempunyai peranan yang sama dengan teori yang ada dalam ilmu fisika, kimia maupun biologi yang berfungsi untuk menjelaskan dan panduan dalam penelitian yang seperti dikemukakan oleh Kerlinger dalam Sugiyono (2012:41) mengemukakan bahwa:

“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variabels, with purpose of explaining and predicting the phenomena.”

Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

William Wiersma dalam Sugiyono (2012:41) menyatakan bahwa: *“A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.”* Selain itu, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Cooper dan Schindler dalam Sugiyono (2012:41) menyatakan bahwa: *“A theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact).”*

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan

meramalkan fenomena. Dari beberapa pengertian teori, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori merupakan seperangkat konsep dan definisi untuk menganalisis suatu fenomena secara sistematis dan holistik. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian.

Definisi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.

Oleh karena itu peneliti akan menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Beberapa hal yang akan diuraikan adalah : mengenai, pengertian program, konsep wilayah, pengertian perencanaan wilayah, konsep Kawasan Agropolitan, konsep pengembangan Kawasan Agropolitan, Sistem Agribisnis, Sistem Agroindustri, sistem Agrowisata.

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah (Budiardjo:2008:20).

Pengertian Kebijakan menurut Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) sebagai berikut:

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Carl Friedrich (dalam Wahab, 2008 : 3) menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah :

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara menurut Wahab (2008:5) bahwa : Kebijaksanaan negara diartikan sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh

instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintahan. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young Quinn (dalam Suharto:2005:44), antara lain:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analisis kebijakan publik juga dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para peneliti melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat. Dalam penelitian ini, definisi yang peneliti simpulkan adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam bernegara.

2.1.2 Analisis Kebijakan Publik

Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. (Nugroho, 2012: 299).

Ada lima tahapan dalam proses analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn, yakni:

1. Perumusan Masalah. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Merumuskan suatu masalah publik yang benar dan tepat tidaklah mudah karena sifat masalah publik yang sangat kompleks. Ada beberapa karakteristik dari masalah publik, di antaranya adalah saling ketergantungan antara berbagai masalah publik, subobyektifitas dari masalah kebijakan, *artificiality* masalah, dan dinamika masalah kebijakan.
2. Peramalan masa depan kebijakan. Peramalan atau *forecasting* adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Tujuan *forecasting* adalah: (1) memberikan informasi mengenai kebijakan di masa depan dan konsekuensinya; (2) melakukan control dan intervensi kebijakan guna memengaruhi perubahan, sehingga akan mengurangi resiko yang lebih besar.
3. Rekomendasi kebijakan. Prosedur rekomendasi meliputi transformasi informasi mengenai aksi-aksi kebijakan yang akan menghasilkan keluaran yang bernilai. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan khusus diperlukan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannya berbagai alternatif tindakan. Sementara itu, membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik dan mengapa. Oleh karenanya prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi terkait erat dengan persoalan etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apakah pertanyaan advokasi:
 1. Dapat ditindaklanjuti?
 2. Bersifat prospektif?
 3. Bermuatan “nilai”-selain fakta?

4. Etik?
4. Pemantauan hasil kebijakan. Pemantauan atau *monitoring* merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan, setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan.
5. Evaluasi kinerja kebijakan. Evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan: “apa perbedaan yang dibuat?” Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif (*ex post*), sementara kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (*ex ante*).

2.1.3 Model Analisis Kebijakan Publik

Menurut Dunn ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif.

1. Model prospektif
Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan ‘sebelum’ suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut dengan model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
2. Model Retrospektif
Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan ‘setelah’ suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
3. Model Integratif
Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik ‘sebelum’ maupun ‘sesudah’ suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

2.1.2 Konsep Pelaksanaan

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan plotis dengan adanya intervensi dengan kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut. Eugene Bardach dalam Agustino (2008:138)

Adalah cukup dalam membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengeranya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkanya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Sedangkan, Van Mater dan Van Horn dalam Agustino (2008:139)

mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Model pendekatan *top down* yang dikembangkan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn di sebut dengan *A model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini engandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Matter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut, adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan apat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari

kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang untuk merealisasikan kebijakan public sehingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang sesuai dengan pekerjaan yang diisaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapasitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja dari kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu di perhitungkan adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka memang menjadi persolan pelik untuk merealisasikan apa yang dituju oleh kebijakan public. Demikian pula dengan hal nya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia dan kucuran dana berjalan dengan baik tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu Van Matter dan Van Horn sumberdaya yang dimaksud adalah ketiga sumberdaya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian dari agen pelaksana adalah meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini penting karena implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan public yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan jika kebijakan public itu tidak terlalu merubah perilaku manusia maka dapat sajaagen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak sekeras pada gambaran yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka semakin banyak pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecendrungan (*disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh

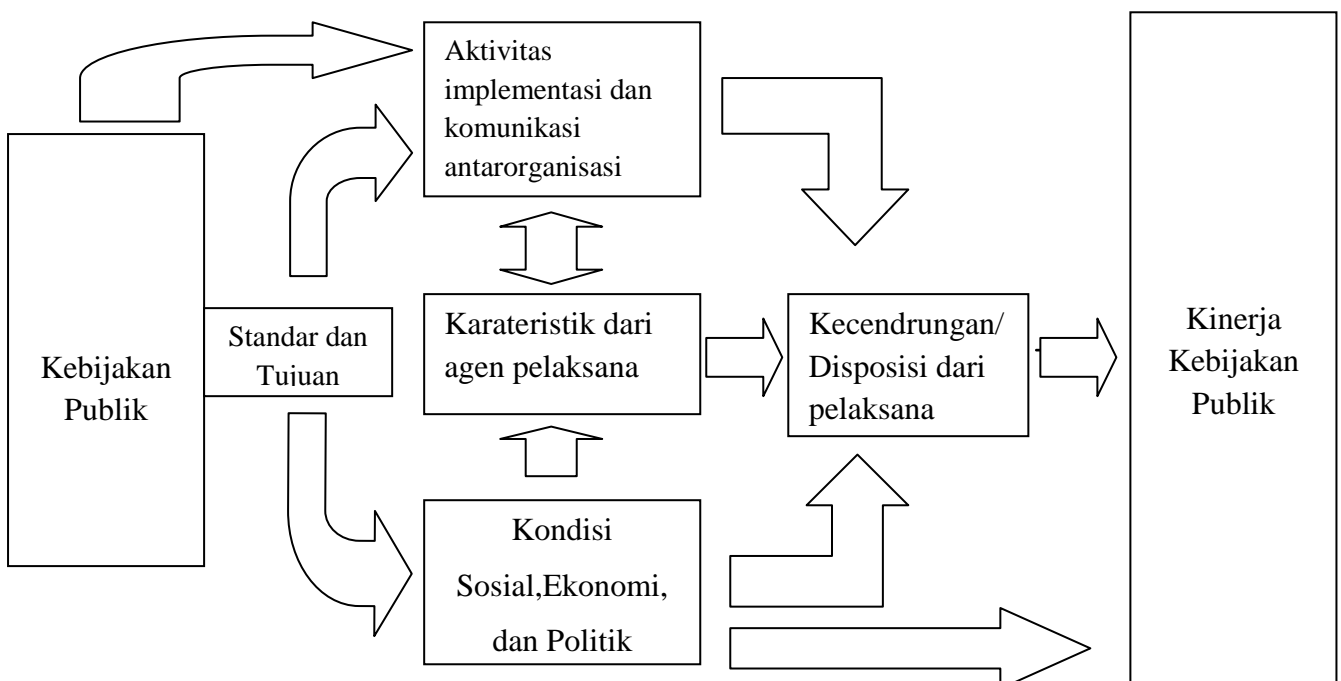
karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan “dari atas” yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsi nya semua kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi public dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Matter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus juga memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.



Gambar 2.1 Model Pendekatan The policy Implementasi Proses Van Matter dan Van Horn dalam Agustino (2008:144)

2.1.3. Pengertian Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Dengan adanya program maka akan terbentuk suatu perencanaan untuk menentukan suatu rangkaian kegiatan. Melalui perencanaan tersebut, maka segala bentuk program yang telah dibuat akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Adapun definisi mengenai program menurut (Arikunto 2004:2) menyatakan bahwa:

“Program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, program dapat diartikan dengan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang dikemudian hari. Sedangkan pengertian khusus dari program biasanya jika dikaitkan dengan evaluasi yang bermakna suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.”

Melihat pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program adalah rancangan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang memiliki rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.

2.1.4 Konsep Wilayah

Secara umum, wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, didalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi. Menurut Glasson (Tarigan, 2005:111), menyatakan ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar kita bisa membedakan lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Hal ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis. Pandangan objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah. Wilayah bisa dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimilikinya atau berdasarkan atas konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari ciri-ciri diatas. Menggunakan pandangan objektif membuat jenis analisis atas ruang menjadi terbatas.

Adapun (Tarigan, 2005:112), mengungkapkan mengenai unsur-unsur ruang yang terpenting adalah:

1. Jarak,
2. Lokasi,
3. Bentuk, dan
4. Ukuran atau skala.

Artinya setiap wilayah harus memiliki keempat unsur diatas. Unsur-unsur diatas secara bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lain. Sedangkan Glasson dalam Tarigan (2005:112), mengatakan bahwa:

“Wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isinya (*homogeneity*) misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, hierarki jalur transportasi, dan lain-lain.”

Wilayah atau kawasan sangat penting dalam pengelolaan wilayah pertanian dan perkebunan, karena merupakan wadah yang utama di wilayah pertanian. Wilayah atau kawasan adalah wadah kehidupan manusia beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya meliputi tanah, air, dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan. Sehingga diperlukan adanya pembagian wilayah untuk dapat mengelola wilayah tersebut dengan baik.

Adapun Rustiadi membagi konsep wilayah atas enam jenis. Enam konsep jenis wilayah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Rustiadi *et al.*, 2009:32):

- 1) Wilayah Klasik, mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik dimana komponen-komponen dari wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional.
- 2) Wilayah homogen, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa bersifat heterogen. Pada umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam.
- 3) Wilayah nodal, yaitu wilayah yang menekankan pada perbedaan dua komponen-komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. Konsep wilayah nodal diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai inti dan plasma. Inti adalah pusat-pusat pelayanan/pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang (*hinterland*).
- 4) Wilayah sebagai sistem, dilandasi atas pemikiran bahwa komponen-komponen di suatu wilayah memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dan tidak terpisahkan.
- 5) Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada wilayah baik akibat sifat alamiah maupun non alamiah sehingga perlu perencanaan secara integral.

- 6) Wilayah administratif-politis, berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. Wilayah yang dipilih tergantung dari jenis analisis dan tujuan perencanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah atau kawasan merupakan suatu unit geografi yang berkaitan dengan konsep ruang dan waktu yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya sehingga terjadi suatu interaksi sosial.

2.1.5 Konsep Wilayah Pertanian

Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan padahal kalau kita tinjau lebih jauh kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (*intensive farming*). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai *intensifikasi*.

Pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan. Sedangkan pengertian pertanian yang dalam arti luas

tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan membudidayakan serta mengelola dibidang perternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti: ayam, bebek, angsa. Serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian.

Peranan petani tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa demikian karena petani menjadi pemasok setiap kebutuhan pangan dari setiap anggota keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Tanpa adanya petani manusia tentu tidak dapat memenuhi kebutuhannya bahkan harus mengimpor barang-barang pangan dari luar. Untuk wilayah Indonesia profesi sebagai petani mampu mengurangi angka pengangguran yang cukup besar dimana sektor pertanian terbuka secara luas asalkan memiliki modal dan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan usaha tani tersebut. Keterkaitan peran para petani dengan masyarakat bisa disamakan sebagai keterkaitan antara produsen dengan konsumen. Dimana produsen harus selalu menyediakan setiap saat barang-barang kebutuhan dari konsumennya. Oleh karena itu terdapat saling ketergantungan antara peran petani dengan masyarakat dalam pemenuhan setiap kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Konsep Perencanaan Wilayah

Perencanaan wilayah merupakan unsur utama dalam melaksanakan suatu pengembangan kawasan atau wilayah. Termasuk di dalam pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang,

dibutuhkan perencanaan kawasan yang baik sehingga pengembangan kawasan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut (Glasson dalam Tarigan, 2005:7) mengatakan bahwa “*Major features of general planning include a sequence of actions which are designed to solve problems in the future.*” Jadi, perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Glasson kemudian menetapkan urutan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *The identification of the problem;*
2. *The formulation of general goals and more specific and measurable objectives relating to the problem;*
3. *The identification of possible constraints;*
4. *Projection of the future situation;*
5. *The generation and evaluation of alternative courses of action; and the production of a preferred plan, which in generic form may include and policy statement or strategy as well as a definitive plan.*

Untuk kebutuhan perencanaan wilayah di Indonesia, Glasson memperluas kembali penjelasan mengenai perencanaan wilayah. Menurutnya perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-langkahnya sebagai berikut (Tarigan, 2005:7-8):

1. Gambaran kondisi data ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data sekunder maupun data primer.
2. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.
3. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia.
4. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya menurut (Tarigan 2005:4), menyatakan definisi perencanaan wilayah adalah:

“Mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrolable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat tercapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut.”

Sedangkan perencanaan wilayah menurut (Miraza 2005:55), menyatakan bahwa:

“Perencanaan wilayah adalah suatu perencanaan yang berjangka panjang, bertahap dan tersistematis dengan suatu tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ini adalah yang menyangkut pada keselarasan kepentingan *stakeholder*, baik masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok pengusaha maupun pemerintah sendiri. Perencanaan wilayah menyangkut pada bagaimana pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun potensi sumber daya buatan yang harus dilaksanakan secara *fully dan efficiently* agar pemanfaatan potensi dimaksud benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara maksimal.”

Berdasarkan beberapa konsep perencanaan wilayah yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan wilayah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan melalui berbagai langkah seperti identifikasi kondisi, pembatas, kendala; mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif; serta menyusun kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, perencanaan wilayah juga memiliki bidang-bidang perencanaan yang memiliki disiplin ilmu tersendiri. Ditinjau dari sudut isi, perencanaan wilayah sebetulnya dapat dirumuskan dalam sebuah kalimat sederhana, yaitu menetapkan kegiatan apa yang perlu dibangun dan dimana lokasinya. Namun definisi yang dikemukakan diatas sebetulnya mencakup

bidang yang sangat luas karena menyangkut seluruh sektor kegiatan dan lokasinya menyangkut seluruh wilayah analisis. Melihat luasnya bidang yang tercakup didalam perencanaan wilayah maka ilmu perencanaan wilayah dapat dibagi atas berbagai subbidang seperti berikut ini (Tarigan, 2005: 11-12):

1. Subbidang perencanaan ekonomi sosial wilayah, dapat diperinci lagi atas:
 - a. Ekonomi soal wilayah (mencakup hal-hal mendasar dan berlaku umum);
 - b. Ekonomi sosial perkotaan (mencakup butir a plus masalah spesifik perkotaan);
 - c. Ekonomi sosial pedesaan (mencakup butir a plus masalah spesifik pedesaan).
2. Subbidang perencanaan tata ruang atau tata guna lahan dapat diperinci atas:
 - a. Tata ruang tingkat nasional;
 - b. Tata ruang tingkat provinsi;
 - c. Tata ruang tingkat kabupaten atau kota;
 - d. Tata ruang tingkat kecamatan atau desa;
 - e. *Detailed design* penggunaan lahan untuk wilayah yang lebih sempit, termasuk perencanaan teknis, terutama di wilayah perkotaan.
3. Subbidang perencanaan khusus seperti:
 - a. Perencanaan lingkungan;
 - b. Perencanaan pemukiman atau perumahan;
 - c. Perencanaan transportasi.
4. Subbidang perencanaan proyek (*site planning*) seperti:
 - a. Perencanaan lokasi proyek pasar;
 - b. Perencanaan lokasi proyek pendidikan;
 - c. Perencanaan lokasi proyek rumah sakit;
 - d. Perencanaan lokasi proyek *real estate*;
 - e. Perencanaan lokasi proyek pertanian;
 - f. Lain-lain sebagainya.

Dalam hal ini, walaupun dari keseluruhan bidang tersebut termasuk ke dalam bidang perencanaan wilayah, namun untuk beberapa subbidang yang cakupan wilayahnya sempit tetapi bersifat rinci telah tercakup atau diajarkan pada disiplin ilmu lain sehingga seringkali tidak lagi diajarkan atau tercakup dalam ilmu perencanaan wilayah. Bahkan beberapa diantaranya telah

diajarkan dalam disiplin ilmu lain terlebih dahulu sebelum berkembangnya ilmu perencanaan wilayah (Tarigan, 2005:12).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan wilayah terdiri dari bidang-bidang yang kompleks yang membutuhkan pembagian ke dalam subbidang agar dapat memperjelas suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat lebih terarah secara spasial dan memberikan kemudahan di dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.7 Konsep Kawasan Agropolitan

2.1.7 1 Pengertian Kawasan Agropolitan

Secara harafiah, istilah Agropolitan berasal dari kata Agro yang berarti 'pertanian' dan Polis/Politan yang berarti 'kota'. Dalam buku Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan & Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Agropolitan didefinisikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis sehingga mampu melayani, mendorong, menarik, serta menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Buku tersebut juga mendefinisikan Kawasan Agropolitan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yang ditandai dengan keberadaan pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya sehingga terbentuklah Kawasan Agropolitan.

Definisi Kawasan Agropolitan pun telah termaksub dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan Kawasan Agropolitan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan Agrobisnis. Adapun konsep Agropolitan merupakan konsep yang dikenalkan Friedman dan Douglas 1975 (dalam buku *Agropolitan dan Minapolitan* Kemen PU 2012:25). Konsep ini ditawarkan atas pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri yang terjadi dialami negara-negara berkembang di Asia. Kegagalan tersebut mengakibatkan terjadinya *hyper urbanization*, pembangunan hanya terjadi di beberapa kota saja, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi, kemiskinan akibat pendapatan yang tidak merata, terjadinya kekurangan bahan pangan, penurunan kesejahteraan masyarakat desa, serta ketergantungan kepada dunia luar.

Dijelaskan dibuku yang sama konsep Agropolitan :

dengan kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa/km². Distrik Agropolitan terdiri atas kota-kota tani berpenduduk 10.000–25.000 jiwa. Luas wilayahnya dibatasi dengan radius sejauh 5–10 km sehingga menghasilkan jumlah penduduk total antara 50.000–150.000 jiwa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Konsep Friedman tidak membedakan secara spesifik antara pertanian modern ataupun konvensional dan menyebutkan setiap Distrik sebagai satuan tunggal yang terintegrasi. Definisi Friedman di atas menggunakan besaran penduduk dan luasan wilayah sebagai ukuran. Maka. Dapat disimpulkan bahwa suatu distrik Agropolitan setara dengan satu Wilayah Pengembangan Parsial (WPP) permukiman transmigrasi jika dilihat dari besaran penduduknya. Sedangkan. jika dilihat dari luasan wilayahnya yang berkisar pada 100–250 km² atau 10.000–25.000 ha. ukurannya dapat lebih kecil dari luasan 1 WPP. Apabila dilihat secara administratif, besaran penduduk dan luasan wilayah tersebut setara dengan luasan wilayah kecamatan yang berpenduduk sampai dengan 25.000 jiwa dan sudah dapat

berfungsi sebagai suatu simpul jasa distribusi. Sementara, berdasarkan strukturnya, Kawasan Agropolitan dibedakan atas Orde Pertama (Kota Tani Utama), Orde Kedua (Pusat Distrik Agropolitan atau Pusat Pertumbuhan), dan Orde Ketiga (Pusat Satuan Kawasan Pertanian). Setiap orde berfungsi sebagai simpul jasa koleksi dan distribusi dengan skala yang beragam dan berjenjang (hirarki) serta pusat pelayanan permukiman. Antarsimpul tersebut disambungkan oleh jaringan transportasi yang sesuai. Orde Pertama dan Kedua dipisahkan oleh jarak sekitar 35–60 km. sesuai dengan kondisi gegografis wilayah. Sedangkan, Orde Kedua dan Ketiga terletak dalam satu distrik Agropolitan yang berjarak sekitar 15–35 km satu sama lainnya. Menurut definisi yang ada, Agropolitan atau Kota Pertanian dapat merupakan Kota Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan, Kota Perdesaan, atau Kota Nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan (buku Agropolitan dan Minapolitan Kemen PU 2012:28)

Kota Pertanian ini pun mampu mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa di wilayah sekitarnya (*hinterland*) melalui pengembangan berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri kecil, jasa pelayanan, hingga pariwisata. Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterikatan desa dan kota. Hal ini dapat terwujud melalui pengembangan sistem dan usaha Agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di Kawasan Agropolitan.

2.1.7.2 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

Secara konseptual pengembangan Agropolitan merupakan sebuah pendekatan pengembangan suatu kawasan pertanian perdesaan yang mampu memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan produksi pertanian di sekitarnya, baik pelayanan yang berhubungan dengan sarana produksi, jasa distribusi, maupun pelayanan sosial ekonomi

lainnya sehingga masyarakat setempat tidak harus menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, pengembangan agropolitan merupakan suatu upaya memperpendek jarak antara masyarakat di kawasan sentra pertanian dengan pusat-pusat pelayanan konvensional (yang berkembang tanpa orientasi kuat pada pusat pelayanan kegiatan pertanian). Dengan demikian pusat-pusat pelayanan baru ini (agropolitan) adalah pusat pelayanan dengan cakupan pelayanan terbatas dan lebih berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat pertanian.

Dalam pengembangan kawasan pertanian, Permentan Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, beberapa hal yang perlu dideskripsikan secara jelas adalah antara lain:

1. Lahan yang dipilih mempunyai kelas kesesuaian lahan S1(sangat sesuai), S2 (cukup sesuai) atau S3(sesuai marjinal) diutamakan yang tergolong S1 atau S2.
2. Lahan pengembangan bukan merupakan lahan pertanian yang telah diusahakan, dan diutamakan pada lahan pertanian yang memiliki potensi lahan terlantar atau lahan tidur.
3. Letak kawasan tidak jauh dari tempat tinggal petani dan potensi pengembangan infrastruktur cukup mudah.
4. Pengembangan lahan tanaman pangan basah mengikuti rencana pembangunan irigasi sebagai sumber air, sedangkan pengembangan lahan tanaman kering harus mempertimbangkan jumlah curah hujan dan rencana pengembangan dan ketersediaan sumber air permukaan lainnya.

Pengembangan Agropolitan di wilayah yang sudah berkembang seperti di Pulau Jawa relative lebih mudah dilakukan, karena pada umumnya desa telah mampu menjalankan sebagian fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan wilayah yang belum berkembang atau *remote*. Di wilayah yang belum berkembang, desa pada umumnya tidak dilengkapi dengan saran dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

masyarakat. Oleh sebab itu pengembangan Agropolitan di wilayah yang belum berkembang membutuhkan investasi awal yang relative besar.

Sedangkan menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem Agrobisnis.

2.1.7.3 Prinsip Kawasan Agropolitan

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirakhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis (Pasal 1, Ayat 24). Untuk itu Agropolitan merupakan suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur pedesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Prinsip dasar pengembangan kawasan agropolitan adalah : (1) Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan kawasan pedesaan berbasis agribisnis (Kawasan Sayur dan Buah-Buahan); (2) Pengembangan agropolitan merupakan program utama dan kegiatan terpadu lintas sektor dengan pendekatan bottom up; (3) Penetapan kawasan agropolitan dimulai dengan penataan detail kawasan dalam bentuk cetak (blue print); (4)

Perencanaan disusun secara bersama antara instansi pemerintah, masyarakat tani, dan swasta/dunia usaha dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota; dan (5) Pengembangan kawasan agropolitan harus berdasarkan Master Plan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pengembangan Kawasan Agrpolitan bertujuan untuk : (1) Menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian (agribisnis) di perdesaan; (2) Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat perdesaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis Agribisnis; (3) Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga ekonomi di perdesaan; (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan (5) Mewujudkan tata ruang ideal antara kota dengan desa yang saling mendukung melengkapi dan memperkuat.

Untuk kriteria kawasan, pengembangan kawasan agropolitan harus memiliki : (1) Daya dukung sumberdaya alam dan potensi fisik yang memungkinkan (kesesuaian lahan, agroklimat, dan agroekologi) untuk dapat dikembangkan sistem dan usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan; (2) Komoditas pertanian unggulan yang dapat menggerakkan ekonomi kawasan; (3) Perbandingan luas kawasan dengan jumlah penduduk, ideal untuk membangun sistem dan usaha agribisnis dalam skala ekonomis dan jenis usaha tertentu; (4) Tersedia prasarana (infrastruktur) dan sarana produksi dasar yang memadai seperti pengairan, listrik, transportasi, pasar lokal dan kios sarana produksi; dan (5) Memiliki suatu lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan, penghubung dengan daerah/kawasan sekitarnya yang terintegrasi secara fungsional.

2.1.7.4 Strategi dan Tujuan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 48, dinyatakan bahwa penataan ruang kawasan perdesaan pada dasarnya ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Keenam arah yang dituju dalam penataan ruang kawasan perdesaan tersebut, berkaitan erat dengan

pengembangan Kawasan Agropolitan karena Kawasan Agropolitan merupakan salah satu wujud dari penataan kawasan perdesaan.

Dalam undang-undang yang sama, pasal 51 (ayat 1) disebutkan bahwa rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang atau beberapa wilayah kabupaten.

Ayat 2 Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan rencana tata ruang kawasan Agropolitan memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan
2. Rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan
3. Rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya
4. Arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antar desa dan
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Lebih lanjut pada pasal 54, ayat 2, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam satu kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada dua atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada dua atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah. Dan pasal 54, ayat 4, menyebutkan bahwa penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan, wilayah dan nasional.

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, mengatur pula penataan ruang untuk kawasan perdesaan. Prinsip-prinsip penataan ruang kawasan perdesaan sudah selayaknya memperhatikan amanat undang-undang ini, setidaknya dapat menjadi acuan umum dalam pengembangan kawasan perdesaan, termasuk dalam hal ini pengembangan kawasan agropolitan ke depan.

Dalam perspektif jangka panjang, pengembangan kawasan Agropolitan diorientasikan sebagai embrio kawasan perkotaan dengan fokus kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, baik budidaya maupun sektor penunjang dan pengolahan hasil budidaya pertanian. Ini dicapai melalui *multiplier effect* dimana sektor utama kota agropolitan, yaitu pertanian, mendorong investasi di sektor hulu maupun hilir sehingga terciptanya *off-farm employment opportunities* yang akan mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi lain.

Kawasan agropolitan pada dasarnya terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan yang dapat direpresentasikan sebagai “kota tani” atau “kota kecil” yang terletak di wilayah perdesaan, dengan fungsi utama melayani sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Inilah aspek keruangan dari kawasan agropolitan, dimana adanya sistem produksi pertanian tersebut, menjadi sumbu atau simpul perekonomian kawasan Agropolitan. Selain itu, aspek keruangan yang penting adalah adanya keterkaitan antara satuan sistem permukiman dengan sistem agribisnis, dimana pusat kegiatan menjadi pengikat dari kedua sistem ini, sebagai pusat pelayanan fungsi kota serta pusat pengumpul dan distribusi hasil dan faktor produksi pertanian.

Menata ruang kawasan agropolitan harus secara terintegrasi dengan perencanaan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Keterkaitan desa-kota dalam sistem pengembangan wilayah menjadi bagian dari strategi pengembangan sistem-sistem perkotaan wilayah dan nasional yang terpadu yang mencakup diantaranya keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non-hijau.

2.1.7.5 Pengelolaan Kawasan Agropolitan

Peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan kawasan Agropolitan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dengan peta kewenangan masing-masing sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Tugas pemerintah pusat adalah membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) serta kewenangan dalam bidang pemerintahan yang menyangkut lintas provinsi dan koordinasi lintas departemen. Dalam pengembangan kawasan agropolitan peranan pemerintah pusat adalah:
 - b. Penyusunan rencana, program dan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dalam bentuk peraturan pemerintah dan pedoman umum pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) serta pedoman lainnya dari departemen teknis terkait.
 - c. Pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas provinsi dan lintas sektoral.
 - d. Penyelenggaraan studi, penelitian dan kajian untuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

- e. Pembangunan sarana dan prasarana publik yang bersifat strategis dalam skala nasional dan lintas wilayah/provinsi.

2. Pemerintah Provinsi / Daerah Tingkat I

Kewenangan pemerintah provinsi adalah membantu/memfasilitasi pemerintah kota/kabupaten dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) serta bertanggungjawab dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di tingkat provinsi serta kegiatan pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota serta melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dalam program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) ini peranan pemerintah provinsi adalah:

1. Mengkoordinasikan rencana program dan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di wilayah provinsi.
2. Memberikan pelayanan informasi tentang rencana pengembangan wilayah dan tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
3. Memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten dan lintas departemen/instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
4. Menyelenggarakan pengkajian teknologi tepat guna ramah lingkungan sesuai kebutuhan petani dan pengembangan wilayah.
5. Membangun prasarana dan sarana publik yang bersifat strategis dan mendukung perkembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di dalam wilayah provinsi.

3. Pemerintah kabupaten/kota

Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, maka penanggungjawab di tingkat pemerintah tingkat II adalah Bupati/Walikota. Oleh karena itu peranan utama dari pemerintah daerah tingkat II adalah:

- a. Merumuskan program, kebijakan operasional dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- b. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mempersiapkan master plan, program dan melaksanakan program pengawasan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- c. Menumbuhkembangkan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

4. Peran Masyarakat

a. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai center of excellence akan menjadi mitra pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam pengembangan riset dibidang budidaya pertanian, peternakan, perikanan. Perguruan tinggi diharapkan akan menjadi soko guru bagi

pengembangan pendidikan dan pelatihan agribisnis kepada masyarakat petani dan dunia usaha.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan good governance, serta pemerintahan yang bersih, dan berwibawa akan selalu bersikap kooperatif dan kritis, sehingga diharapkan:

1. Akan terjadi mekanisme kontrol atas program-program pemerintah khususnya tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
2. LSM akan memberikan masukan, kritik dan saran atas pedoman atau ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) yang ada dan sedang berjalan, sehingga diharapkan akan memberikan *feed back* yang baik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

c. Masyarakat dan dunia usaha:

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang perlu terus didorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dengan pendekatan *community driven planning*, dengan pendekatan ini diharapkan:

1. Terciptanya kesadaran, kesepakatan dan ketaatan masyarakat dan dunia usaha terhadap aturan tata ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan).
2. Masyarakat dan dunia usaha ikut merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan juga mengontrol pelaksanaan program agropolitan dan penataan ruang kawasannya

2.1.7.6 Persyaratan Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitan merupakan konsep pengembangan kawasan yang memiliki peranan penting di dalam menumbuhkan perekonomian suatu daerah, khususnya di Kawasan Pertanian. Namun untuk menjadi suatu kawasan Agopolitan terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangan bagi suatu kawasan untuk menjadi kawasan Agropolitan. Sehingga tidak semua kawasan bisa menjadi kawasan Agropolitan. Kawasan Agropolitan memiliki berbagai persyaratan diantaranya kelengkapan dokumen perencanaan seperti, SK Kawasan, SK Pokja, *Masterplan*, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dan *detail engineering design* (DED). Adapun

persyaratan lainnya berdasarkan Permentan No. 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:

1. Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lahan basah maupun lahan kering.
2. Pengembangan komoditas tanaman pangan pada lahan gambut mengacu pada kelas kesesuaian lahan gambut yang telah berlaku.
3. Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
4. Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan
5. Dapat diintegrasikan dengan komoditas lainnya.
6. Kawasan pertanian pangan pada lahan basah yang telah diusahakan secara terus menerus tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dan 7 (tujuh) komoditas utama.
7. Kawasan pertanian pangan pada lahan kering yang telah diusahakan secara terus menerus di musim hujan tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dan 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan

Semua persyaratan kawasan Agropolitan di atas berdasarkan Permentan No. 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan di dalam pengembangan kawasan Agropolitan. Sehingga ketentuan di dalam Permentan No. 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ini, dijadikan salah satu acuan oleh peneliti dalam perencanaan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

2.1.8 Peningkatan Produksi Pertanian Dengan Konsep Agropolitan

Sesuai dengan Program Kebijakan dan Strategi Program Nasional Pertanian, seluruh program dan kegiatan sektorpertaniann mengacu pada

konsep Agropolitan didasarkan pada prinsip-prinsip: integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi. Pelaksanaan konsep Agropolitan harus disesuaikan dengan tujuannya, yaitu peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Seluruh program dan kegiatan Kementerian Pertanian harus mengarah pada sasaran dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Program Nasional Pertanian. Sesuai dengan Strategi Program Nasional Pertanian, setiap bidang memerlukan paket-paket kegiatan yang mampu merealisasikan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan sistem dan mata rantai produksi, fasilitas pendukung, seperti sarana, prasarana, dan permodalan, serta teknologi, sumberdaya manusia dan sistem pendampingan. Paket-paket kegiatan peningkatan produksi dilaksanakan secara nasional, sedangkan khusus untuk kawasan Minapolitan paket-paket kebijakan yang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik kawasan yang bersangkutan

Salah satu jenis peningkatan produksi dalam konsep Agropolitan Sebagai model dalam pengembangan perdesaan, kawasan agropolitan Kecamatan Baros dengan 14 desanya dikembangkan berdasarkan satuan-wilayah yang menunjang masing-masing sub sistem agribisnis secara efisien dan efisien yang berorientasi pasar. Kegiatan usaha pada setiap sub system agribisnis diselenggarakan pada wilayah-wilayah dengan keunggulan dan fungsi masing-masing yang secara spasial diintegrasikan untuk melayani permintaan pasar. Dalam pembangunan Agropolitan Baros sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya pembangunan pertanian melalui sistem agribisnis ini dapat diidentifikasi melalui ke empat

sub- sistemnya, yaitu: 1) Sub-sistem Agribisnis Hulu (*upstream off-farm agribusiness*), 2) Sub-sistem Agribisnis Budidaya *on-farm* (*on-farm agribisnis*), 3) Sub-sistem Agribisnis Hilir (*downstream off-farm agribusiness*) dan 4) Sub-sistem Agribisnis Pendukung.

Selain Agribisnis jenis peningkatan produksi dalam konsep Agropolitan yaitu dengan Agrowisata. Agrowisata, secara umum didefinisikan sebagai konsep yang mengandung suatu kegiatan perjalanan atau wisata yang dipadukan dengan aspek – aspek kegiatan pertanian. Agrowisata bila ditinjau dari aspek substansinya lebih dititik beratkan pada upaya menampilkan kegiatan pertanian dan suasana pedesaan sebagai daya tarik utama wisatanya serta dengan tidak mengabaikan sisi kenyamanan. Pengertian ini mengacu pada ciri kegiatan wisata yang rekreatif, ditambah lagi dengan unsur pendidikan dalam kemasan paket wisatanya dan unsur sosial ekonomi. Dan juga pemasaran hasil pertanian untuk menunjang sistem pemasaran hasil pertanian dengan memperpendek mata rantai tata niaga perdagangan hasil pertanian. Mulai dari sentra produksi sampai ke sentra pemasaran akhir (*outlet*).

2.1.9 Mekanisme Pengembangan Kawasan Agropolitan

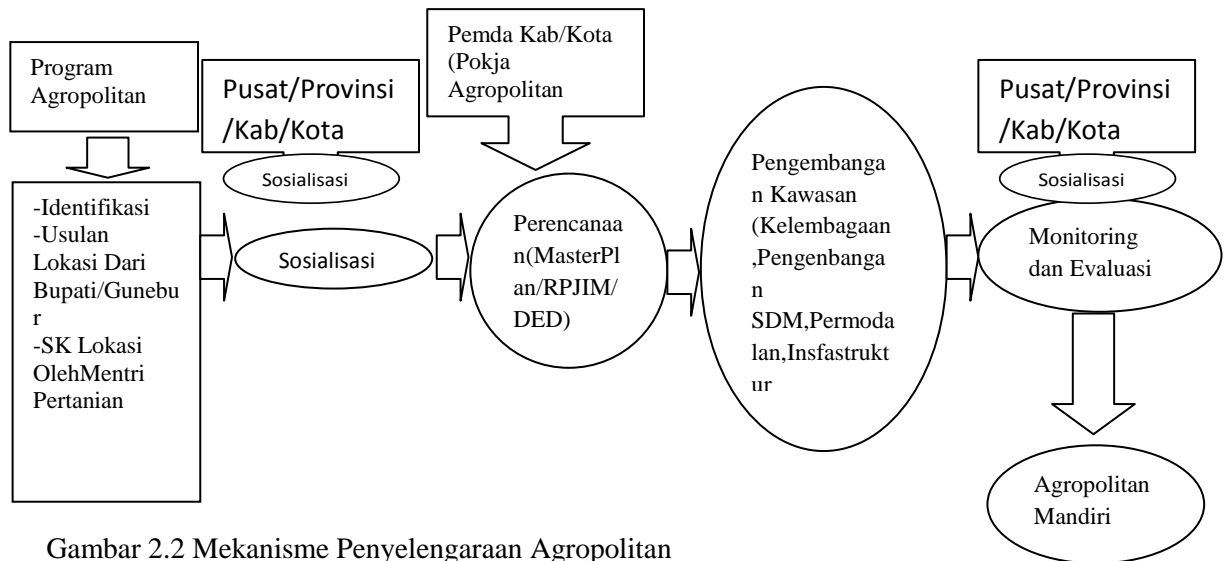
Secara internal, Kawasan Agropolitan terdiri dari kota-kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian. Kawasan ini tidak dibatasi oleh batasan administratif pemerintahan (desa/ kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota). Melainkan, disesuaikan dengan memerhatikan skala ekonomi kawasannya sehingga dirasakan lebih

fleksibel. Dengan demikian, bentuk dan luasan Kawasan Agropolitan dapat meliputi satu desa/kelurahan, kecamatan, atau beberapa kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Kawasan ini dapat pula meliputi wilayah yang menembus wilayah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan.

Dari sisi eksternal, Kawasan Agropolitan harus memiliki aksesibilitas dengan kota-kota berjenjang lebih tinggi di sekitarnya untuk menciptakan sebuah sistem pemasaran yang terpadu. Pada dasarnya, perdesaan yang menjadi sasaran lokasi pengembangan Kawasan Agropolitan adalah yang memiliki komoditi unggulan pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam pengembangan Kawasan Agropolitan, terurai mekanisme pengajuan usulan pengembangan Kawasan Agropolitan. Cakupan mekanisme berupa prosedur pengajuan lokasi dan proses pemilihan/penilaian Kawasan Agropolitan. Berkenaan dengan prosedur pengajuan lokasi, mekanismenya meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini.:

- a. Usulan dari Kabupaten oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten mengajukan usulan mengenai Kawasan Agropolitan. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten telah melakukan identifikasi potensi dan masalah terlebih dahulu. Identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan potensi lokal, yaitu komoditas unggulan. Lokasi Kawasan Agropolitan yang berada di dalam kawasan kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- b. Pemerintah Pusat menilai kesiapan lokasi untuk dapat dikembangkan sebagai Kawasan Agropolitan. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan potensi lokasi kawasan yang diusulkan. Persyaratan administrasi berupa dokumen perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, *Masterplan*, RPIJM, dan DED.
- c. Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diusulkan dapat dipenuhi jika telah memenuhi kondisi berikut: (1) Apabila kelengkapan administrasi dan potensi kawasan yang diusulkan

telah memenuhi persyaratan dalam butir huruf b. (2) Apabila kelengkapan administrasi belum terpenuhi semua, tetapi kawasan yang diusulkan memiliki potensi yang baik, dilihat dari profil kawasan tersebut, maka kawasan ini akan diberi kesempatan untuk melengkapinya. Apabila dalam kurun waktu 1 tahun belum terlengkapi, dana bantuan pembangunan pada tahun berikutnya akan dihentikan untuk sementara. Kawasan Agropolitan yang dikembangkan merupakan bagian dari sistem kewilayahan kabupaten. Oleh karena itu, potensi kabupaten harus dikaji terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan aspek strategis dari unsur/komponen makro pembentuk Kawasan Agropolitan, yakni memiliki komoditas/potensi unggulan yang dapat diandalkan untuk mengembangkan kawasan secara keseluruhan. Potensi/komoditas unggulan dapat berupa ketersediaan sumber alam potensial, prasarana dan sarana, atau kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Proses penilaian/pemilihan Kawasan Agropolitan yang diusulkan diuraikan secara lebih detail berikut ini: (1) Program-program pengembangan kawasan dari departemen/badan yang memiliki keterkaitan lingkup kegiatan (tupoksi) dengan pengembangan kawasan berbasis agribisnis. (2). Komoditas unggulan sebagai pemicu untuk tumbuh kembangnya kehidupan dan penghidupan dari sektor-sektor komoditi ikutan lainnya. Komoditas tersebut meliputi komoditas subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, dan subsektor peternakan. (3) Potensi kabupaten yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan. Potensi kabupaten merupakan faktor pendukung berkembangnya Kawasan Agropolitan. (4) Kawasan Agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan. Namun, prosedur penetapannya dimulai dari penetapan kabupaten terpilih dan basis analisa data berdasarkan batas administrasi. Oleh karena itu, proses penilaian Kawasan Agropolitan diawali dengan proses penilaian Kabupaten yang berpotensi untuk mendapatkan kawasan terpilih. (5) Ketersediaan infrastruktur sebagai unsur penting dalam pembangunan Kawasan Agropolitan. (6) Persyaratan pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi Kawasan Agropolitan.



Gambar 2.2 Mekanisme Penyelenggaraan Agropolitan

(Sumber: Buku Pedoman umum Agropolitan Kemen PU)

2.1.10 Sistem Agribisnis

Konsep agribisnis adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Konsep agribisnis menurut adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.

Secara tradisional, pertanian di Indonesia hanya dianggap sebagai kegiatan bercocok tanam saja. Kegiatan pertanian lebih berorientasi kepada peningkatan produksi komoditi primer dan kurang memberi kesempatan untuk memikirkan perkembangan produk hilir. Dari sisi kebijakan, pembangunan pertanian cenderung terlepas dari pembangunan sektor lain, kebijakan di bidang pertanian tidak selalu diikuti oleh kebijakan pendukung

lain secara sinergis. Akhir dasawarsa 1950-an muncul konsep agribisnis yang mencoba melihat pertanian sebagai sebuah sistem yang lebih kompleks.

Dalam *masterplan* kawasan agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang 2011 disebutkan bahwa sistem agribisnis merupakan suatu system kegiatan usaha dibidang pertanian yang bernuansa dagang (*business*), yang pelakunya paling tidak terdiri dari (1) sub sistem penyediaan prasarana, sarana dan teknologi usahatani, (2) subsistem produksi usahatani, (3) subsistem pengolahan hasil (agroindustri), (4) subsistem pasar dan (5) subsistem penunjang. Kelima subsistem tersebut tidak dapat saling mengganti tetapi saling tergantung satu sama lain.

2.1.11 Sistem Agroindustri

Dalam *masterplan* kawasan agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang 2011 disebutkan bahwa sistem agroindustri pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua hal yaitu pertanian dan industri. Keterkaitan antara kedua hal tersebut yang kemudian menjadi sistem pertanian dengan basis industri yang selanjutnya dinamakan agroindustri. Industri yang dikembangkan adalah industry yang terkait dengan pertanian terutama pada sisi penanganan pasca panen.

2.1.12 Sistem Agrowisata

Dalam *masterplan* kawasan agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang 2013 tentang koordinasi pengembangan Agrowisata

mendefinisikan agrowisata sebagai suatu bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata dengan tujuan memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang Agropolitan. Pengembangan Agrowisata di setiap lokasi merupakan pengembangan yang terpadu antara pengembangan masyarakat desa, alam terbuka yang khas, permukiman desa, budaya dan kegiatan pertanian serta sarana pendukung wisata seperti transportasi, akomodasi dan komunikasi.

Dalam hubungannya dengan pembangunan wilayah kegiatan pariwisata seringkali menyebabkan kebocoran wilayah yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor lain dalam mendukung kebutuhan sektor pariwisata. Untuk itu, usaha yang dilakukan dalam pembangunan wilayah adalah memadukan hubungan sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor transportasi dan sektor industri. Sektor pertanian harus mampu berkembang baik sebagai penyedia bahan pangan maupun sebagai alternatif obyek wisata yang bernuansa alam dan sosial budaya yang unik. Dalam hal ini maka sektor pertanian diharapkan dapat menyediakan produk-produk yang berkualitas untuk memenuhi keperluan para wisatawan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti penelitian terdahulu yang terkait dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Ada dua penelitian terdahulu yang akan dipaparkan. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadri Rahmawati pada tahun 2008 dalam Skripsi mengenai *Pengaruh Pelaksanaan Agropolitan terhadap Perkembangan Ekonomi di Tujuh Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Magelang*. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian tersebut diperoleh sebagai berikut: Sesuai dengan pelaksanaan konsep agropolitan di Kabupaten Magelang yang berdasarkan pada tiga sektor yaitu sektor agribisnis, agrowisata dan Agroindustri harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dan hasil yaitu, : Pelaksanaan Agropolitan di Kawasan Merapi-Merbabu masih banyak menemui kendala terutama yang berkaitan dengan pengadaan modal, pengadaan teknologi dan sumberdaya pelaku atau petani yang kurang berkembang. Setelah pelaksanaan agropolitan, kawasan yang memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk sektor pertanian adalah Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Grabak dan Kecamatan Ngablak. Setelah pelaksanaan agropolitan, ketersediaan fasilitas publik di tujuh kawasan Agropolitan mengalami peningkatan terutama peningkatan pada fasilitas industri dan pengangkutan. Strategi prioritas pengembangan agropolitan Borobudur yang dipilih oleh responden adalah pengembangan sumberdaya pelaku agribisnis dan Agrowisata.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadri Rahmawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti memfokuskan penelitian pada Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, sedangkan Nur Fadri Rahmawati

memfokuskan penelitiannya pada Pengaruh Pelaksanaan Agropolitan terhadap Perkembangan Ekonomi di Tujuh Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Magelang Pengaruh Kawasan Agropolitan di Kecamatan Poncokusumo.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nevi Pahlevi 2011 dalam Skripsinya yang berjudul “Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Lebak (Study Kasus :Kawasan Agropolitan Kecamatan Wanasalam)” Penelitian yang dilakukan tentang analisis sector unggulan pertanian wilayah Kabupaten Lebak dengan pendekatan sektro pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu Klasfikasi pertumbuhan sector perekonomian wilayah Kecamatan Wanasalam berdasarkan Kiassen Typology menunjukan sector yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developing sector*) yaitu sector pertanian dan sector jasa-jasa.

Pesatnya pertumbuhan di sector pertanian dikarenakan kondisi geografis Kecamatan Wanasalam yang selain didukung iklim yang baik dalam bercocok tanam terutama dalam produksi padi sawah yang rata-rata produksinya 4,8 Ton/Ha disusul dengan produksi tanaman perkebunan berupa kelapa. Selain itu juga Wanasalam memiliki garis pantai yang cukup signifikan yang menjadikan Wanasalam sebagai penghasil ikan laut sebanyak 3.925 Ton/tahun dan ikan air tawar sebanyak 59,74 Ton/tahun. Pertumbuhan di sector jasa-jasa diakibatkan sebagai peranan distribusi dalam produksi hingga kepada para pedagang yang sangat pesat sebagai bagaian dari rantai bisnis di Kecamatan Wanasalam.

Sektor maju tapi tertekan(*stagnan Sektor*), yaitu sektor bangunan dan konstruksi. Kondisi ini terjadi akibat dari pemekaran wilayah, dimana Kecamatan Wanasalam merupakan Kecamatan baru yang dipisahkan dari Kecamatan Malimping sebagai Kecamatan Induk, sehingga pembangunan infrastruktur di Kecamatan Wanasalam Masih terbilang belum berkembang.

Sektor potensial atau masih dapat berkembang(*developing sector*) yaitu sektor pertambangan dan pengalihan, serta sektor Air minum dan Listrik. Sektor pertambangan dan pengalihan, serta sektor Air minum merupakan dukungan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi wilayah, namun sektor-sektor tersebut belum memberikan daya tarik yang kuat terhadap dunia usaha dikarenakan dukungan infrastruktur, regulasi serta focus pengembangan wilayah masih belum di prioritaskan. Serta sektor Industri Pengolahan, perdagangan, Hotel, Pengangkutan, Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya relatif tinggi.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nevi Pahlevi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti memfokuskan penelitian pada Analisis pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, sedangkan Nevi Pahlevi memfokuskan Penelitiannya pada pengembangan Potensi Ekonomi di Kawasan Agropolitan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting (Sugiyono, 2005:65). Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:

Kawasan Pertanian merupakan salah satu potensi produktif untuk dikembangkan, karena Kawasan Pertanian merupakan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Konsep Agropolitan merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Yang memacu kesejahteraan masyarakat dengan bertani. Kawasan Agropolitan adalah kawasan ekonomi Agribisnis, Agrowisata dan Agroindustri yang terdiri dari sentra-sentra produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, jasa, dan kegiatan lainnya yang saling terkait yang dilaksanakan secara terintegrasi. Penggerak utama ekonomi di kawasan Agropolitan dapat berupa kegiatan produksi dan perdagangan, hortikultura, kawasan wisata berbasis hasil pertanian dan Agroindustri.

Kecamatan Baros Kabupaten Serang merupakan wilayah yang telah ditetapkan menjadi kawasan Agropolitan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dan Pengembangan Kawasan Agropolitan juga termasuk Program Unggulan Bupati Serang Priode 2010-2015, dimana berdasarkan Peraturan Daerah dan termasuk program prioritas unggulan Kabupaten tersebut telah ditetapkan bahwa wilayah yang menjadi pusat (Agropolis) pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros

Kabupaten Serang dipusatkan di Desa Baros, desa Penyirapan dan Desa Sidangmukti sebagai pusat pendukung/pusat layanan. Sementara wilayah pendukungnya (*hinterland*) ada di Desa Sinarmukti, Sidamukti, Padasuka, Sukamanah, Sukaindah, Sukamenak, Cisalam, Curug Agung, Tamansari, dan Desa Sukacai (*Masterplan Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang*, 2013).

Adapun penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang Pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang Dalam menganalisis program pengembangan kawasan Agropolitan tersebut, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn (1975) yang menjelaskan bahwa dalam (*A Model of The Policy Implementation*),

terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu, Implementasi kebijakan publik terdiri dari:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

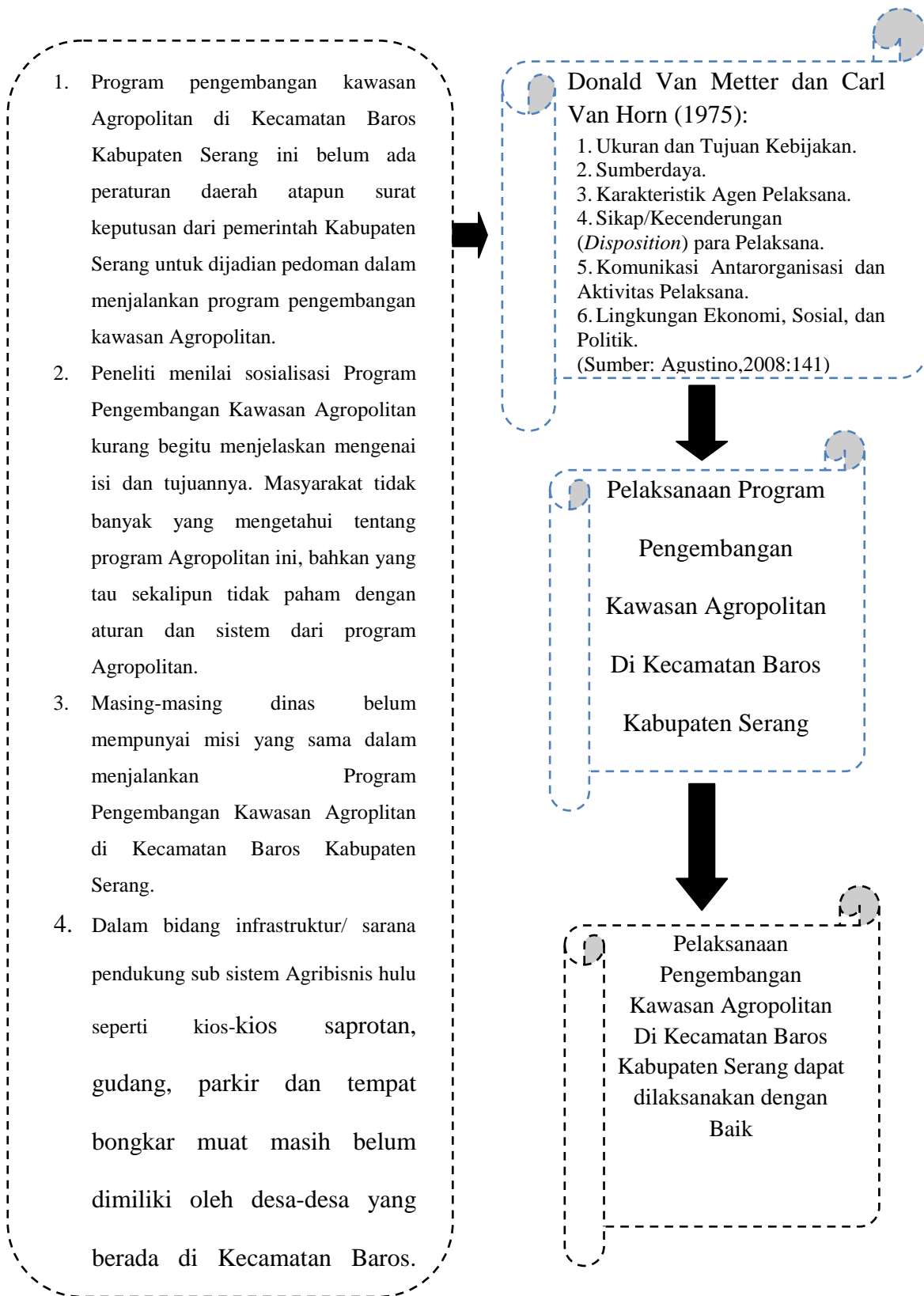
Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Pelaksanaan Program ini. Variabel pertama bahwa Ukuran dari sebuah kebijakan ini berjalan dengan baik adalah bagaimana kebijakan ini berhasil, apabila melihat dari masalah yang ada maka kebijakan ini belum bisa dikatakan berjalan. Dan melihat tujuan dari

kebijakan maka akan terlihat jelas bagaimana kebijakan ini harus berjalan sebagaimana tujuannya. Variable kedua Sumberdaya bagaimana sumberdaya manusia, finansial, dan waktu dapat berjalan dengan baik dan optimal dalam menjalankan sebuah kebijakan. Ketiga Karakteristik Agen Pelaksana bagaimana agen pelaksana ini merubah tindakan para petani yang sudah lama dengan sistem bertani mereka dengan cara bertani dengan metode Agropolitan ini, dan sebagaimana banyak agen yang dilibatkan dalam mencakup luas wilayah implementasi kebijakan ini. Dengan melihat koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Dinas terkait yang belum terjalin dengan baik maka akan sangat sukar untuk menjadikan kebijakan ini akan berjalan dengan baik.

Keempat Sikap/kecenderungan (*Dispotition*) para pelaksana, dengan melihat bahwa kebijakan ini bersifat (*top down*) atau kebijakan yang berasal dari pemerintah atau “atas” bukan berasal dari “bawah” masyarakat. Bagaimana para agen pelaksana ini memahami dan menyesuaikan kebutuhan yang mereka inginkan dan ingin diselesaikan. Kelima komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme yang sangat ampuh dalam mengimplementasikan (Agustino 2008:144). Peneliti menemukan tingkat koordinasi antara pihak-pihak yang terkait belum menunjukkan tingkat koordinasi yang baik, bagaimana teori menyelesaikan masalah yang ada terkait koordinasi dalam mengimplementasi program ini.

Dan yang terakhir adalah variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, lingkungan sosial yang ada di Kecamatan Baros menunjukkan bahwa sikap dan cara bertani mereka masih dengan cara lama dan belum sesuai

dengan metode Agropolitan dan bagaimana hubungan antara pemerintah setempat dengan masyarakat tentu akan sangat berpengaruh dalam pengimplementasian program ini. Maka dengan melihat uraian di atas maka peneliti menggunakan teori dari Van Matter dan Van Horn sangat sesuai tepat dan sangat rasional untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk mengetahui secara lebih jelas alur berpikir yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Penulis
(Sumber:Peneliti,2015)

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka dapat dibuat asumsi dasar dalam penelitian ini yang merupakan anggapan peneliti terhadap permasalahan yang diteliti. Maka peneliti berasumsi bahwa pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Menurut Sugyono (2010:1), secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2013:6) metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) mendefinisikan, metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah yaitu objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.

Pendekatan deskriptif digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual mengenai pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang

3.2 Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah terkait Pelaksanaan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai pelaksanaan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Dilakukan di Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Dengan Desa Baros sebagai pusat Agropolitan, Desa Panyirapan dan Desa Sindangmandi sebagai pusat pendukung/layanan Agropolitan Desa Sinarmukti, Sidamukti, Padasuka, Sukamanah, Sukaindah, Sukamenak, Cisalam, Curug Agung, Tamansari, Sukacai sebagai *hinterland*/unit-unit produksi/kawasan layanan.

3.4 Fenomena yang Diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2008:141-144), yang menjelaskan bahwa dalam (*A Model of The Policy Implementation*), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Pelaksanaan Program ini.

3.4.2 Definisi Operasional

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu mengenai Pelaksanaan Program Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Van Metter dan Van Horn, berikut

rincian dari dimensi dan indikator yang digunakan pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Pelaksanaan Program Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Apakah ukuran dan tujuan dari kebijakan ini sudah realistis pada level pelaksana kebijakan ? Apakah Tujuan dari kebijakan ini sudah realistis dan dibutuhkan di daerah tersebut ?
	Sumberdaya	Apakah sumberdaya manusia yang bergerak dalam kebijakan sudah berkompeten dan kapabel sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik ? Apakah sumberdaya waktu tidak berbenturan atau terlalu ketat dalam berjalannya kebijakan ?
	Karakteristik Agen Pelaksana	Apakah ciri-ciri agen pelaksana implementasi kebijakan sudah tepat dan cocok ditempatkan dalam kebijakan ini ? Apakah luas wilayah implementasi kebijakan telah sesuai dengan besarnya agen yang dilibatkan ?
	Sikap/Kecenderungan (<i>Disposition</i>) para Pelaksana	Apa sikap yang diambil oleh (agen) pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan, karena kebijakan ini adalah kebijakan ”dari atas” atau bukan hasil dari formulasi warga.
	Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana	Apakah koordinasi dan komunikasi antar semua pihak-pihak dalam kebijakan ini berjalan dengan baik ?
	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	Apakah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkup kebijakan ini berjalan kondusif ?

(Sumber: Peneliti, 2015)

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validitas terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Adapun yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2012:59).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Loflang dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169), sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder seperti dokumen, dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa pedoman wawancara, buku catatan, kamera digital dan alat perekam (*handphone*).

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan ini terbagi menjadi dua, yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Adapun dalam penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah setiap orang yang terkait dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, diantaranya yaitu:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Jabatan	Status Informan
1	Instansi Perencana 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bapeda Kabupaten Serang 2. Kepala Bidang Pertanian Bapeda Kabupaten Serang 3. Kepala Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang	Key Informan
2	Instansi Pelaksana 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian. 3. Kepala Bidang Upt Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang	Key Informan

	4. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang	
	Masyarakat 1. Gabungan Kelompok Tani 2. Masyarakat Petani 3. Kepala Upt Seksi Pertanian Kecamatan Baros	Key Informan
4	Aparatur Setempat 1. Camat Baros 2. Gapoktan Baros 3. Gapoktan Penyirapan 4. Gapoktan Sindangmukti	<i>Secondary Informan</i>

Sumber: Peneliti, 2015

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara strategis. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan responden, tetapi dinamakan dengan narasumber, atau partisipan, atau informan. Selanjutnya teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012:63).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (Nazir, 2009:193). Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu penentuan informan yang terdiri dari informan kunci dan informan sekunder, kriteria informan dan pedoman wawancara disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti. Selain itu, sebelum melakukan wawancara peneliti juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
- b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
- c. Menjelaskan situasi atau badan yang melaksanakan.
- d. Mempersiapkan pencatatan data wawancara

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-

kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (Nazir, 2009:200). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, namun pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun secara garis besar, pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Sub Dimensi	Informan
1	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Ukuran realistis Kebijakan 2. Tujuan realistis Kebijakan	1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Serang 2. Kepala Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang 3. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang.
2	Sumberdaya	1. Sumberdaya Manusia 2. Sumberdaya Waktu	1. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang 2. Kepala Bidang upt Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang. 3. Kepala Bidang destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang 4. Kelompok Tani 5. Gabungan Kelompok Tani 6. Masyarakat Petani

3	Karakteristik dan Agen Pelaksanaan	1. Karakter/sikap dari Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang 3. Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. 4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Serang
4	Sikap/Kecerdruangan (disposition) para pelaksana	1. Agen dari pelaksana dalam menangani kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang 2. Kepala Bidang Upt Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang 3. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang
5	Komunikasi Antarorganisasi dan aktivitas pelaksana	1. Koordinasi semua pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Serang 2. Kepala Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang 4. Kepala Bidang Upt Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang 5. Kepala Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang
6	Lingkungan Ekonomi Sosial Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi 2. Sosial 3. Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Serang 2. Kepala Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang 3. Kepala Bidang Tanaman

			Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang 3. Kepala Bidang upt Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang 4. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang 5. Camat Baros 6. Kepala Desa Baros 7. Kepala Desa Penyirapan 8. Kepala Desa Sindangmukti
--	--	--	--

(Sumber:Peneliti,2015)

2. Pengamatan/Observasi

Observasi menurut Moloeng (2007:175) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan/observasi menurut Moloeng (2007:176) dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan cara yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan berperan serta, pengamat melakukan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Namun observasi tanpa berperan serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan.

Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi/pengamatan tanpa peran serta. Adanya keterbatasan waktu menyebabkan peneliti hanya melakukan satu fungsi observasi yaitu hanya melakukan pengamatan tanpa harus menjadi anggota resmi dari kelompok

yang diamati. Selain itu penelitian yang peneliti teliti bukan termasuk penelitian antropologi sehingga tidak memerlukan observasi peran serta.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:82)

Berdasarkan pernyataan di atas, dokumentasi dalam penelitian ini berupa Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Serang, Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Detail Engineering Design (DED), *Business Plan* Agropolitan Kabupaten Serang dan dokumen lainnya.

Dalam sebuah penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa hingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Prasetya Irawan. Langkah-

langkah dalam melakukan analisis data menurut Prasetya Irawan (2006:5.27) yaitu:

1. Pengumpulan data mentah

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini jugadigunakan alat bantu yang diperlukan, seperti *tape recorder*, kamera, dan lain-lain. Catatan hasil wawancara hanya data yang apa adanya (verbatim), tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.

2. Transkrip data

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari *tape recorder* atau catatan tulisan tangan). Peneliti ketik persis seperti apa adanya (verbatim).

3. Pembuatan koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode.

4. Kategorisasi data

Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

5. Penyimpulan sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data dan data yang didapatkan tidak dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti.

6. Triangulasi

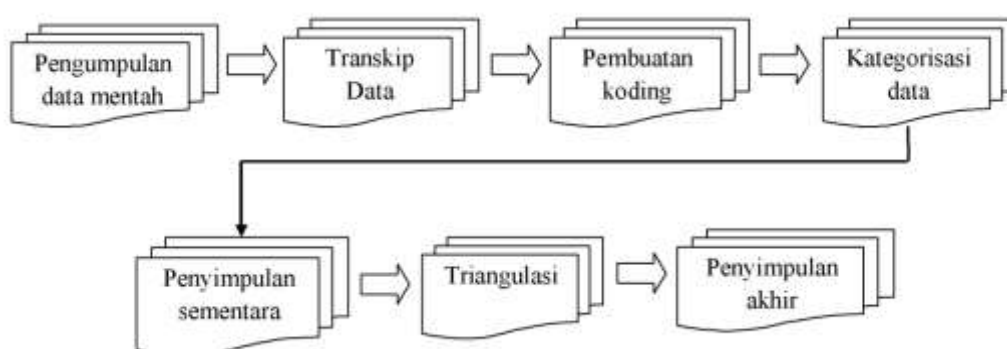
Menurut Prasetya Irawan, triangulasi adalah proses chek dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- a. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda. Bisa dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini bisa dengan teknik informan purposif atau *snowball*.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama tetapi pada berbagai kesempatan misalnya, pada waktu pagi, siang, atau sore hari.

Dengan triangulasi data tersebut, maka dapat diketahui apakah informan/narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika informan/narasumber memberikan data yang berbeda maka berarti datanya belum valid. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

7. Penyimpulan akhir

Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*). Langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Prasetya Irawan (2006:5.27) secara lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut yaitu:



Gambar 3.1
Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan

Sumber: (Irawan, 2006:5.27)

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif dikenal uji keabsahan data. Adapun dalam penelitian ini, untuk pengujian keabsahan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Prasetya Irawan, ada 3 macam teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Adapun pada penelitian ini, teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber

melalui hasil wawancara atau disebut juga dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

3.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, dengan jadwal sebagai berikut

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Pada 17 Juli 2007, Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km². Secara geografis terletak posisi koordinat antara 105°7' - 105°22' Bujur Timur dan 5°50' - 6°21' Lintang Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Lebak dan Pandeglang
- 3) Sebelah Barat : Kota Cilegon dan Selat Sunda
- 4) Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan. Bagian Utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Di bagian Selatan sampai ke Barat, Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gurung Karang dan Gunung Gede.

Daerah yang bergelombang tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuartar. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu Anyar, Kecamatan bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Careng, Kecamatan Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, Lebak Wangi dan Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas sejumlah desa.

4.1.2 Gambaran Umum Lokasi Agropolitan Kabupaten Serang

Luas Kecamatan Baros meliputi areal 44,07 km² atau sekitar 3% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Secara administratif, Kecamatan Baros terbagi ke dalam 14 Desa, 65 Rukun Warga dan 189 Rukun Tangga yang masing – masing mempunyai karakteristik khusus sebagai potensi wilayahnya. Secara geografis lokasi Kecamatan Baros sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curug
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Petir
- 3) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Cadasari

4) Sebelah Barat dengan Kecamatan Pabuaran

Wilayah Kecamatan Baros memiliki ketinggian berkisar antara 112 m sampai 276 m di atas permukaan laut (dpl) atau berada pada ketinggian rata – rata 109 m di atas permukaan laut. Topografinya dapat dikatakan datar (58%) dan miring (42%) dengan sebaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Bentuk Topografi dan Ketinggian Lokasi Desa di Kecamatan Baros

No	Nama Desa	Bentuk Topografi	Ketinggian di atas Permukaan Laut(m)
1	Sukacai	Miring	256
2	Sukamenak	Datar	145
3	Tejamari	Datar	140
4	Penyirapan	Datar	212
5	Tamansari	Miring	245
6	Sindangmandi	Miring	276
7	Curug Agung	Miring	238
8	Sukamanah	Datar	125
9	Padasuka	Datar	132
10	Sinarmukti	Datar	137
11	Sidamukti	Datar	135
12	Baros	Datar	112
13	Cisalam	Miring	189
14	Suka Indah	Miring	155

Sumber: Kecamatan Baros,2015`

Berdasarkan arahnya topografi Kecamatan Baros dari mulai arah Barat sampai kearah Timur (arah Tenggara menuju Timur Laut) berbukit dan makin melandai. Hulu dari ketinggian wilayah adalah Gunung Karang yang berbatasan langsung dengan Desa Sindangmandi dan Desa Cisalam (kedua desa ini tepat di kaki Gunung Karang). Ketinggian dari atas permukaan laut berkisar 200 m dpl sampai 250 m dpl.

Secara geologi wilayah Baros umumnya terbentuk dari bahan erupsi Gunung Karang yang dideposisikan tidak selaras diatas patahan dan lipatan yang tidak teratur dari lapisan (formasi) Bojong Gede, yang berumur pleistosen bawah (IPB, 2010). Umur geologi kala pleistosen tergolong zaman kwarter bawah (Purbo – Hadiwidjoyo, 1975), yang mana paling muda 11 000 tahun yang lalu sampai 3 juta tahun yang lalu (Hunt, 1972). Bahan tersebut mengandung batu gamping bertufa glaukonitik biru dengan penyusupan konglomerat andesitik dan breksi batu kapur yang mengandung kulit kerang. Sedangkan susunan bagian bawahnya terdiri dari bahan glaukonitik, bertufa dengan sedikit - banyak batu gamping yang bagus sekali, lensa-lensa batu kapur, tuf batu apung, dan konglomerat basal.

Berdasarkan teksturnya, Kecamatan Baros didominasi oleh tekstur lempung berasir dengan porositas cukup tinggi, dimana kondisi tekstur tanah seperti ini memudahkan resapan air permukaan pada lahan pertanian sehingga tingkat kehilangan air (water lost) cukup tinggi pada aliran air irigasi perdesaan. Oleh karena itu, pada musim kemarau kondisi lahan pertanian akan cepat mengering dan tanah menjadi retak – retak. Berdasarkan kondisi topografi wilayah yang makin melandai ke arah sebelah timur (timur

laut), maka hulu air permukaan berada di desa – desa dengan lokasi sebelah Barat (tenggara) dan hilir air permukaan berada di desa – desa sebelah Timur (Timur Laut) yang letaknya semakin jauh dari lokasi Gunung Karang. Hal ini berkonsekuensi pada terkategoriannya beberapa desa menurut ketersediaan air sebagai berikut:

- 1) Desa dengan sumber aliran air permukaan cukup banyak (desa sebelah Barat dari poros jalan propinsi) yaitu Desa Sindangmandi, Desa Cisalam, Desa Curugagung, Desa Tamansari dan Desa Sukacai.
- 2) Desa dengan sumber aliran air permukaan sedang (terpotong poros jalan propinsi) yaitu desa Suka Indah, Desa Panyirapan, Desa Sukamanh, dan Desa Baros.
- 3) Desa dengan sumber aliran air permukaan rendah (sebelah timur poros jalan propinsi) yaitu Desa Tejamari, Desa Padasuka, Desa Sidamukti, Desa Sinar Mukti dan Desa Sukamenak.(Sumber : Profil Kecamatan Baros)

Kombinasi dari kondisi ketersediaan aliran air permukaan yang semakin rendah ke arah perdesaan sebelah timur dan kondisi porositas tanah yang tinggi, menyebabkan lahan pertanian di desa – desa sebelah timur poros jalan propinsi termasuk sebagai wilayah tadah hujan dan rentan terhadap kekeringan.

Pada tahun 2014 dilaporkan secara resmi oleh Dinas Pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, bahwa di Kecamatan Baros ada empat desa yang mengalami tanaman padi puso, dengan total luas 25 Ha. Rinciannya adalah 15 Ha di Desa Tejamari, 5 Ha di Desa Sukemanak, 3 Ha di Desa Sinamukti, dan 2 Ha di Desa Sidamukti. Kondisi ketersediaan sumber mata air yang potensial di beberapa desa seperti di Desa Sukacai, Desa Panyirapan, Desa Sindangmandi dan Cisalam, saat ini tidak optimal digunakan untuk mendukung perkembangan pertanian. Hal yang paling mencolok adalah karena beberapa sumber mata air tersebut kini telah dikuasai oleh pihak PDAM dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengkomersilkan air yang bersumber dari mata air – mata air tersebut untuk kebutuhan air minum masyarakat perkotaan (Kota Serang), dan juga untuk mensuplai bahan baku air mineral perusahaan – perusahaan air mineral.

Hal lain yang menjadi alasan mengapa penggunaan sumber mata air tersebut tidak optimal, adalah karena belum tertatanya sistem konstruksi jaringan parit – parit saluran air dari hulu mata air ke wilayah – wilayah pertanian di hilir. Saluran parit drainase umumnya adalah parit saluran irigasi perdesaan alami dengan alur alami (belum direkayasa berupa jaringan penyaluran). Kondisi seperti ini menyebabkan tidak terbaginya air secara meluas, hanya wilayah yang terlewati jalur parit alami tersebut saja yang masih bias memanfaatkannya. Ditambah dengan kondisi tekstur tanah lempung berpasir dengan porositas tinggi, maka water loss menjadi sangat besar, dalam arti bahwa yang mengalir dari hulu mata air banyak meresap ke

dalam tanah sepanjang jalur parit, sehingga air yang sampai ke bagian hilir telah sangat jauh berkurang dari seharusnya.

Penduduk Kecamatan Baros pada tahun 2010 mencapai 51.293 orang terdiri atas 26.885 orang laki – laki (52,4%) dan 24.408 orang perempuan (47,6%), dengan sex ratio rata –rata 110 artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 110 orang laki – laki. Dari tingkat pendidikannya sebagian besar (65%) sudah lulus SD/SMP, sedangkan untuk SMA serta perguruan tinggi masing – masing 9 persen dan 2 persen, sisanya (23%) termasuk yang tidak bias menamatkan SD (Sekolah Dasar). Berikut ini jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kecamatan Baros.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Baros

No	Desa	Jumlah Penduduk(Orang)	Kepadatan Penduduk(Orang/Km)
1	Sukacai	2850	1425
2	Sukamenak	3054	1241
3	Tejamari	3390	1319
4	Penyirapan	5313	2825
5	Tamansari	2567	1070
6	Sindangmandi	4776	1330
7	Curug Agung	2356	982
8	Sukamanah	5185	2033
9	Padasuka	2725	1473
10	Sinarmukti	2169	995
11	Sidamukti	3955	1806
12	Baros	5819	2078
13	Cisalam	3478	792
14	Suka Indah	3656	2163
Kecamatan Baros		51.293	1446

(Sumber:Kecamatan Baros 2013)

Dari Tabel 4.3 diperoleh informasi, tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Baros termasuk pada kriteria padat (lebih dari 300 orang/km²), sehingga tekanan penduduk terhadap daya dukung lahan sudah berat. Kondisi

ini diperkuat dengan rasio orang lahan (*Mand Land Ratio*) sebesar 9,8 orang/ha, yang mengindikasikan kemampuan sumberdaya lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mendekati beban cukup berat (diatas 7 orang/ha).

Jumlah penduduk tersebut merupakan potensi penggerak pembangunan, namun pada saat yang bersamaan dapat menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Desa Panyirapan disusul oleh Desa Suka Indah, Desa Baros dan Desa Cisalam yang mengindikasikan persebaran penduduk Kecamatan Baros kurang merata yang ditandai dengan terkonsentrasinya sebagian besar penduduk di beberapa desa. Selanjutnya penduduk berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Desa	Petani	Pedagang	Buruh	Petukang	PNS	ABRI	Jasa
1	Sukacai	475	42	50	11	4	2	7
2	Sukamenak	611	17	27	25	4	2	45
3	Tejamari	588	18	14	30	5	2	50
4	Penyirapan	910	48	23	43	8	2	84
5	Tamansari	442	28	39	7	5	8	8
6	Sindangmandi	762	46	42	22	5	1	2
7	Curug Agung	382	38	30	10	4	4	3
8	Sukamanah	915	1074	72	16	45	3	35
9	Padasuka	439	22	17	14	4	12	45
10	Sinarmukti	348	52	80	5	6	2	8
11	Sidamukti	748	43	80	5	6	2	8
12	Baros	965	1150	64	40	40	25	37
13	Cisalam	540	49	40	12	4	3	7
14	Suka Indah	519	35	50	10	4	4	8
Kec. Baros		8644	2662	628	250	144	72	347

(Sumber:Kecamatan Baros 2013)

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Baros didominasi sebagai petani (67,81%), hanya 5 persen sebagai buruh dan pegang serta jasa 4

persen. Kondisi ini menunjukkan, bahwa Kecamatan Baros memiliki sumberdaya manusia berbasis pertanian, karena PNS, ABRI dan petuakangan memiliki usahatani pula. Bila dilihat dari jenis usaha pertaniannya, sebagian besar 85 persen merupakan petani tanaman pangan dan hortikultura (buah – buahan), kemudian perkebunan 8 persen, peternakan 4 persen dan perikanan 3 persen.

Kepadatan penduduk mencapai 1.446 orang per km² menunjukkan bahwa Kecamatan Baros memiliki penduduk yang sangat padat (lebih dari 300 orang per km²) dengan (*Man land ratio*) sebesar 9,8 setara dengan 10 orang per ha menunjukkan bahwa beban pertanian sebagai sumber kehidupan relatif sudah berat maka orientasinya ke pengembangan pertanian yang hemat lahan dan bersifat komersial (durian, jagung), setingkat padi untuk pemenuhan kebutuhan lokal (swadaya).

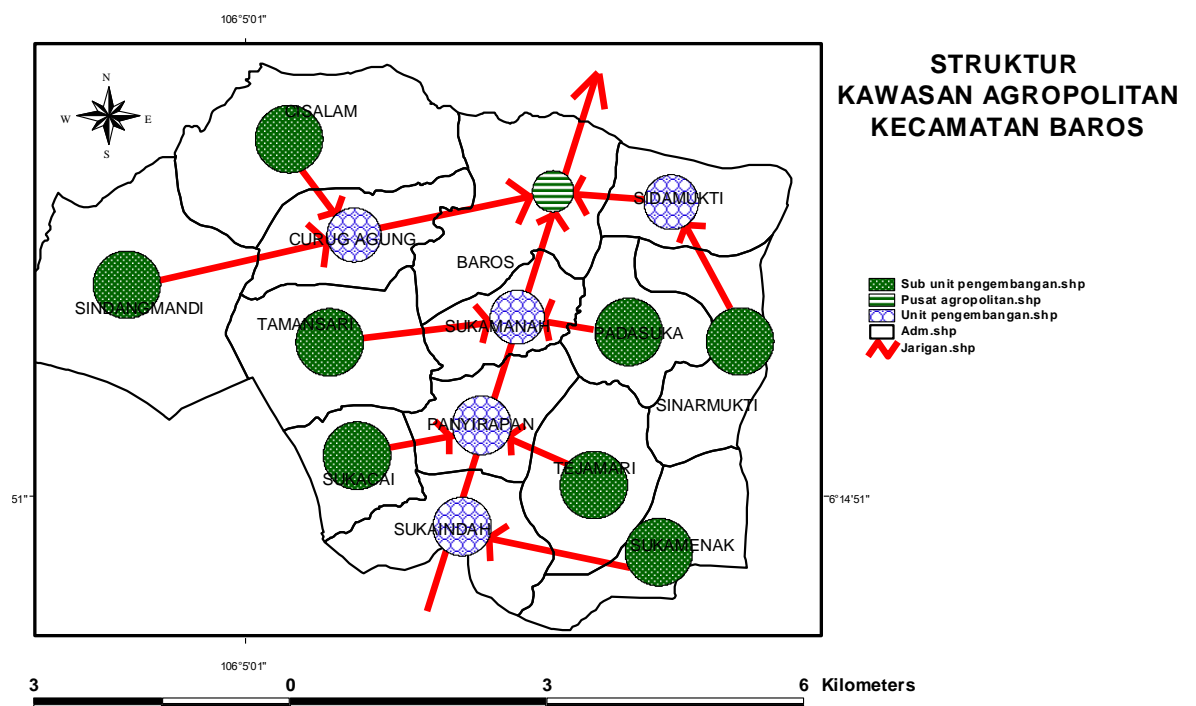
4.1.3 Gambaran Umum Pengembangan Agropolitan Baros Kabupaten Serang

Perencanaan Agropolitan di Kecamatan Baros mengacu pada konsep dasar perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan satu atau beberapa wilayah pendukung kegiatan usaha pada setiap sub sistem agribisnis berdasarkan keunggulan dan fungsi ruang masing-masing. Beberapa satuan wilayah tersebut secara spasial disatukan menjadi kawasan terintegrasi menjadi kawasan Agropolitan. Untuk mewujudkan kawasan Agropolitan ini, disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan

menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Dalam penyusunan Master Plan terdapat 5 komponen yang terdiri atas:

1. Penetapan sektor unggulan
2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan
3. Sistem infrastruktur
4. Penetapan pusat agropolitan
5. Sistem kelembagaan.

Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.



Gambar 4.1. Struktur Kawasan Agropolitan Baros (Sumber:Dinas Pertanian,2015)

Khusus dalam pengembangan sub sistem Agribisnis diusulkan model pengembangan Agroforestri, berupa sistem tumpang sari antara tanaman tahunan dengan tanaman setahun, serta dikombinasi dengan ikan dan ternak. Model ini dapat dikembangkan secara selektif pada lahan dengan karakteristik tertentu. Secara Biofisik, pengembangan model ini didasarkan pada alasan untuk mengatasi masalah dakalnya lapisan tanah. Walaupun sebagian besar kawasan Baros mempunyai tanah yang tergolong subur, namun terdapat hambatan pada adanya lapisan keras (argilik) di bawahnya yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, karena perakaran tidak dapat menembus lapisan tersebut

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian mengenai Pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang Dalam menganalisis program pengembangan kawasan Agropolitan tersebut, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn (1975) yang menjelaskan bahwa dalam (*A Model of The Policy Implementation*), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu, Implementasi kebijakan publik terdiri dari:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Adapun data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan kalimat yang berasal baik dari hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi di lapangan, catatan lapangan penelitian atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini. Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan peneliti secara investigasi dimana peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga informasi yang didapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Informan yang adapun sudah ditentukan dari awal karena peneliti menggunakan teknik *purposive*.

Data-data tersebut merupakan data-data yang berkaitan mengenai pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Serang. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, penulis memberikan kode-kode yaitu sebagai berikut:

1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan,
2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban,
3. Kode I₁₋₁, menunjukkan daftar informan dari Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.

4. Kode I₁₋₂, menunjukkan daftar informan dari Kepala Sub Bidang Pertanian, SDA dan Energi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
5. Kode I₁₋₃, menunjukkan daftar informan dari kepala Dinas tata ruang wilayah Kabupaten Serang.
6. Kode I₂₋₁, menunjukkan daftar informan dari Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas pertanian Kabupaten Serang.
7. Kode I₂₋₂, menunjukkan daftar informan dari Kepala Bidang Upt Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang
8. Kode I₂₋₃, menunjukkan daftar informan Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang.
9. Kode I₂₋₅, menunjukkan daftar informan dari Kepala Kelompok Tani Kecamatan Baros.
10. Kode I₂₋₆, menunjukkan daftar informan dari Masyarakat Petani Baros.
11. Kode I₂₋₇, menunjukkan daftar informan Kepala seksi pertanian kecamatan Baros.
12. Kode I₃₋₁, menunjukkan daftar informan Sekretaris Camat Kecamatan Baros
13. Kode I₃₋₂, menunjukkan informan dari Kepala Desa Baros.
14. Kode I₃₋₃, menunjukkan informan dari Kepala Desa Penyirapan.
15. Kode I₂₋₃, menunjukkan informan dari Kepala Desa Sindangmukti

Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dimana dimensi tersebut mengacu pada menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn (1975)

yang menjelaskan bahwa dalam (*A Model of The Policy Implementation*),

4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Serang, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan metode penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Tabel 4.3
Daftar Informan

No.	Kode Informan	Nama Informan	Keterangan
1	I ₁₋₁	Dahlan	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bapeda Kabupaten Serang
2	I ₁₋₂	Hindun	Kepala Bidang Pertanian Bapeda Kabupaten Serang
3	I ₁₋₃	Handi Susanto	Kepala Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang
4	I ₂₋₁	Yani Herdiani	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

			Serang
5	I ₂₋₂	Zaldi	Kepala Bidang tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang
6	I ₂₋₃	Bahctiar	Kepala Bidang Upt Dinas Pekerjaan Umum
7	I ₂₋₄	Hadi	Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang
8	I ₂₋₅	Sariman	Kelompok Tani
9	I ₂₋₆	Koing	Masyarakat Petani
10	I ₂₋₇	Suhaedi	Kepala Upt Pertanian Kecamatan Baros
11	I ₃₋₁	Suhada	Sekretaris Camat Kecamatan Baros
12	I ₃₋₂	Sahroji	Kepala Desa Baros
13	I ₃₋₃	Ahmad	Kepala Desa Penyirapan
14	I ₃₋₄	Mumuk	Kepala Desa Sidangmukti

Sumber: Peneliti, 2015

4.2.3 Analisis Data

4.2.3.1 Pengumpulan Data Mentah

Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Serang. Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, *review* dokumentasi atau pengumpulan data melalui kajian pustakan, dan studi dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang didapat valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

4.2.3.2 Transkrip Data

Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kota Serang. Pada tahap ini peneliti menyederhanakan data dalam kategori. Pada tahap ini, peneliti merubah

catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari *tape recorder* atau catatan tulisan tangan). Peneliti ketik persis seperti apa adanya (verbatim). Adapun transkrip data dalam penelitian ini, peneliti sajikan dalam daftar lampiran penelitian.

4.2.3.3 Koding Data

Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Kabupaten Serang. Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode. Adapun proses pengkodean data dalam penelitian ini, peneliti sajikan dalam daftar lampiran penelitian.

4.2.3.4 Kategori Data

Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Serang. Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”. Adapun tabel kategorisasi data disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kategorisasi Data

No	Kategori	Rincian Isi Kategori
1	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian ukuran standar dari kebijakan ini adalah kejelasan dan terukur. 2. Tujuan dari kebijakan ini sudah realistis dan dibutuhkan di daerah tersebut
2	Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya manusia yang bergerak dalam kebijakan sudah apakah sudah berkompenten dan kapabel dalam melaksanakan kebijakan ini. 2. Sumberdaya waktu apakah berbenturan dengan kebijakan lain.
3	Karakteristik Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciri-ciri agen pelaksana apakah sudah cocok dengan di tempatkan dalam pengimplementasian program. 2. Luas Wilayah Implementasi dan kesesuaian besarnya agen pelaksana
4	Sikap/Kecenderungan (<i>Disposition</i>) para Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap dari agen pelaksana menolak atau menerima kebijakan ini.
5	Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi 2. Sosialisasi
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Sosial 2. Lingkungan Ekonomi 3. Lingkungan Politik

Sumber: Peneliti,2016

4.2.3.5 Penyimpulan Data Sementara

Penelitian mengenai Pelaksanaan Program Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan

meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data dan data yang didapatkan tidak dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti. Pada penyimpulan sementara ini dimaksudkan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu data dan sebagai tolak ukur sejauh mana data didapat untuk menjawab rumusan masalah yang nantinya data tersebut akan di uji kembali atau triangulasi data.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait implementasi pengembangan kawasan Agropolitan. Permasalahan yang mendasar terkait pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros ialah adalah *Pertama*, Program pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang ini belum ada peraturan daerah ataupun surat keputusan dari pemerintah Kabupaten Serang untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan program pengembangan kawasan Agropolitan. Bapak Dahlan Pada 20 April 2015 (Badan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Serang) mengatakan bahwa memang belum ada peraturan dari pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan Agropolitan, akan tetapi program itu masuk dalam program unggulan Bupati Serang dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang. Ibu Rory (Bagian Pembangunan Ekonomi Bappeda) juga mengatakan hal yang sama ketika di konfirmasi pada tanggal 20 April 2015 bahwa landasan hukum terkait pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan ialah Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Kabupaten Serang Jadi belum ada Surat Keputusan yang dijadikan aturan dan mekanisme dalam menjalankan program ini.

Dan selain itu yang *kedua*, Peneliti menilai sosialisasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan kurang begitu menjelaskan mengenai isi dan tujuannya. Masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang program Agropolitan ini, bahkan yang tau sekalipun tidak paham dengan aturan dan sistem dari program Agropolitan. Di satu sisi pengembangan Agropolitan merupakan terobosan baru yang dipandang positif, karena dapat menjadi stimulan bagi peningkatan pembangunan perdesaan. Tetapi di sisi lain peneliti mengkhawatirkan sosialisasi Program Agropolitan yang belum begitu maksimal dapat menyebabkan kurangnya pemahaman aparatur desa dan warga desa dalam mengimplementasikan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan yang baru ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan sekretaris Camat Kecamatan Baros bapak Suhada mengenai kurangnya sosialisasi Program Agropolitan ini. Dalam wawancara peneliti tanggal 22 Juni 2015, kami pihak pemerintah Kecamatan tidak mengetahui persis mengenai program Agropolitan itu, akan tetapi memang program itu sedang sedang digulirkan di kecamatan Baros ini. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Hedi Suhaedi, SP (Kepala UPT Pertanian Kecamatan Baros) memang sosialisasi terkait Agropolitan ini ada akan tetapi

masih sangat kurang. Ditataran pemerintah kecamatan dan perangkat desa pun masih kurang apalagi ke masyarakat yang berada di Kecamatan Baros ini.

Ketiga, Belum adanya koordinasi yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Dinas pertanian, perhubungan, pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum. (Wawancara pada tanggal 28 Januari dengan Pak Ayi Nugraha Kepala Seksi Tanaman Holti Dinas Pertanian Kabupaten Serang) yang terlibat dalam pengembangan kawasan Agropolitan Baros ini, padahal koordinasi merupakan suatu usaha yang sikron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Apabila Koordinasi tidak terjaga bahkan tidak ada bagaimana dapat tercipta keadaan yang seragam, selaras dan harmonis dalam menjalankan program Agropolitan ini. Pak Suhada juga mengatakan bahwa memang koordinasi belum terjalin dengan baik dalam pelaksanaan program Agropolitan ini padahal seharusnya di tahun 2015 ini harus lebih baik dari tahun 2014.

Adapun berdasarkan kategorisasi data yang telah disajikan diatas dengan mengacu pada teori teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn (1975) yang menjelaskan bahwa dalam (*A Model of The Policy Implementation*), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu, Implementasi kebijakan publik terdiri dari:

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Peneliti dapat mengambil penyimpulan sementara bahwa Pelaksanaan Program Pengembangan Agropolitan masih belum berjalan secara baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya keterlibatan secara aktif dari seluruh SKPD terkait dalam melaksanakan pengembangan kawasan Agropolitan. Kemudian masih lemahnya koordinasi yang dijalin, baik antara pemerintah maupun dengan masyarakat. Selain itu, masih belum terjalinnya kerjasama yang harmonis diantara instansi terkait dalam perencanaan pengembangan Kawasan Agropolitan. Serta masih belum adanya identifikasi/inventarisasi yang baik dari instansi terkait terhadap permasalahan yang ada di Kawasan Agropolitan baik secara ekonomi maupun lingkungan.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini mengacu pada metode penelitian kualitatif yang sangat identik dengan wawancara mendalam, implikasi dari wawancara mendalam yaitu banyaknya informasi yang diperoleh, karena wawancara yang berkembang selama proses observasi. Dengan banyak informasi yang didapat, maka peneliti mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori menurut Metter dan Van Horn (2008:141). Adapun Hasil wawancara yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu: kejelasan standar dan tujuan program pengembangan kawasan Agropolitan, serta standar dan tujuan yang realistis dengan keadaan petani yang menerima ataupun mendapatkan bantuan dalam bentuk barang ataupun ilmu. Standar dan tujuan kebijakan ini dapat dilihat dengan kesiapan program ini berjalan apakah dokumen perencanaan sudah tercukupi atau belum, observasi awal peneliti menemukan bahwa syarat administratif kebijakan ini belum terpenuhi semua yaitu belum tersusunnya Sk Pokja terkait program ini. Mengenai aspek penilaian ukuran dan tujuan kebijakan ini peneliti pertanyakan kepada I1-1 yang mengatakan bahwa tujuan dari program pengembangan kawasan Agropolitan adalah terlaksanakannya ataupun terciptanya Kawasan Agropolitan di Kabupaten Serang. Sebagaimana dikatakan oleh I1-1

“Ya memang pengembangan kawasan Agropolitan ini masih terkendala oleh SK Pokja yang belum tersusun kan tetapi kami memakai perda no 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Serang karena semua tertuang di dalamnya. Terlepas dari itu kita berharap dengan adanya program Agropolitan ini dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, akan sangat membantu petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka itu khusus nya dan umumnya adalah meningkatkan ekonomi Kabupaten Serang dengan basis pertanian.”(wawancara di Kantor bappeda Kabupaten Serang, pukul 10:15 WIB)

Sedangkan menurut kepala bagian pertanian Bappeda Kabupaten Serang I1-2 mengatakan bahwa aspek penilaian ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah:

“Tujuan dari kebijakan kawasan Agropolitan ini kami mengharapkan agar para petani yang ada di Kecamatan Baros taraf hidup mereka agar dapat meningkat, diantaranya mulai dari kebutuhan dasar mereka dan menjual hasil tani mereka itu dapat terintergrasikan ke satu tempat yang bias menampung dan menjual hasil tani mereka. Setelah program ini dapat berjalan secara baik mereka lebih maksimal dalam bertani dan memiliki kehidupan yang layak, mengenai sk pokja ini kan menyusul oleh karena itu kami akan terus mempebaiki dan mereview program ini”.(Wawancara di Kantor Bappeda Kabupaten Serang, pukul 09:30 WIB)

Dari kedua pernyataan di atas, program pengembangan kawasan Agropolitan memiliki tujuan agar masyarakat petani ini memiliki kehidupan yang layak dan sejatera dengan akan tetapi memang terganjal oleh belum terpenuhinya dokumen syarat administratif yang menjadikan belum berjalannya secara maksimal program ini.

Sementara menurut I1-3 mengatakan hal yang serupa, bahwa tujuan dari pengembangan kawasan Agropolitan ini memiliki tujuan yang baik akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara baik, dengan mengatakan berikut:

“Jadi begini, program Agropolitan ini memiliki tujuan yang sangat baik, akan tetapi hingga saat ini program ini belum berjalan dengan maksimal , hal ini terjadi dikarenakan

program ini belum kuat dalam segi administratif memang ruang wilayah Kecamatan Baros adalah wilayah pertanian dan perkebunan akan tetapi dalam pelaksanaannya itu urusan dinas terkait dalam level pelaksana. ”.(wawancara di Kantor Dinas Tata Ruang pukul 14:20WIB)

Analisis peneliti dari pernyataan I1-3 di atas memang begitu adanya yang terjadi di lokasi penelitian bahwa program ini memang belum berjalan secara baik walaupun pengulirannya sudah lama dari tahun 2011. Hal ini yang membuat peneliti merasa janggal dengan program ini, sudah lama diterapkan akan tetapi tingkat keberhasilannya ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh petani dan pemerintah daerah Kabupaten Serang.

Selanjutnya pertanyaan diungkapkan oleh I2-1 mengenai ukuran dan tujuan kebijakan program pengembangan Agropolitan yaitu:

“Jadi begini Agropolitan itu kan kota pertanian, kalo Dinas Pertanian untuk kegiatan Agropolitan lebih banyak dalam hal penyuluhan terhadap petani. Nanti para petani diberikan pemahaman terkait cara bertani dengan model Agropolitan dan tentunya akan diberikan alat penunjang dalam bertani tersebut. Kita beri mereka bibit, dan alat seperti Traktor dan mesin pompa air.”(Wawancara Kantor Dinas Pertanian pukul 10:20 WIB)

Selanjutnya pernyataan serupa diungkapkan oleh I2-2 yang mengatakan bahwa program pengembangan kawasan Agropolitan merupakan yaitu:

“ program Agropolitan ini memang ditujukan kepada masyarakat petani. Jadi nantinya petani akan dibekali

pengetahuan dan system kerja dari Agropolitan ini. kami akan berkoordinasi dengan pihak Upt Pertanian kecamatan dan Ketua kelompok tani agar nantinya apa yang akan kita sampaikan ini dapat dimerngerti oleh msyarakat.” (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian,Pukul 10:40 WIB)

Dari penjelasan dapat kita ketahui bawasanya program Agropolitan ini memang ditujukan untuk masyarakat petani yang ada di Kecamatan Baros. Hal ini menjadi hal yang sangat menarik ketika pemerintah kabupaten menfokuskan program ini kepada masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak kendala. Adapun yang diungkapkan I1-1 mengenai kendala yaitu:

“ Ya memang pengembangan kawasan Agropolitan ini masih terkendalan oleh SK Pokja yang belum tersusun. Hal ini mendajadi kegagalan yang yang paling utama menurut saya karena apabila belum ada dokumen ini nantinya akan terjadi kebingungan dan dalam action itu tidak dapat maksimal, apalagi ka nada beberapa SKPD yang menjalankan program ini”.

Pernyataan senada pun di ungkapkan oleh I2-1 sebagai berikut:

“Kalau kendala untuk saat ini kalau menurut saya itu belum fokus dan belum mempunyai misi yang sama semua SKPD yang terkait dalam melaksanakan program pengembangan kawasan Agropolitan ini. banyak berangapan bahwa Agropolitan ini punya Dinas Pertanian, jadi SKPD yang lain kurang memiliki program itu. Perlu pemahaman dan membuka wawasan bahwa Agropolitan ini bukan punya Dinas Pertanian saja ada beberapa dinas yang terkait dalam pengembangan program ini seperti Dinas Pekerjaan Umum misalnya jadi begitu”.(Wawancara Kantor Dinas Pertanian Pukul 11:00 WIB)

Jadi sudah sangat terlihat bahwa memang program Agropolitan ini masih banyak kendala yang masih harus diselesaikan. Kemudian peneliti mengkonfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum kemudian pernyataan yang diungkapkan oleh I2-3 menyatakan sebagai berikut:

“Kendalanya saya pikir memang sangat kurang sekali koordinasi terkait program ini. Kami kurang mendapatkan informasi yang jelas kapan bisa melakukan pekerjaan Irigasi atau lainnya dalam kaitannya mendukung Agropolitan ini. Kurang adanya sinergi dalam melaksanakan program ini mungkin butuh waktu”. (Wawancara Kantor Dinas PU Pukul 11:00 WIB)

Sudah sangat terlihat bahwa permasalahannya yang terjadi dalam pengembangan program Agropolitan ini terkait koordinasi yang belum terjalin dengan baik. Pengembangan kawasan Agropolitan ini tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian saja akan tetapi memerlukan bantuan dari pihak yang lain untuk bisa menjalankan ataupun mewujudkan kawasan Agropolitan. Kemudian pernyataan yang diungkapkan oleh I2-7 dari pihak Kecamatan Baros yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalo dari pihak Kecamatan amat sangat sangat mendukung dengan diadakannya program pengembangan kawasan Agropolitan ini, tujuannya juga sangat jelas untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan umumnya masyarakat Kabupaten Serang, akan tetapi dalam pelaksanaannya dari pihak dinas pertanian sendiri kurang melakukan monitoring ataupun turun langsung mensosialisasikan maksud dan tujuan program kebijakan ini sehingga menyebabkan kebingungan dan kurang koordinasi”. (wawancara di Kantor upt pertanian Kecamatan Baros, pukul 09:00)

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menganalisis ukuran dan tujuan kebijakan program pengembangan kawasan Agropolitan ini jika dilihat dari tujuannya memang memiliki manfaat yang baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat petani. Akan tetapi yang terjadi adalah program ini belum dapat berjalan sehingga keadaan masyarakatnya belum mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut, hal ini dapat dikatakan bahwa program ini sangat baik akan tetapi pelaksanaannya tidak. Ukuran dan tujuan kebijakan ini harus dipahami oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang, bukan hanya Dinas Pertanian saja melainkan dukungan dan pemahaman mengenai program Agropolitan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Agropolitan ini. Hal ini ditujukan agar kegagalan yang terjadi di Kecamatan Waringin Kurung tidak terulang lagi di Kecamatan Baros.

2. Sumberdaya

Keberhasilan dari proses Implementasi kebijakan ini sangat tergantung dari kemampuan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang terlaksakannya kebijakan tersebut. Ada banyak sumberdaya yaitu sumberdaya manusia, material, mesin, keuangan, informasi dan waktu, akan tetapi yang diungkapkan Van Mater Van

Horn terkait dalam pelaksanaan yaitu sumberdaya manusia, waktu, dan finansial. Akan tetapi sumberdaya ini tidak serta merta hanya sumberdaya manusia saja. Sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya waktu.

Dilihat dari aspek sumberdaya manusia peneliti menanyakan mengenai kemampuan sumberdaya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bappeda Kabupaten Serang khususnya bidang ekonomi I1-1 selaku kepala bidang ekonomi mengatakan sebagai berikut:

“Kalau sumberdaya manusia di Bappeda yang menangani program Agropolitan ini saya rasa mampu, mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya”.(wawancara di Kantor Bappeda Kabupaten Serang,pukul 13:30WIB)

Sumberdaya manusia memang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan suatu program karena mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dibutuhkan sumberdaya manusia yang sangat berkopentent. Sama halnya dengan pernyataan yang diungkapkan oleh I2-1 bahwa sumberdaya manusia di Dinas Pertanian Kabupaten Serang memiliki kemampuan dalam penangani Program pengembangan Kawasan Agropolitan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Sejauh ini kita dalam menangani program Agropolitan ini saling mendukung satu sama lain agar program ini dapat

berjalan dengan baik dan tepat sasaran, adapun kendala yaitu sumberdaya manusia di sini masih kurang belum lagi kita melakukan monitoring dan pendampingan soalnya jarak yang lumayan jauh. Yang jelas kami kekurangan sumberdaya manusia dalam menjalankan program ini.” (wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang,pukul 08:20 WIB)

Jika dilihat dari pernyataan I2-1 yang mengatakan kurang sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Serang,untuk melakukan monitoring maka sumberdaya yang seharusnya berjumlah berapa orang untuk mengefektifkan dalam hal ini. Adapun penjelasan menurut I2-1 yaitu:

“Jika melihat jumlah sumberdaya yang ada di Dinas Pertanian yang menangani program Agropolitan ini memang masih kurang. Jika yang menangani program ini 5 orang mungkin akan lebih baik dan efektif dalam melakukan pendampingan dan penjelasan mengenai program Agropolitan ini di Kecamatan Baros”.(wawancara Di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Pukul 09:00)

Menurut pernyataan I2-1 kepala Dinas Pertanian, bahwa jika yang menangani program Agropolitan ini 5 orang maka dianggap sangat efektif dalam pelaksanaan monitoring di Kecamatan Baros. Sementara pernyataan kepala seksi tanaman pangan I2-2 menyatakan hal yang sama bahwa kurangnya sumberdaya manusia di di Dinas Pertanian Kabupaten Serang, dengan pertanyaan:

“Memang pegawai kita masing kurang, apalagi seksi tanaman pangan ini hanya memiliki tujuh pegawai Padahal itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan program Agropolitan ini”.(wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, pukul 08:00 WIB)

Pernyataan itu dibuktikan pada saat peneliti menanyakan mengenai pelaksanaan pendampingan dan penjelasan kepada staff seksi tanaman pangan bahwa memang kita sudah melakukan semaksimal mungkin akan tetapi memang jumlah kita yang kurang jadi kurang bisa menangani semua pekerjaan.

Adapun sumberdaya manusia yaitu pendamping lapangan program pengembangan kawasan Agropolitan ini memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya hal ini dinyatakan oleh I2-2 selaku kepala seksi tanaman pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang, dengan mengatakan:

“Pendamping lapangan yang ada merupakan pendamping yang sangat kompeten dapat berkomunikasi dengan lancar yang selalu turun kelapangan untuk menyapaikan dan mengajarkan serta menjelaskan dari cara mekanisme dari konsep Agropolitan”.(wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang,pukul 09:00 WIB)

Pendamping lapangan untuk Program Pengembangan Kawasan Agropolitan menurut kepala Dinas Pertanian dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akan tetapi pernyataan berbeda diungkapkan oleh I2-6 selaku kepala kelompok petani desa Baros ketika peneliti menanyakan pendampingan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, dengan mengatakan sebagai berikut:

“Ada, tapi itu jarang banget ke sini Cuma ada beberapa kali pas memberikan bantuan bibit pohon dan alat untuk untuk membajak sawah itu, selebih nya belum pernah kesini dan tidak menjelaskan program Agropolitan itu, kami saja masih belum paham dengan program itu”. (wawancara di Balai Desa Baros, pukul 10:00 WIB)

Pernyataan kepala kelompok tani Desa Baros itu menunjukkan bahwa pendamping lapangan belum melakukan tugas pokok dan fungsinya secara baik walaupun mereka mempunyai kemampuan yang baik dalam melakukan pendampingan lapangan.

Sumberdaya waktu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala Dinas Pertanian terkait apakah waktu dalam pelaksanaan ini berbenturan dengan kebijakan lain atau waktu dalam pelaksanaan kebijakan ini masing kurang. Hal ini diungkapkan oleh I2-1 selaku kepala Bidang tanaman pangan Dinas pertanian karena memang bagian Tanaman Pangan ini yang menangani Program Agropolitan. Adapun pernyataanya sebagai berikut:

“Kalo mengenai rentang waktu dalam pelaksanaan program ini sebanarnya cukup, program ini dimulai dari 2011 belm lagi kan memang program ini merupakan lanjutan dari Agropolitan yang ada di Waringin kurung, ya memang saya katakana berulang-ulang memang semua SKPD ini belum punya misi yang sama dalam menjalankan program ini.”.(wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang Pukul 10:00 WIB)

Pernyataan itu juga di pertegas oleh I2-6 selaku Kepala Bagian Upt Pekerjaan Umum, mengatakan hal yang berbrda terkait rentang waktu dalam melaksanakan program ini. sebagai berikut :

“Kalau Menurut saya rentang waktu ini sangat kurang kalau kita berbicara tugas Dinas PU yang tugasnya sebagai penyedia sarana dan prasarana yang sesuai dengan rencana tapak Agropolitan itu, sekarang program ini dapat dikatakan baru berjalan selama 2 tahun jadi yang kalo 2015 target nya sudah selesai semua sarana dan prasarana jelas kurang waktu nya”.(wawancara di Kantor DINas Pekerjaan Umum pukul 10:30 WIB)

Hal yang berbeda lagi ketika peneliti menanyakan ke I2-1 Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata terkait waktu target pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Agropolitan ini, sebagai berikut

“Sebenarnya target yang direncanakan ini sudah cukup realistis dan cukup untuk mengimplementasikan program ini,hanya saja memang harus dilakukan dengan baik”.(Wawancara di Kantor Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang pukul 10:00WIB)

Sumberdaya financial yang tidak kalah penting dengan aspek sumberdaya yang lainnya, karena memang apabila sumberdaya manusia dan waktu sudah tercukupi akan tetapi sumberdaya finansial tidak dapat terpenuhi maka memang sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sumberdaya finansial menurut pak Zaldi yaitu I2-1 menyatakan bahwa

“ Sebenarnya dana yang sudah masuk untuk program Agropolitan ini sudah banyak yaitu menyentuh 6 Miliar yang dikucurkan oleh pemerintah daerah ini termasuk Agropolitan yang di Waringin Kurung”.(Wawancara di Kantor Dinas Pertanian)

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas, maka sudah jelas terlihat mengenai aspek sumberdaya di pemerintahan daerah Kabupaten dan Dinas-Dinas terkait pelaksana program pengembangan kawasan Agropolitan ini dirasa sudah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Akan tetapi itu dari segi kemampuan saja untuk pelaksanaannya petugas lapangan seperti pendamping lapangan dan monitoring ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan kemudian jumlah petugas yang kurang ini menjadi kendala dari instansi pelaksana program Agropolitan ini.

Kurangnya sumberdaya ini juga dikeluhkan oleh kepala seksi tanaman pangan beserta staffnya dalam menangani program Pengembangan kawasan Agropolitan ini walaupun mereka sudah bekerja secara maksimal. Terkait petugas penyuluh lapangan ataupun pendamping yang ada di Kecamatan Baros yang kurang melakukan penyuluhan dan monitoring ke lapangan ini juga menjadi kendala terlaksananya program kebijakan ini menjadi baik.

Dalam sumberdaya waktu ini memang ada beberapa pernyataan yang berbeda dalam menialai tetang rentang waktu ataupun target dari pelaksanaan program pengembangan Kawasan Agropolitan ini. Dinas Pertanian menilai sudah cukup waktu target

yang di tetapkan begitu juga dengan Dinas Pariwisata akan tetapi pernyataan berbeda ketika di ungkapkan dari Dinas Pekerjaan Umum yang bergerak di bidang penyedia sarana dan prasarana lebih tepatnya dalam pengerjaannya.

Sumberdaya finansial apabila memang diukur dengan pelaksanaan program memang belum sesuai dengan besaran uang yang sudah dikeluarkan. Memang rencana Tapak dari Agropolitan ini cukup banyak ini berbentuk pasar, bangunan-bangunan gudang parkir serta kios-kios tempat untuk berjualan. Seharusnya mengenai waktu ini harus disesuaikan dengan semua pihak dalam pelaksanaan program ini, jadi akan tidak ada permasalahan bahwa waktu ini antara pihak yang satu dengan yang lainnya ini berbeda.

3. Karakteristik Agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal, yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik ini. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik yang keras ketat pada aturan yang berlaku.

Karakteristik agen pelaksana Program pengembangan kawasan Agropolitan merupakan program Pemerintah Kabupaten Serang yang wilayah implementasinya itu mencakup satu kecamatan baros yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi tersebut program pengembangan kawasan Agropolitan melibatkan banyak agen pelaksana banik organisasi formal dan informal, seperti pemerintah, dan masyarakat. Dalam mengimplementasikan program kebijakan ini pelaksana tersebut memiliki peran masing-masing yang sesuai dengan karakter organisasinya, seperti yang diungkapkan oleh I1-1 sebagai berikut:

“Bappeda sebagai Agen pelaksana sekaligus sebagai perencana terselenggaranya Program Agropolitan ini, bekerjasama dan mengkoordinasika instansi-instansi pelaksana serta mengajak masyarakat untuk dapat mewujudkan program yang sangat baik ini, dan apabila ada kendala-kendala agar segera diselesaikan demi terwujudkannya kawasan Agropolitan yang terpadu”.(wawancara di Kantor Bappeda Kabupaten Serang pukul 11:00 WIB)

Serupa halnya yang dikatakan oleh I2-1 selaku kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang mengatakan sebagai berikut:

“Pihak kami selaku Dinas Pertanian selalu bekerjasama dengan semua dinas terkait dalam pelaksanaan program Agropolitan ini seperti Dinas PU, Pariwisata, dan Camat aparaturnya desa dan kelompok tani yang berada di Kecamatan Baros, semua kami ajak untuk mewujudkan kawasan Agropolitan secara efektif, kami selaku Dinas Pertanian yang menjadi pelaksana utama dari program ini kan bekerja semaksimal mungkin dan bertanggung jawab”.(wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang pukul 13:00 WIB)

Pihak Dinas Pertanian mengikutsertakan masyarakat dan paratur desa dan kecamatan setempat untuk bahu membahu dan bekerja sama dalam mewujudkan terselenggaranya program pengembangan kawasan Agropolitan ini. hal ini juga dibenarkan oleh I 2-3 sebagai berikut:

“kami pihak Dinas Pekerjaan umum juga ikut serta mengimplementasikannya program Agropolitan ini dengan bergerak di pembangunan sarana dan prasarana, semua tender pengerjaan sarana dan prasarana terkait pengadaan untuk Agropolitan ini kami kerjakan secara maksimal, akan tetapi yang masuk ke kami baru bsatu yaitu pengerjaan jaringan irigasi”.(wawancara di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang pukul 09:30WIB)

Hal serupa juga diungkapkan oleh I2-7 selaku Sekretaris camat Baros beliau mengatakan:

“Kami selaku pihak kecamatan sangat mendukung dengan program kebijakan ini, apalagi kalau dilihat manfaat dan tujuan yang sangat baik bagi mayarakat petani di kecamatan Baros, akan tetapi pihak kecamatan kurang dilibatkan oleh Dinas Pertanian hanya ada pemberitahuan saja kalau di Kecamatan Baros itu di jadikan kawasan pengembangan Agropolitan, tapi terlepas oleh itu kami sangat mendukung akan program itu”.(wawancara Kantor camat Baros pukul 10:00 WIB)

Mengacu pada hasil wawancara dan temuan lapangan di atas maka peneliti menganalisis bahwa program pengembangan kawasan Agropolitan sudah dilaksanakan oleh agen pelaksana walaupun tingkat keberhasilannya yang kecil. Agen pelaksana tersebut

mempunyai peranan masing-masing, dari lembaga formal dan dan informal.

4. Sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana

sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan ini bukanlah berasal dari formulasi masyarakat setempat yang mengenai betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Akan tetapi kebijakan ini diambil secara *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan yang sebenarnya masyarakat.

Program Pengembangan kawasan Agropolitan merupakan program yang menggunakan pendekatan *top down* , artinya program ini tersebut dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Serang. Keberhasilan program tersebut diraih apabila mendapatkan dukungan penuh serta persetujuan para *stakeholder* yang terlibat dalam hal ini para agen pelaksana, salah satunya adalah I2-1 yang mengatakan bahwa:

“Saya pribadi sangat mendukung dengan adanya program ini, karena masyarakat petani dapat meningkatkan hasil panen mereka dengan metode-metode yang baru serta mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan bertani mereka”(wawancara di Kantor Dinas Pertanian pukul 11:00)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh I2-3 yang memberikan dukungan sebagai berikut:

“Kami selaku pihak dari Dinas Pekerjaan Umum sangat senang dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan ini yang mana banyak pihak yang terlibat di dalamnya, karena masyarakat khusus ya Baros dan kabupaten Serang umumnya dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan menjadikan sector pertanian sebagai salah satu roda penggerak perekonomian.”.(wawancara di Kantor Dinas Pekerjaan umum,pukul 10:00WIB)

Dukungan positif juga dinyatakan oleh I3-1 yang mengatakan sebagai berikut:

“Kami selaku pihak kecamatan Baros sangat senang dan mendukung dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan, karena dengan adanya kebijakan ini masyarakat Baros mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Serang dengan memberdayakan petani yang berada di Baros ini, maka dengan adanya program ini pihak kecamatan Baros pun ikut andil dalam mengawasi program tersebut agar terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang diharapkan”. (wawancara di Kantor Kecamatan Baros, pukul 09:30 WIB)

Dukungan serupa juga dikatakan oleh I2-7 yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya selaku kepala seksi UPT Pertanian Kecamatan Baros sangat mendukung sekali dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan ini, dengan cara mengurus segala hal bentuk bantuan ataupun hal-hal yang terkait program ini yang turun dari Dinas Pertanian”. (wawancara di Kantor Upt pertanian baros, pukul 09:00 WIB).

Dukungan positif juga dikatakan oleh I-2 selaku kepala seksi tanaman pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang mengatakan sebagai berikut:

“Saya selaku kepala seksi tanaman pangan dan sebagai pelaksana program Agropolitan ini ikut langsung mensukseskan program tersebut dan sangat merespon dengan baik agar pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dapat mencapai hasil yang diharapkan”. (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, pukul 10:25WIB)

Dari beberapa hasil wawancara di atas mengenai aspek disposisi (dukungan dan persetujuan) maka peneliti menganalisis, peneliti menilai bahwa beberapa agen pelaksana sepenuhnya mendukung program pengembangan kawasan Agropolitan. Alasannya yakni karena program tersebut dapat membantu masyarakat petani dalam meningkatkan hasil produksinya dan dapat menjadikan Kecamatan Baros menjadi sentra produk pertanian. Jadi dengan adanya dukungan dari semua pihak baik dari agen pelaksana maupun dari luar agen pelaksana diharapkan pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang diharapkan.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam melaksanakan sebuah kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-sesalahan akan sangat kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya. Dari dimensi komunikasi ini, peneliti membagi dalam dua aspek penelitian yaitu koordinasi dan sosialisasi.

Pertama. Koordinasi, dalam aspek koordinasi ini peneliti menanyakan mengenai koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dalam program pengembangan kawasan Agropolitan Baros kepada I1-1 yang mengatakan sebagai berikut:

“Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan ini, kami selalu mengkomunikasikan apabila ada bantuan terkait infrastruktur dan keuangan dan selalu merespon setiap masukan yang terjadi dilapangan terkait pelaksanaan program ini”. (wawancara di Kantor Bappeda kabupaten Serang, pukul 13:30 WIB)

Jadi, Bappeda Kabupaten Serang selalu berkoordinasi dengan Semua Dinas-Dinas yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ini karena memang dinas-dinas itulah yang terjun langsung ke lapangan. Akan tetapi beda halnya ketika peneliti menanyakan terkait koordinasi kepada I2-2 selaku kepala Dinas Pertanian, Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kami dari pihak Dinas Pertanian yang menjadi pioneer pelaksanaan Program ini merasakan koordinasi yang kurang baik, contoh nya kami dengan dinas Pekerjaan Umum saja kita tidak tau ketika mereka membangun kios-kios yang berdiri di tempat yang kurang strategis, seharusnya pembuatan itu atas rekomendasi dari kami pihak dinas Pertanian, begitu juga dinas yang lain pun sama jadi koordinasi antar SKPD ini sangat kurang baik”.(wawancara Di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, pukul 10:00 WIB)

Ungkapan dari I2-1 di atas merupakan hal yang nyata dirasakan dalam hal koordinasi di program kebijakan ini, karena hal yang sama dikatakan oleh I2-2 selaku kepala seksi tanaman pangan Dinas Pertanian, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Koordinasi secara vertikal dan secara horizontal itu yang harus dijaga dan dielihara secara baik, kalau melihat kondisi sekarang kami selalu mengalami sedikit kebingungan dalam melaksanakan program ini, kami di tuntut untuk mewujudkan kawasan Agropolitan ini sementara dari atas kurang jelas koordinasinya begitu juga antar dinas-dinas yang menangani juga jalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program ini”. (wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, pukul 11:00 WIB)

Hal serupa juga diungkapkan oleh I3-1 selaku Camat Kecamatan Baros, yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya pun tidak tau menau soal Pengembangan Program Agropolitan ini hanya saja saya pernah dengan bawasanya di Kecamatan Baros ini digulirkan program Agropolitan seperti itu, pada tahun 2011 lalu ada penelitian dari Dinas Pertanian mengenai Agropolitan tetapi setelah itu tidak ada kabar yang jelas mengenai program ini, tidak ada koordinasi dari Dinas Pertanian secara jelas kepada kami” (Wawancara di kantor Kecamatan Baros, pukul 09:00 WIB)

Menyangkut koordinasi yang buruk ini juga dikeluhkan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi program pengembangan kawasan Agropolitan ini. seperti di katakana oleh I2-4 Selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

“Saya juga merakan kalau tingkat koordinasi yang terjalin antar dinas-dinas ini kurang begitu baik, hal ini disebabkan karena ketidak jelasan kebijakan ini saya rasa, sehingga menyebabkan koordinasi yang kurang dalam mewujudkan kawasan Agropolitan ini”. (Wawancara di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang, pukul 10:00 WIB)

Jika melihat dari pernyataan dari I2-3 yang mengatakan bahwa tingkat koordinasi yang kurang disebabkan oleh kurang sempurnanya program kebijakan ini juga dibenarkan oleh I2-6 selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Serang yang mengatakan sebagai berikut:

“Dinas Pariwisata belum menerima limpahan dari Bappeda atau pun Dinas pertanian terkait pengembangan Kawasan Agropolitan yang katanya mau dibuat juga untuk sektor pariwisata dengan komoditas pertanian sebagai obyek wisata, hanya kita diundang ketika penyusunan program ini kalau Agropolitan ini akan dijadikan obyek wisata,akan tetapi setelah itu belum ada pemberitahuan terkait program itu”.(Wawancara di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Serang,pukul 09:00 WIB)

Berdasarkan temuan lapangan bahwa dinas pertanian tidak mengetahui terkait pembangunan kios-kios yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum yang ditujukan untuk mendukung pengembangan

kawasan Agropolitan. Hal itu diungkapkan oleh kepala seksi tanaman pangan yang menangani langsung pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan ini. banyak pihak-pihak yang menangani ini tidak tau ataupun tidak ada kejelasan tugas pokok dan fungsinya dan harus berbuat apa.

Kedua, sosialisasi. Aspek sosialisasi merupakan bagian dari komunikasi yang bertujuan untuk menjelaskan isi program kepada agen pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan hal ini dimaksudkan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti dan diimplementasikan. Untuk mengetahui perihal sosialisasi ke tingkat desa-desa dan warga di Kecamatan Baros peneliti menanyakan kepada I2-1 yang mengatakan bahwa sosialisasi program Pengembangan kawasan Agrpolitan, sebagai berikut:

“sosialisasi dulu pernah kita lakukan terkait program ini, tapi memang masih kurang sehingga masyarakat disana itu belum banyak yang tau mengenai program ini kemungkinan hanya kelompok tani saja yang tau mengenai program ini itu pun cuman hanya tau dapat bantuan dari dinas pertanian begitu”(Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang,Pukul 10:30 WIB)

Pernyataan serupa juga di ungkapkan I2-4 yang mengatakan bahwa sosialisasi program Pengembangan kawasan Agropolitan ini lemah :

“Memang saya akui sosialisasi program ini sangat lemah bahkan kalo kamu ke Kecamatan Baros tanya ke warga

mengenai Agropolitan saya yakin mereka tidak tau, saya yakin itu karena apa ya memang sosialisasi yang lemah ini menyebabkan keadaan seperti itu terjadi SKPD terkait saya liat belum begitu gereget/dominan lah mereka artinya belum dominan itu masih fokus ke hal-hal yang kelihatannya menurut mereka lebih penting, karena kalo sudah ada greget biasanya mereka sudah mulai gitu, artinya mulai itu begini, katakanlah Agropolitan ini kalo sesuai kajian sudah mulai harus di dukung sepenuhnya gitu ya, peran dinas tata kota misalnya, dinas tata kota tuh kan mengenai PJU misalnya, nah di kawasan sana tuh sudah mulau dihidupkan. Jadi ada sinergi antara SKPD dan ini keliatanya masih belum, mungkin memerlukan waktu ya. Jadi ini peran leading sangat penting menurut saya.”. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, pukul 10:00WIB)

Pernyataan Camat Kecamatan Baros yang mengatakan hal sebagai berikut:

“saya belum pernah menerima informasi terkait program Agropolitan ini dengan bentuk sosialisasi dari pihak manapun, akan tetapi kalo informasi di Kecamatan Baros ini adanya program pengembangan kawasan Agropolitan saya mengetahui akan tetapi kalo sosialisasi yang menjelaskan detail program ini belum pernah”.(wawancara di Kantor Kecamatan Baros, pukul 08:30 WIB)

Pernyataan serupa juga diungkapkan I2-7 selaku masyarakat petani di Desa Baros yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau apa itu Agropolitan yang saya tau kami mendapat bantuan bibit-bibit pohon setelah itu kami mendapatkan bantuan pompa air kata orang Kecamatan itu bantuan karena di kecamatan Baros dijadikan kawasan Agropolitan begitu, tetapi Agropolitan yang seperti apa tidak tahu”. (Wawancara di Desa Baros pukul 10:30 WIB)

Hal yang sama ketika peneliti menanyakan ke I3-3 selaku kepala Desa Penyirapan yang mengatakan:

“Agropolitan itu seperti apa tidak terlalu paham saya karena sosialisasi ataupun pemberitahuan dari Dinas Pertanian tidak ada begitu, jadi saya pun ketika adek tanya saya tidak tau harus menjawab apa, saya cuma bisa jawab kalo warga sini pernah mendapat bantuan dan itu dari program Agropolitan begitu tapi selebihnya kami tidak tau, kurang paham mengenai program ini”. (wawancara di Desa Penyirapan Baros, pukul 09:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai koordinasi antar organisasi, peneliti menilai bahwa tingkat koordinasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Serang belum terjalin dengan baik dan belum mengkomunikasikan dengan maksimal. Hal ini terlihat dengan bukti-bukti di lapangan yang menunjukkan tingkat koordinasi yang buruk dan dikeluhkan semua pihak-pihak yang menangani program ini.

Kemudian tingkat sosialisasi yang sama buruk nya terjadi dibagian sosialisasi program ini. masyarakat yang menjadi target kebijakan ini pun tidak mengetahui kalau ada program Agropolitan ini. bagaimana mau menunjukkan keberhasilan kalau sosialisasi semacam ini terus berlarut-larut tidak kunjung diperbaiki oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait telaksananya program ini. sosialisasi yang baik harus menjadi pioneer utama dalam menjalankan

sebuah kebijakan agar mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dan sesuai yang diharapkan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja pelaksanaan kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Matter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik tersebut yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena upaya untuk melaksanakan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Pernyataan itu diungkapkan oleh I3-1 sebagai berikut:

“Masyarakat yang berada di wilayah masing-masing, seperti kelompok PKK, tokoh masyarakat, karangtaruna dan kelompok-kelompok yang aktif di kelurahan, amat sangat mendukung dengan adanya program Agropolitan ini. Jadi, saya rasa implementasi program ini sangat di dukung oleh berbagai pihak, dan tujuannya pun jelas bahwa program ini membantu masyarakat petani guna meningkatkan kesejahteraan mereka”. (wawancara di Kantor Kecamatan Baros, pukul 13.00 WIB).

Dari aspek penilaian mengenai dukungan lingkungan eksternal tersebut, menurut I3-2 adalah:

“Saya rasa masyarakat dengan RT/RW mendukung sekali. Dan merespon baik dengan adanya program ini, dan mudah-mudahan sampai seterusnya masyarakat yang tahu keberadaan program ini akan selalu mendukung dan ikut mensukseskan”. (wawancara di Desa Sidangmukti Kecamatan Baros, pukul 09.30 WIB).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh I3-3 yang mengatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya bantuan semacam ini kami selaku pihak yang tidak terlibat secara langsung dan hanya ikut mengawasi saja dalam program pengembangan kawasan Agropolitan amat sangat merespon positif tentang adanya bantuan untuk para petani apalagi program tersebut berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Serang dan dana yang dipakai berasal dari APBD ”.(wawancara di Kantor Kecamatan Baros Kota Serang, pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak eksternal sebetulnya mendukung adanya program pengembangan kawasan Agropolitan langsung dari Pemerintah Kabupaten untuk masyarakat petani maka dengan adanya respon yang sangat positif dari lingkungan eksternal ini diharapkan program ini dapat berjalan dengan kondusif efektif dan sesuai yang diharapkan.

Maka dengan ini peneliti berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait meningkatkan keseriusanya dalam melajankan program ini, telah di uraikan diatas bahwa semua pihak mendukung untuk mesukseskan program ini, akan tetapi dari pihak pemerintah

sendiri yang kurang serius dalam mengurus kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Semoga dengan mendapat dukungan dari lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik ini Program pengembangan Kawasan Agropolitan ini bias bertahan dan dapat terwujud dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat petani.

4.4 Pembahasan

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Meter dan Horn (1975) dalam buku Agustino (2008:141) mengenai Dasar-dasar Kebijakan Publik.

Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui beberapa dimensi penilaian, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana, komunikasi antar organisasi serta lingkungan eksternal. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan mengenai pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros, yakni sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan diketahui bahwa ukuran dan tujuan program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros

sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh Dinas Pertanian selaku pelaksana teknis, serta oleh penyuluh lapangan selaku yang memonitoring pendataan dan berkewajiban untuk mendampingi petani dalam menjalankan program atau pun bertani dengan konsep Agropolitan. Maka, hasil temuan peneliti dari hasil wawancara yang ditemukan bahwa para agen pelaksana yaitu Dinas Pertanian dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros berharap dengan adanya program tersebut bisa membantu masyarakat petani yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Para agen pelaksana tersebut sangat merespon positif dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros. Dinas Pertanian Kabupaten Serang yang melaksanakan program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros khususnya di Kabupaten Serang sendiri dalam melakukan peningkatan hasil produksi pertanian serta meningkatkan kualitas melalui konsep Agropolitan ini, karena pengembangan kawasan Agropolitan ini sepenuhnya memanfaatkan potensi lokal serta mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal. Akan tetapi yang terjadi sekarang dilapangan adalah masyarakat belum mendapatkan manfaat yang baik dari berjalannya program ini jadi program ini sekarang tidak dapat dikatakan bagus apabila belum dapat berjalan dengan baik dan berdampak terhadap masyarakat. Akan tetapi Dinas Pertanian sedang mengembangkan sub-sistem Agribisnis hulu prasarana dan sarana yang disediakan berupa kios-kios sarana produksi gudang, tempat bongkar

muat semua itu kan segera di bangun dan di realisasiakan. Hal ini akan sebagai pendukung sub-sistem usaha tani, pengolahan hasil dan system pemasaran.

Dampak dari pengembangan Agropolitan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan produktivitas lahan di kawasan Agropolitan ini minimal 5% harapan pemerintah daerah. Hal itu terganjal dari kurang lengkapnya dokumen administrasi yang mengakibatkan pelaksanaan dari program ini kurang maksimal. Itu diakui oleh Bappeda pak Dahlan mengatakan bahwa pelaksanaan program ini harus dilakukan review ulang dan mendata ulang apakah hal yang menyebabkan tidak maksimalnya program ini selain belum adanya SK Pokja terkait Agropolitan Baros ini masih banyak kendala yang menyebabkan kegagalan program ini.

Selain itu juga dalam penemuan peneliti, peneliti menemukan bahwa bantuan yang diberikan dari pemerintah daerah itu belum dipergunakan secara maksimal, hal ini terjadi karena memang tidak ada petunjuk yang jelas ke petani bagaimana dan untuk apa bibit itu sendiri. Bahkan bibit itu hanya di tanam di halamn rumah atau pekarangan rumah karena bibit yang diberikan bias ditanam di pekarangan rumah masyarakat itu. Itu pun juga bantuan tidak semua kelompok tani menerima semuanya hanya beberapa kelompok tani yang berda di Desa Baros saja dengan jumlah yang terbatas. Menurut pengakuan masyarakat yang menerima bantuan ketika diberi bantuan ini jumlahnya kurang kalau ditanam di lahan yang luas, dan mereka pun tidak

mempunyai lahan perkebunan. Dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros secara standar dan tujuan program ini dalam pelaksanaannya sudah baik dan untuk kejelasan sudah baik.

Hal ini terlihat bahwa agen pelaksana dalam program ini sudah mengetahui semua baik dari segi tujuan dan standarnya itu terlihat dengan adanya penelitian terkait kondisi tanah dan pemindahan Agropolitan yang semula diterapkan di Kecamatan Waringingkurung ke Kecamatan Baros hal ini menjadikan bukti bahwa memang program Agropolitan ini memang sudah dipahami tujuan dan standar untuk pertanian dan efek di dunia pertanian sangat bagus oleh karena itu dinas pertanian pada tahun 2011 berkerjasama dengan peneliti dari Institut Pertanian Bogor mengkaji kondisi tanah yang ada di Kecamatan Baros untuk uji kelayakan untuk dijadikan kawasan Agropolitan serta pada tahun 2012 dibuatlah desain ekonomi engineering (DED).

Program Agropolitan merupakan program yang sangat realistis dibutuhkan di Kecamatan Baros yang memiliki letak geografis yang cocok dan kondisi tanah yang mendukung serta sumberdaya manusia yang memadai yaitu dengan banyaknya masyarakat yang bertani. Program ini sangat realistis ditinjau dari sudut manapun, hal ini terlihat dengan tindakan dari Bappeda yang memindahkan Program Agropolitan ke Baros dengan maksud dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan adanya dukungan baik dari sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya. Melihat kondisi geografis Kecamatan Baros seharusnya dapat menjadikan Agropolitan ini menjadi

pengerak utama serta penyuplai kebutuhan pertanian di Kabupaten Serang melihat betapa strategis dan realistisnya program ini apabila dijalankan secara terpadu di Kecamatan Baros. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah program tersebut belum dapat berjalan dengan sebagaimana fungsinya karena masyarakat petani belum merasakan tujuan dan ukuran kebijakan ini, yang terjadi di sana adalah kondisi masyarakat petani belum mendapatkan manfaat dari kebijakan ini sehingga kebijakan ini hanya bagus secara tujuan saja akan tetapi apabila dilihat dari pelaksanaannya masih belum berdampak positif bagi masyarakat petani Kecamatan Baros.

Mengacu pada beberapa penjelasan atas, maka dimensi ukuran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Agropolitan sudah cukup jelas dan bisa dipahami oleh para agen pelaksana. Untuk dimensi standar dan tujuan kebijakan program Pengembangan Kawasan Agropolitan sudah cukup terukur dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terlibat langsung di dalamnya.

2.Sumberdaya

Sumber daya manusia adalah faktor pertama dan utama dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan Agropolitan, karena manusia adalah motor penggerak laju implementasi suatu kebijakan. Dalam konteks sumber daya manusia seperti yang sudah dipaparkan dalam hasil penelitian, menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia di Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan umum, Dinas Pariwisata, sudah terbilang cukup

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hanya saja pegawai yang mengurus program pertanian pengembangan kawasan Agropolitan ini masih kurang terutama di Dinas Pertanian, karena Dinas Pertanian yang menjadi pelaksana utama dari program ini. Kemudian sumberdaya manusia masyarakat petani juga belum siap dalam menghadapi program Agropolitan ini hal ini terlihat ketika seorang petani yang tidak mengetahui program Agropolitan itu berjalan hal ini menjadi bukti bahwa sumberdaya manusia ini tidak hanya sebatas sumberdaya pada level pelaksana akan tetapi harus di level masyarakat yang menjadi obyek kebijakan itu. Hal mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan implementasi program Pengembangan Kawasan Agropolitan. Tenaga penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian ini berjumlah 5 orang yang menangani 15 Desa yang ada di Kecamatan Baros dengan ditambah 2 Tenaga penyuluh dari kecamatan ini mengurus 12 Kelompok tani di masing Desa. Sehingga tidak kondusif sehingga tidak semua kelompok tani mendapat tenaga penyuluh lapangan dengan baik. Hal ini juga menurut salah ketua kelompok tani yang mengatakan bahwa pendampingan dan penyuluh itu tidak ada.

Terkait dari hal tersebut kebijakan publik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dalam menunjang keberhasilan program pengembangan kawasan Agropolitan, melainkan dibutuhkan pula sumber daya lainnya yaitu seperti sumber daya waktu. Berdasarkan hasil penelitian, sumberdaya waktu ini dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) ini berbeda-beda dalam mengungkapkan terkait sumberdaya waktu ini. seharusnya Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas sebagai koordinasi dalam bidang pembangunan daerah harus lebih cermat dan teliti ketika memperhitungkan target pencapaian suatu program, apalagi dalam kaitannya ini banyak SKPD yang menjalankannya. Seharusnya semua dinas-dinas terkait ini harus selaras semisi dalam menjalankan program ini sehingga tidak terjadi kekurangan waktu target pencapaian antara yang satu dengan yang lainnya. Program Agropolitan harus didukung dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam secara baik dan terpadu satu sama lainnya, apabila kita melihat uraian di atas terlihat bahwa memang semua pegawai dan pelaksana program ini mendukung penuh dengan adanya program Agropolitan dilihat dari indikator penilaian dukungan sumberdaya dapat dikatakan baik serta kondusif.

Akan tetapi memang menjadi masalah yang sudah membudaya di dalam kondisi birokrasi yang umumnya terjadi, sehingga disetiap dinas itu banyak program yg berjalan kemudian tidak didukung dengan jumlah pegawai dan kemampuan pegawai yang ada di dalamnya sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat maksimal dan baik dikaji dari indikator penilaian juga menunjukkan kekurangan sumberdaya dalam menjalankan program Agropolitan dan ditambah lagi dengan menumpuknya program yang dikerjakan sehingga pelaksanaannya menjadi terhambat dan kurang maksimal. Selain sumberdaya manusia juga sumberdaya waktu artinya disini yaitu rentang waktu yang menjadi target pencapaian suatu program ini juga harus diperhatikan dan dipahami secara bersama karena dalam menentukan waktu

target sasaran ini harus sesuai dengan kenyataan kondisi nyata di lapangan serta semua pihak yang terkait tersepakati.

Banyak kasus ditemukan bahwa menunjukkan bahwa target sasaran waktu ini sering menjadi perdebatan panjang dan menjadikan program tersebut kurang dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian yang terjadi pada pelaksanaan program Agropolitan ini kurang lebih tidak jauh berbeda masing-masing dinas merasakan target yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu agen pelaksana menganggap dengan waktu target yang diberikan itu cukup dan dapat mencapai target, akan tetapi agen pelaksana yang lain merasa dan menilai bahwa memang target yang diberikan ataupun sumberdaya waktu ini masih kurang dan perlu ada kesepakatan ulang terkait sumberdaya waktu.

Sumberdaya finansial perlu sangat diperhitungkan dalam menjalankan suatu program karena memang apabila pelaksanaan program tersebut jika mempunyai sumberdaya yang berkopoten dan sumberdaya waktu yang cukup akan tetapi apabila sumberdaya dana dan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia ataupun pengelolaan dana ini kurang maksimal akan menjadi persoalan yang pelik untuk merealisasikan apa yang dituju oleh kebijakan publik.

Berangkat dari hasil uraian di atas maka dari kedua aspek sumberdaya ini masih belum baik. Aspek sumberdaya manusia memang mendukung dengan baik akan terlaksannya program ini akan tetapi masih banyak permasalahan terkait sumberdaya yang menjadikan program ini belum dapat

berjalan dengan sebagaimana fungsinya. Hal ini terkait sumberdaya waktu yang menjadikan masing-masing dinas terkait secara tidak langsung berbeda pendapat. Seharusnya hal semacam ini tidak terjadi dan tidak dijadikan ganjalan dalam menjalankan suatu program.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros merupakan kebijakan yang diorientasikan untuk membantu masyarakat petani guna meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Oleh karena itu, masyarakat petani tersebut harus dapat diberdayakan agar dapat meningkatkan perekonomian mereka dan daerah. Dari dimensi penilaian mengenai karakteristik agen pelaksana tersebut, berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang ditemukan dapat diketahui bahwa program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian yang menjadi pioner utama dan didukung dan dilibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Pariwisata dan Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang, yang memiliki kekuatan hukum. Lembaga formal tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang disesuaikan dengan kapasitasnya. Agen pelaksana dari lembaga formal tersebut, yakni Dinas Pertanian yang menjadi pioner utama dan didukung dan dilibatkan dinas Pekerjaan Umum, Pariwisata dan Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang dengan memberikan dana bantuan dari dana APBD dan dibantu oleh pendamping lapangan yang berada di Kecamatan Baros.

Sehingga diharapkan implementasi program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros ini bisa berjalan dengan apa yang diinginkan dan mendapatkan respon positif dari lembaga formal maupun dari lembaga informal (Masyarakat, Tokoh Masyarakat, tokoh agama dan lain-lain), sehingga apa yang dihasilkan bisa berdampak positif dan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu khususnya bagi mereka yang mempunyai keluarga yang berkebutuhan khusus.

Mengingat cakupan wilayah implementasi pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros cukup luas dengan diterapkannya di Seluruh desa di Kecamatan Baros, maka program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan melibatkan agen pelaksana yang berasal dari lembaga informal yakni melibatkan masyarakat yang ada disekitar. Sehingga diharapkan penyaluran dana bantuan bisa tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah terkait bisa bekerja sama dengan masyarakat dan perangkat kelurahan yang ada di kelurahan masing-masing. Terkait dengan keaktifan perangkat kelurahan ditemukan ada beberapa kelurahan yang tidak memahami kalau ada program pengembangan kawasan Agropolitan bukan hanya itu saja dua kelurahan tersebut tidak mengetahui kalau ada masyarakatnya yang mendapatkan bantuan program pengembangan kawasan Agropolitan.

Dalam hal ini bahwa Standar Operasional Prosedur SOP (*Standard Operating Procedure*) yang seharusnya melibatkan Aparatur Kelurahan dalam temuan dilapangan Aparatur Kelurahan malah tidak mengetahui kalau ada

program pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Baros, karena dalam SOP pendataan penerimaan dana bantuan melibatkan pihak dari desa/kelurahan setempat. Tidak adanya pemberitahuan dari pelaksana program tentang keberadaan program pengembangan kawasan Agropolitan kepada dua Aparatur Kelurahan karena dinas Pertanian memberikan informasi terkait dengan bantuan langsung menghubungi UPT Pertanian Kecamatan Baros dan langsung ke kelompok tani dan tidak melalui aparatur kelurahan terlebih dahulu. Terkait dengan adanya pihak yang tidak memahami keberadaan pengembangan kawasan Agropolitan.

Karakter agen pelaksana dalam pelaksanaan program Agropolitan ini dijalankan oleh lembaga formal dari pemerintah daerah Kabupaten Serang yaitu Dinas Pertanian sebagai *pioneer* penggerak utama dalam menjalankan program Agropolitan ini. dalam menjalankan tugas terkait pelaksanaan program Agropolitan ini dinas-dinas terkait sudah dapat dikatakan berkarakteristik baik dan memenuhi standar dalam menjalankan program. Akan tetapi dalam prakteknya dilapangan ditemukan agen pelaksana ini kurang bersikap maksimal serta belum melibatkan lembaga informal seperti masyarakat, RT dan RW dalam menjalankan program ini, padahal lembaga informal ini dapat menjadi asset yang berharga dalam menjalankan suatu kebijakan karena memang masyarakat yang memang tinggal disana dan mengetahui betul dengan apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh mereka. Apalagi melihat sifat dari kebijakan ini adalah *Top Down* yakni kebijakan

yang berasal dari atas yakni pemerintah daerah Kabupaten Serang sehingga memanfaatkan lembaga informal ini sebenarnya harus dilakukan dengan baik.

Kemudian dalam menjalankan program ini agen pelaksana tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian sudah jelas terlihat karakteristik dari agen pelaksana ini belum dapat dikatakan baik dan layak untuk menjalankan program Agropolitan ini. Kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki tatanan cara kerja yang bagus, hal ini menjadi tolak ukur suatu kegiatan dalam mencapai target yang diinginkan.

Karakteristik agen pelaksana ini memiliki penilaian yaitu salah satunya adalah luas wilayah dengan besaran agen pelaksana ini apakah sudah memenuhi standar kesesuaian atau tidak. Yang terjadi di lapangan adalah luas wilayah program dengan besaran agen pelaksana tidak ditemukan kesesuaian, hal ini dapat dikarenakan memang agen pelaksana yang tidak memanfaatkan agen pelaksana informal seperti yang sudah dijelaskan di atas dan kemudian hal ini berdampak ke indikator penilaian yang lainnya. Memang semua indikator penilaian ini merupakan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, jadi bukan tidak mungkin apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak berdampak ke yang lainnya.

Melihat dari uraian di atas maka sudah dipahami bahwa dimensi Karakteristik Agen Pelaksana Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dijalankan lembaga yang sangat sesuai dengan karakteristik kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan. Lembaga formal yang memiliki

kekuatan hukum yakni Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan umum dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Meskipun pada pelaksanaannya tidak dilibatkan karena tidak adanya komunikasi dan koordinasi ke aparat Kecamatan dan Desa.

Kemudian program kebijakan ini memang belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga membuat ketidakjelasan sikap yang diambil agen pelaksana program ini. Hal ini membuat kebingungan yang dirasakan oleh aparat Tingkat Kecamatan dan Desa terkait program ini bahkan peneliti temukan di Desa Panyirapan dan Sukamanah bahwa Kepala Desa tidak mengetahui dengan adanya program Agropolitan ini.

Terkait luas wilayah dengan kesesuaian agen pelaksana sudah sesuai dan baik. jangkauan program ini adalah satu kecamatan Baros yang memiliki luas 44,07 Km² dengan jumlah agen pelaksana seharusnya program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, akan tetapi dalam kenyataannya setelah 4 tahun berjalan program ini belum dapat berjalan secara maksimal yang diharapkan oleh semua pihak. Agen pelaksana program ini seharusnya menjalankan sesuai fungsinya kalau memang hendak menrealisasikan program ini.

4. Sikap/Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Dari dimensi penilaian mengenai sikap atau kecenderungan para pelaksana Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para agen pelaksana. Meskipun ada beberapa pihak Desa yang tidak

mengetahui tentang program Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, ketika ditanya mendukung atau tidaknya maka dua kelurahan tersebut mendukung sekali dengan adanya bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu yang mempunyai keluarga berkebutuhan khusus.

Karena masyarakat petani mendapatkan bantuan dan bantuan tersebut dapat membantu masyarakat petani dalam menjalankan kegiatan bertani mereka. Maka dengan banyaknya dukungan dari para agen pelaksana khususnya yang turun langsung dalam melaksanakan program Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, maupun dukungan dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program Program Pengembangan Kawasan Agropolitan diharapkan pelaksanaan program ini bisa berjalan dengan baik, dan penerima dana bantuan kesejateranya bisa menjadi lebih baik dan layak serta kebutuhan akan pertaniannya terpenuhi. Indikator penilaian dari sikap/kecendrungan para pelaksana adalah mengenai respon para pelaksana dalam menyambut program Agropolitan di Kecamatan Baros yang sedang dilaksanakan. Respon yang ditemukan di lapangan menunjukkan hal yang baik terkait program Agropolitan. Tidak hanya pada level pelaksana saja yang menyambut dengan baik program ini masyarakat dan lembaga informal setempat juga merespon dengan baik penguliran program Agropolitan para pelaksana mempunyai keyakinan bahwa program ini kan membawa kondisi pertanian Kecamatan Baros khususnya dan Kabupaten Serang pada umumnya dapat meningkat ke arah yang lebih baik.

Oleh sebab itu respon baik ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk dapat menjalankan program dengan terpadu.

Mengacu pada beberapa penjelasan di atas maka mengenai dimensi Disposisi Agen Pelaksana ini sebenarnya mendapat dukungan yang sangat baik dan positif dari lembaga formal ataupun informal karena sudah jelas bahwa pelaksanaan program tersebut diperuntukan untuk masyarakat petani untuk dapat menjalankan kegiatan bertani mereka dengan maksimal dan bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dari dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang dengan Dinas pertanian, Dinas Pertanian, Dinas Perkerjaan Umum dan Pariwisata belum terjalin dengan baik. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dinas tersebut belum mempunyai visi yang sama dalam mewujudkan kawasan Agropolitan yang terpadu.

Mennyangkut dengan adanya pembangunan bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ini menjadi bukti bahwa antara Dinas Pertanian dan Pekerjaan Umum belum terjalin koordinasi yang baik. Hal yang berbeda mengenai komunikasi di ungkapkan oleh Perangkat desa bahwa mereka sama sekali tidak pernah mengetahui atau pun tidak pernah mendapatkan informasi

mengenai adanya program Program Pengembangan Kawasan Agropolitan yang sedang berlangsung.

Kemudian dari pendamping lapangan pun tidak ada komunikasi yang baik tentang adanya masyarakat di Desa tersebut yang mendapatkan bantuan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pertanian juga menjadi alasan mengapa koordinasi sosialisasi tidak maksimal. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ketua kelompok tani bahwa monitoring tidak ada karena menurut pengakuan ketua kelompok tani tersebut tidak ada dari dinas yang berkunjung desa mereka. Bukan hanya monitoring dari Dinas Pertanian sendiri yang tidak ada, sosialisasi pun tidak dilakukan oleh agen pelaksana tersebut dan membuat ketidaktahuan aparat desa setempat.. Pihak dari kecamatan pun tidak pernah mendapatkan informasi kalau akan ada sosialisasi dari Dinas manapun.

Indikator penilaian tentang tingkat sosialisasi yang terjadi dan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian ini menunjukan bahwa memang tidak berjalan dengan baik hal ini terlihat berdasarkan temuan lapangan banyak masyarakat dan lembaga informal yang tidak mengetahui tentang program yang sudah digulirkan ini. Hal ini berdampak terhadap ketidakstabilan berjalannya program, terlebih ada beberapa kepala desa pun tidak mengetahui seperti kepala Desa Penyirapan yang mengatakan bahwa tidak paham dan mengetahui bagaimanadan seperti apa Agropolitan ini. Sampai ke kelompok tani pun sebenarnya tidak mengetahui kalo yang bantuan yang diterima ini

merupakan dari program Agropolitan, mereka hanya menerima dan tidak disertakan penjelasan mengenai bantuan tersebut.

Kemudian selain sosialisasi yang lemah tadi koordinasi antar agen pelaksana pun masih belum terjalin dengan harmonis dan selaras. Hal ini dikarenakan memang masih agen pelaksana belum mempunyai visi yang sama terkait menjalankan program ini. Masing ada saling meimpah-limpahkan tanggung jawab hal ini di perjelas ketika bapak Zaldi ketua seksi tanaman pangan Dinas Pertanian mengungkapkan hal itu. Apabila kondisi seperti ini akan terus berlangsung maka program ini kan mengalami kegagalan seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Waringin Kurung. Akan sia-sia walapun dipindahkan di Kecamatan Baros akan tetapi dalam melaksanakannya tidak dengan terpadu dan maksimal hal ini merupakan pembiaraan kebijakan ini mandek begitu saja.

Dari uraian di atas maka pendapat peneliti bahwa koordinasi yang terjalin antar Satuan Kerja Perangkat Dinas(SKPD) belum mempunyai misi yang sama dalam mewujudkan kawasan Agropolitan sehingga menyebabkan koordinasi yang belum baik. selain koordinasi yang belum terjalin dengan baik ternyata sosialisasi program pengembangan kawasan Agropolitan ini pun tidak ada, hal ini dibuktikan peneliti ketika di lapangan menemukan banyak pihak-pihak yang tidak mengetahui mengenai program Agropolitan ini. pihak Kecamatan Baros pun hanya pernah mendengar bawasannya ada program pengembangan kawasan Agropolitan untuk lebih jelasnya pihak kecamatan tidak mengetahui. Hal ini juga ditemui ketika peneliti melakukan

wawancara ke Kepala desa di desa-desa di Baros. Desa Sukamanah sebagai salah satu contohnya pihak pemerintah desa tidak mengetahui kalau di Kecamatan Baros ini digulirkan program Agropolitan yang Desa mereka menjadi salah satu lokasi dijalankan program ini.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, serta politik dari tempat kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa lingkungan eksternal yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan program pengembangan kawasan Agropolitan. Dengan adanya respon positif dari lingkungan keeksternal diharapkan keberlangsungan pertanian di Kecamatan Baros dapat meningkat dan menjadi unggul sehingga dapat menopang kebutuhan pangan Kabupaten Serang.

Jika dilihat dari katagori yang mendapatkan dana bantuan pemerintah daerah memprioritaskan bantuan tersebut untuk masyarakat petani melalui kelompok tani agar dapat menjalankan kegiatan bertani mereka dengan maksimal dan bisa terpenuhi. Seiring dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan tersebut sehingga masyarakat petani. Karena program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani melalui percepatan pengembangan wilayah desa.

Pengembangan kawasan Agropolitan ini juga ditujukan untuk pengembangan kawasan pertanian yang berpotensi melalui pengembangan

meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan permodalan. Sehingga petani dapat hidup layak dan sejahtera. Kondisi lingkungan sosial yang menyabut dengan baik seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para pelaksana untuk dapat menjalankan kebijakan ini akan tetapi lagi-lagi kondisi yang mendukung ini tidak dijadikan kekuatan dalam pengembangan kawasan Agropolitan ini terlebih melihat lingkungan ekonomi yang mendorong untuk dapat berjalannya Agropolitan di Kecamatan Baros. Kondisi lingkungan ekonomi yang terjadi saat ini masih belum berubah dari pra kebijakan ini berjalan dan sampai sekarang, hal ini disebabkan memang Agropolitan ini belum memberikan dampak yang berarti di kehidupan masyarakat petani. Kondisi ekonomi yang ini yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan program Agropolitan ini berjalan, sudah jelas bahwa memang kondisi ekonomi yang diharapkan ini belum tercapai pada saat ini.

Kalau Agropolitan ini dapat berjalan bukan tidak mungkin kondisi ekonomi yang ada di lingkungan program ini bisa terangkat dan lebih baik memang tujuan dari pengembangan kawasan Agropolitan ini adalah memperbaiki kondisi lingkungan ekonomi masyarakat petani yang mayoritas berada di Kecamatan Baros. Kondisi politik juga terlihat kondusif artinya tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan memanfaatkan Agropolitan ini menjadi sebuah politik oleh para pelaksana untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik.

Mengacu pada uraian di atas maka pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan ini, mendapat dukungan dari

lingkungan sosial ekonomi dan politik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum baik. Lingkungan sosial setempat sebenarnya sangat mendukung dengan keberadaan program ini walaupun mereka sendiri tidak paham, tapi mereka percaya bahwa semua program kebijakan itu bersifat bagus dan baik akan tetapi dalam pelaksanaannya ini yang perlu diperhatikan lebih sebab memang dalam pelaksanaan ini sering terjadi masalah sehingga menimbulkan program ini belum berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu pelaksanaan program ini harus diketahui dan didukung oleh semua pihak agar pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dapat menopang kebutuhan hasil pertanian Kabupaten Serang itu sendiri. Pengembangan Agropolitan di Baros sangat memperhatikan lingkungan sosial, ekonomi dan politik, sebab dalam menjalankannya harus memperhatikan lingkungan ekonomi karena memang program ini memiliki tujuan salah satunya untuk memajukan ekonomi dari Kecamatan Baros.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Serta Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros dalam meningkatkan hasil produksi pertanian di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, belum berjalan dengan optimal. Sehingga yang terjadi sekarang masyarakat belum mendapat manfaat dari kebijakan tersebut dan menjadikan program ini tidak bagus dan buruk apabila dilihat dari segi pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan bahwa belum lengkapnya dokumen persyaratan administratif dalam pembentukan program kebijakan ini. Belum tersusunya Surat Keputusan Kelompok Kerja dalam menjalankan program ini, akan tetapi yang terjadi di lapangan program ini sudah berjalan.

Kemudian ditemukan juga sosialisasi dan koordinasi masih belum terlihat dengan baik sehingga ditemukan sosialisasi yang buruk yang dilakukan oleh Dinas Pertanian serta pihak yang terkait dalam menjalankan program ini. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa program Agropolitan ini sudah berjalan, tidak hanya masyarakat akan tetapi pihak Kecamatan pun tidak mengetahui tentang program Agropolitan tersebut. Tingkat koordinasi yang buruk pada level pelaksana program juga menambah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Karakteristik agen pelaksana dan kecenderungan (*Disposition*) belum berjalan dengan baik

hal itu dapat dilihat dari masing-masing SKPD belum mempunyai komitmen sama dalam mewujudkannya kawasan Agropolitan yang optimal. Permasalahan lainnya dalam bidang infrastruktur/ sarana pendukung seperti kios-kios saprotan, gudang, parkir dan tempat bongkar muat masih belum dimiliki oleh desa-desa yang berada di Kecamatan Baros. Seharusnya infrastruktur itu harus dilengkapi. Hal-hal yang diuraikan di atas menjadi bukti bahwa memang pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan belum berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Bappeda Kabupaten Serang sebagai *leading sector*/koordinator dalam kelompok kerja (pokja) perlu meningkatkan penggerakkan/pengarahan kepada SKPD-SKPD terkait dalam melaksanakan pengembangan Agropolitan dengan menerapkan mekanisme *reward* Kepada SKPD atau pihak terkait yang menjalankan tugas sesuai fungsinya dengan cara memberikan predikat baik. kemudian menetapkan *punishment* Kepada pihak terkait yang menjalankan tidak sesuai tugas dan fungsinya dengan cara memberikan predikat tidak baik dan kemudian diterbitkan dimedia publikasi humas Kabupaten Serang.

2. Perlu adanya *capacity buidilng* serta peningkatan wawasan dari SKPD-SKPD terkait untuk lebih memahami mengenai konsep Agropolitan dan memahami kewenangannya masing-masing dengan cara mengintensifkan kegiatan koordinasi dengan kelompok kerja (pokja) Agropolitan. Kegiatan *capacity buidilng* seharusnya dilakukan setiap 6 bulan, hal ini ditujukan kesemua SKPD dan pihak terkait dalam pengembangan kawasan Agropolitan Baros.
3. Perlu adanya peningkatan kerjasama/koordinasi bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan pengembangan Agropolitan dengan cara melakukan pendekatan persuasif dengan cara melakukan pelatihan, pemberian motivasi, dan melakukan komunikasi yang baik serta memberikan pengarahan secara terus menerus melalui kegiatan rapat (pokja) Agropolitan yang seharusnya dilakukan 6 bulan sekali kepada seluruh *stakeholder* terkait.
4. Dukungan positif dari agen pelaksana dan masyarakat yang telah diberikan kepada program pengembangan kawasan Agropolitan ini harus tetap dipertahankan agar dukungan positif tersebut dapat terus menerus diberikan oleh agen pelaksana maupun masyarakat itu sendiri yang ada di lingkungan Kecamatan Baros supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan terpadu.
5. Perlu adanya pendampingan dan monitoring terkait penyerahan dan pemberlakuan tanaman yang berkaitan dengan Agropolitan, serta pencukupan sumberdaya manusia yang bergerak melaksanakan program ini. Sehingga dapat mengoptimalkan program ini.

6. Besaran luas wilayah implementasi juga sebaiknya di sesuaikan dengan besaran agen pelaksana hal ini berkaitan dengan kurang maksimalan berjalannya program.
7. Peningkatan sosialisasi juga sangat perlu dan dibutuhkan supaya masyarakat dan pemerintah setempat mengetahui dan dapat ikut serta dalam menjalankan serta dapat mengontrol dan bisa dijadikan bahan pertimbangan para pelaksana di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agurtino, Leo. 2008 . Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek. Bandung: Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarto, Meriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, N William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Helmi. 2013. Sistem Hukum Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Bandung: Sinar Grafika
- Irawan, Prasetya. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Modul Universitas Terbuka.
- Miraza, Bachtiar Hasan. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bandung: ISEI.
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rustiadi, *et al.* 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian, Sondang p. 2003 Filsafat Administrasi Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sjafari, & Sumaryo (penyunting) 2012 Pembangunan Masyarakat Teori dan Implementasi Di Era Otonomi Daerah. Serang: Fisip Untirta Pres.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. 2005 Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunyoto, Usman. 2012. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Terry, George R & Rue, Leslie W. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Lain:

D, Ma'mun. dkk. 2013. Arah Struktur Tata Ruang Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Budidaya Tanaman*. Vol 2. No.2 Hal.152-167.

Pahlevi, Nevi. 2011. *Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Lebak (Study Kasus :Kawasan Agropolitan Kecamatan Wanasalam)*. Universitas Indonesia: Skripsi yang dipublikasikan.

<http://beritadaerah.com> (Edisi Sabtu, Sabtu 18 Juni 2013) diakses pada hari Minggu, 14 April 2015, pukul 06.30 WIB.

<http://radarabanten.com> (Edisi 11 Agustus 2014) diakses pada hari Senin, 16 Maret 2015, pukul 16.30 WIB

Rahmawati, Nur Fadri. 2008. *Pengaruh Pelaksanaan Agropolitan terhadap Perkembangan Ekonomi di Tujuh Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Magelang*. Institute Pertanian Bogor: Skripsi yang dipublikasikan.

Dokumen:

Detail Engineering Design (DED) 2013 Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang .

Masterplan 2012 Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang .

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Pekerjaan umum, Kementrian. 2012. *Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan*. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

.

LAMPIRAN

Pembimbing I
Pembimbing II

CATATAN BIMBINGAN
: Suzainingsih, Msi
: Heni Wastanahuti, M.Si

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	11/14 16	ditalkan ganti faktor blm ada masalah.	<i>[Signature]</i>
	6/15 13	proksi bul 1, tambah data di masalah	<i>[Signature]</i>
	20/15 14	lanjutkan sampai bul 3.	<i>[Signature]</i>
	19/15 5	Perbaiki bul 3 Buat pedoman wawancara	<i>[Signature]</i>
	25/15 5	Perbaiki bul 1-3	<i>[Signature]</i>

Catatan: Jumlah tetap maka mahasiswa dengan meeting-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tetap mata)

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	10/15 6	Ace Seminar proposal	<i>[Signature]</i>
	17/15	- Di UBM banyak hal dijelaskan tapi di tengkap di sumber - Sertakan daftar pustaka - di ceritakan dg proposal - sertakan pemisahan kutipan - Busff. Firdausi Hani - Pandu bul. 15. - Karsten Karyan - berprakt. - Seri 79 digundan dg - masalah 2 yg di tawar - belum terbahay. - Karsten bul 15 - Karsten UBM. - Bab II → di V ering dalam - pemilihan dari sumber - Bab 5 ada di PP - Bab 15 → Karsten foto.	<i>[Signature]</i>
	19/15 15		<i>[Signature]</i>




Catatan: Jumlah tetap maka mahasiswa dengan meeting-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tetap mata)

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	14/8-2015	<ul style="list-style-type: none"> - Koreksi Bab II : Ketrampilan teori + Ident. Masalah - Jwb bagi bkras: 1. Hsl. Pengisian 2. Daftar Isi, Tabel, Gambar dll 3. Kata Pengantar a. Lampiran 2 yg urgent. 	
	18/8-2015	ACC SEMINAR PROPOSAL PERUBAHAN	
	11/12-15	<ul style="list-style-type: none"> - Kandidat Logor - Kriteria - Cara penulisan - dan analisis - di pertemuan 	
	17/12-15	<ul style="list-style-type: none"> - Ident. faktor 3 penghambat - K. Agre di 20. Kurang di - Pembanding 	
	21/15	Acc Laporan	


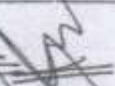
Catatan: Jumlah temp mata mahasiswa dengan meeting-masing pembelajaran minimal 7 kali (yaitu dengan 2 pembelajaran) sebanyak 14 kali temp mata).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	27/1-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Koreksi draft di Prodi - Kalimat tanggung & tidak tanggung? → keca pindahan. 	
	3/3-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan penjelasan disertai indikator terlewat - Buat BAB V 	
	11/3-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Koreksi BAB IV Profesional - Koreksi simpulan 5.3.3 - Daftar pustaka ditawa. 	
	15/3-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Koreksi BAB V : Saran dan - Hsl. praktik 	
	16/3-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkapi ke pers. 5 	
	22/3-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Bab 1-5 - Koreksi dgn arsitek & Prof. - Buat Cetak Lapor ast. 	

Catatan: Jumlah temp mata mahasiswa dengan meeting-masing pembelajaran minimal 7 kali (yaitu dengan 2 pembelajaran) sebanyak 14 kali temp mata).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	08/09 2016	Revisi pembahasan abstrak lagi ke simpul kemudian 75 & Great pembaca jurnal.	
	19/4 2016	Pembacaan simpul Ace laporan Buat abstrak, dyta Pustaka dll. pembaca abstrak dan kata pengantar	
	19/16 4	Ace sedang akhir	

Catatan: Jumlah hari yang sudah dilaksanakan dengan meeting-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 3 pembimbing sebanyak 14 kali yang sudah).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	13/4	Koreksi Abstrak	
	19/16 4	Ace sedang	

Catatan: Jumlah hari yang sudah dilaksanakan dengan meeting-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 3 pembimbing sebanyak 14 kali yang sudah).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: Kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 003/UN.43.6.3/PG/2016

3 Januari 2016

Lampiran :-

Hal : Permohonan Surat Ijin Penelitian dan Mencari Data

Kepada Yth
Camat Kecamatan Baros

Di
Tempat


Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan **riset** mahasiswa kami di Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Galih Pratama
NIM	: 6661100753
Semester	: 11
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Analisis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Ijin Mencari Data dan Wawancara
Instansi Tujuan	: Kantor Camat Kecamatan Baros

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Dengan demikian ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih

Ketua Program Studi
Ilmu administrasi Negara


Rahmawati, S.sos, M.Si
NIP. 19790525005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: Kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : ~~606~~ /UN.43.6.3./PG/2016

3 Januari 2016

Lampiran :-

Hal : Permohonan Surat Ijin Penelitian dan Mencari Data

Kepada Yth
Dinas Pertanian Kabupaten Serang

Di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan **riset** mahasiswa kami di Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Galih Pratama
NIM	: 6661100753
Semester	: 11
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Analisis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Ijin Mencari Data dan Wawancara
Instansi Tujuan	: Dinas Pertanian

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Dengan demikian ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih

Ketua Program Studi
Ilmu administrasi Negara



Rahmawati, S.sos, M.Sj
NIP. 19790525005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-
281245 Pakupatan Serang Banten

url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor **437UN.43.6.1/PG/2015**
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

2 November 2015

Kepada Yth.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Serang

di
Tempat

Dengan
Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberikan tugas
kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Galih Pratama
NIM : 6661100753

Semester : 11
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan
Kecamatan Baros Kabupaten Serang

Data diperlukan : Ijin Mencari Data dan Wawancara

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat
memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 1 Telp. (0254) 200953 - 200252 - 200737 Fax. (0254) 201953
SERANG - PROVINSI BANTEN

SURAT PEMBERITAHUAN REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / '583 / Pem. Um/2015.

Membaca : Surat dari Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 305/UN.43.6.3/PG/2015, tanggal 24 Maret 2015, perihal Surat Permohonan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Prop. Banten
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kab. Serang Nomor : 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Serang.

Memberitahukan :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Instansi / Organisasi | : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
| 2. Alamat | : Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang |
| 3. Penanggung Jawab | : Rahmawati, S.Sos, M.Si. |
| 4. Peserta | : Galih Pratama Npm : 66621100753 |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : 25 Maret s.d 24 April 2016 |
| 7. Lokasi / Tempat | : BAPPEDA, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, Badan -
Lingkungan Hidup dan Kantor Kec. Batos Kepala Desa Baros -
Kab.Serang. |
| 8. Judul | : Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan –
Kec.Baros Kab.Serang. |
| 9. Jenis Kegiatan | : Penelitian |
| 10. Maksud dan Tujuan | : Untuk mendapatkan data – data Sebagai bahan Riset |

Ketentuan :

1. Kedatangan dilokasi Objek Penelitian / PencarianData / Survey/Magang / PKL / KKM / KKP / KKN//KKL, agar segera memberitahukan kepada pimpinan Dinas / Instansi di maksud.
2. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari tujuan pencarian data dan ketentuan yang berlaku.
3. Selesai melakukan Penelitian diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab.Serang.

Dikeluarkan di : Serang.
Pada tanggal : 26 Maret 2015.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. SERANG
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



WANA SUKMANA KUSUMA, SE.MM
Nid. 19640424 198503 1 012

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang (SL).
2. Yth. Wakil Bupati Serang (SL).
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab.Serang (SL).
4. Yth. BAPPEDA Kab.Serang
5. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kab.Serang
6. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kab.Serang
7. Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.Serang
8. Yth. Camat Baros Kab.Serang.

Member ctek.

Nama : Ahmad Suparlan
Jabatan : Kepala Desa Barat
Jenis kelamin : laki-laki.

Kami selaku Pinak desa tidak mengetahui dengan adanya pengujian agropolitan, hanya kami mendengar kalau ada bantuan yang turun dan karena kami menerima bantuan itu, tetapi tidak ada pemberitahuan yang jelas dan resmi terkait agropolitan ini seperti apa tujuan dan maksudnya. Kalau memang untuk meningkatkan hasil pertanian akan seperti apa dan bagaimana ini tentu perlu penjelasan dan sosialisasi agar kami bisa ikut untuk kesuksesan program ini. Sebetulnya kami selalu mendukung penuh kalau program yang digulirkan akan tetapi kami perlu dilibatkan dan diajak, kalau tidak ya bagaimana kami bisa mengawasi.



(A. Suparlan)

NIP:

MEMBER CHECK.

Nama : Dahlan
Jabatan : Pelaksana
Jenis kelamin : laki-laki

Ukuran dan tujuan kebijakan

Ya memang pengembangan kawasan Agropolitan ini masih terkendala SK Korkja yang belum tersusun, tapi dalam pelaksanaannya program ini menggunakan Perda No 10 tahun 2011 tentang tata ruang Wilayah Kabupaten Serang th 2011-2031. karena Agropolitan tertuang di dalamnya.

Sumberdaya yang ada ini kalau menurut saya sudah cukup akan tetapi memang butuh pendampingan dalam pelaksanaan ditapangan apabila sumberdaya finansial dan waktu ini sudah cukup tetapi memang program ini harus direview ulang.

Agen pelaksana dalam program ini semuanya response menerima tidak ada yang menolak untuk menjalankan program ini dan program ini dijalankan tentu saja oleh organisasi formal dan informal.

Bappeda selalu berkoordinasi dengan dinas pertanian dalam merencanakan program ini sehingga terdapat bahwa program ini belum sepenuhnya berjalan dan dapat ditrikmati.

Kalau memang program ini dapat berjalan tentunya akan akan mendapat meningkatkan ekonomi dalam masyarakat di Baros. kondisi sosial tentu juga akan sedikit berubah dalam kartanya.



MEMBER CHECK

Nama : M. Arifudin
Pekerjaan : Kepala Desa Penyirapan
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kami tidak mengetahui mengenai program ini dan tidak pernah ditibitkan dalam urusan ~~pe~~ terkait program-program Pemerintah.

Kalau pengujian Agropolitan sudah beberapa tahun yang lalu tapi kami dari desa kenapa tidak di beritahu mungkin bantuan ataupun pemberitahuan itu langsung kekelompokan. Kami tidak dapat berkata banyak bahwa memang pada kenyataannya kami tidak mengetahui program tersebut berjalan dan telah lama digulirkan.



(M. ARIFUDIN)

NRPD: 1609 2 197809 16 01

MEMBER CHECK

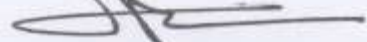
Nama : Suhada
Jabatan : Sekretaris Camat
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kalau memang tujuan kebijakan ini untuk masyarakat petani itu memang bertujuan baik, akan tetapi memang mungkin belum berjalan secara maksimal dan seperti yang ditargetkan.

Sumberdaya disini jelas belum mampu dalam menjalankan program yang dimaksud dan kalau dilihat bakal menggunakan dana yang cukup besar.

Kita tidak pernah dilibatkan dan kita tidak mengetahui yang terjadi mengenai agropoltan. Justru yang kami tahu yaitu ada perkebunan buah naga itu pun yang mempunyai swasta kalau dari pemerintah kabupaten kami tidak dilibatkan.

Serang, 2016



(*Suhada*)

NIP: 195707011986021024.

MEMBER CHECK.

Nama : Rifai
Jabatan : Ketua Kelompok tani.
Jenis kelamin : Laki-laki

Jumlah kelompok tani kalau semuanya sebenarnya berjumlah 60 orang yang mempunyai lahan yang digarap kebanyakan sawah semua. Kalau untuk menjalankan Agropolitan memang harus ada penjelasan terlebih dahulu sebelum dijalankan. Pasti banyak yang tidak mengetahui tentang Agropolitan ini. Kami hanya mengetahui kalo di pemerintah pasti ada bantuan kalau kita bisa mengurus dan mengamburta.

Belum ada sosialisasi secara jelas mengenai program ini, kami hanya tau di jalankan saja. Mendapat bantuan mesin hanya itu saja. Padahal memang sangat diharapkan sosialisasi dan pendampingan yang cukup agar dapat berjalan dengan baik.


(A. RIFAI)

NIP:

MEMBER CHECK

Nama : Saniman


Jabatan : Ka Gapoktan

Jenis Kelamin: Laki-laki

Tujuannya Untuk Masyarakat kalau program yang dari pemerintah justru sangat bagus ~~at~~ kami selalu menyetujui program dan bantuan untuk dapat dijalankan oleh para petani.

Banyak yang memberikan penyuluhan dari Kecamatan Bards untuk menjalankan program dan penanaman bibit yang dapat dan diharapkan bisa menjadi percontohan untuk kelompok tani yang lain dalam melakukan penanaman yang baik dan benar.

Sosialisasi tidak ada dan kami tidak mengetahui jenis program apa akan tetapi yang jelas ada bantuan dan pasti di Kabupaten kalau kita bisa mengurut bakal mendapat bantuan. Banyak yang tidak tahu mengenai program yang sedang berjalan ini.



(SANIMAN)

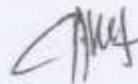
NIP:

Member Cek.

Nama : Ahmad Balubad
Jabatan : Poktan
Jenis kelamin : Laki-laki.

Tentu program ini mempunyai tujuan yang bagus akan tetapi memang kalau untuk Eckarang memang belum terata dan tidak jelas apa maksud dan tujuan dari Agropeditan ini seperti apa dan bagaimana cara kerja yang harus dilakukan.

Kami tidak banyak mengetahui karena sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang dan pendamping kurang memberikan penjelasan kalau memang akan melakukan hal yang berkaitan dengan cara menggunakan ataupun menjalankan melakukan menanamkan. dan pemberitahuan ~~program~~ program yang tidak pernah ada dan dituna oleh sor pihak kelompok tani, kelompok tani hanya ada beberapa yang di dampingi dan di monitoring.



(Ahmad Balubad)

NIP:

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang diberikan dengan masalah penelitian, maka disusun pedoman wawancara seperti di bawah ini:

Informan:

1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang
3. Kepala Seksi Tanaman pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Serang
6. Kepala Dinas Tata Ruang wilayah Kabupaten Serang

Ukuran dan tujuan kebijakan

1. Bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros sudah realistik dengan kultur daerah tersebut ?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?

Sumberdaya

3. Bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang ada dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?
4. Bagaimana pengawasan terkait penyuluh lapangan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?
5. Bagaimana proses pelaporan terkait dengan bantuan yang sudah diberikan oleh masyarakat ?
6. Bagaimana penyaluran bantuan tersebut, bantuan melalui apa ?

7. Bagaimana kemampuan penyuluh lapangan ?
8. Bagaimana sarana dan prasarana penunjang program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?

Karakteristik Agen Pelaksana

- 11 Bagaimana karakteristik agen pelaksana dalam melaksanakan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?
- 12 Adakah sosialisasi atau pelatihan khusus terkait mekanisme program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?
- 13 Adakah kendala terkait karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?

Sikap/kecendrungan (*Disposition*) para pelaksana

14. Bagaimana Sikap/kecendrungan para pelaksana dalam program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

15. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?
16. Bagaimana komunikasi antar dan aktivitas para pelaksana tersebut?
17. Bagaimana koordinasi sudah terjalin dengan baik?

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

18. Bagaimana sejauh ini lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik ini?

19. Bagaimana menangani lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif yang dapat menjadi bing keladi dari kegagalan kinerja pelaksanaan kebijakan publik ini?
20. Bagaimana kendala yang dihadapi terkait lingkungan sosial, ekonomi dan politik?

**PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI PELASANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KECAMATAN
BAROS KABUPATEN SERANG**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang diberikan dengan masalah penelitian, maka disusun pedoman wawancara seperti di bawah ini:

Informan:

1. Kepala Upt Pertanian Kecamatan Baros
2. Camat Kecamatan Baros
3. Masyarakat Petani
4. Kepala Desa di Kecamatan Baros

Ukuran dan tujuan Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan terkait program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?
2. Kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?

Sumberdaya

3. Apakah bapak mengetahui jumlah penerima bantuan program pengembangan kawasan Agropolitan ?
4. Apakah bapak mengetahui bantuan itu terkait tentang Agropolitan ?

5. Apakah bapak mengetahui sumberdaya yang ada terkait pelaksanaan program ini ?
6. Apakah penyuluh dari kecamatan ataupun dari kabupaten sering melakukan monitoring dan pendampingan lapangan ?
7. Apakah bantuan dalam bentuk sarana penunjang sudah dipergunakan sesuai dengan fungsinya ?
8. Apakah waktu yang dialokasikan sudah cukup?
9. Bagaimana Sarana dan prasarana yang ada?

Komunikasi Antar Organisasi

10. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dinas Pertanian dan Pemerintah Daerah ?
11. Bagaimana komunikasi dengan dinas terkait?
12. Apakah kendala tentang komunikasi pada pelaksanaan program ini?

TRANSKRIP DATA

<p>Peneliti : Bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros sudah relaistis dengan kultur daerah tersebut ?</p>	
<p>I₁₋₁ : Ya memang pengembangan kawasan Agropolitan ini masih terkendala oleh SK Pokja yang belum tersusun kan tetapi kami memakai perda No 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Serang karena semua tertuang di dalamnya. Terlepas dari itu kita berharap dengan adanya program Agropolitan ini dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, akan sangat membantu petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka itu khusus nya dan umumnya adalah meningkatkan ekonomi Kabupaten Serang dengan basis pertanian.</p>	1
<p>I₁₋₂ : Tujuan dari kebijakan kawasan Agropolitan ini kami mengarapkan agar para petani yang ada di Kecamatan Baros taraf hidup mereka agar dapat meningkat,diantarannya mulai dari kebutuhan dasar mereka dan menjual hasil tani mereka itu dapat terintergrasikan ke satu tempat yang bias menampung dan menjual hasil tani mereka. Setelah program ini dapat berjalan secara baik mereka lebih maksimal dalam bertani dan memiliki kehidupan yang layak, mengenai sk pokja ini kan menyusul oleh karena itu kami akan terus mempeebaiki dan mereview program ini</p>	2
<p>I₁₋₃ : Jadi begini, program Agropolitan ini memiliki tujuan yang sangat baik, akan tetapi hingga saat ini program ini belum berjalan dengan maksimal , hal ini terjadi dikarenakan program ini belum kuat dalam segi administratif memang ruang wilayah</p>	3

<p>Kecamatan Baros adalah wilayah pertanian dan perkebunan akan tetapi dalam pelaksanaannya itu urusan dinas terkait dalam level pelaksana</p>	
<p>I₂₋₁ : Jadi begini Agropolitan itu kan kota pertanian, kalo Dinas Pertanian untuk kegiatan Agropolitan lebih banyak dalam hal penyuluhan terhadap petani. Nanti para petani diberikan pemahaman terkait cara bertani dengan model Agropolitan dan tentunya akan diberikan alat penunjang dalam bertani tersebut. Kita beri mereka bibit, dan alat seperti Traktor dan mesin pompa air.</p>	4
<p>1. Peneliti : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?</p>	
<p>I₁₋₁ : Ya memang pengembangan kawasan Agropolitan ini masih terkendala oleh SK Pokja yang belum tersusun. Hal ini mendjadi kegagalan yang yang paling utama menurut saya karena apabila belum ada dokumen ini nantinya akan terjadi kebingungan dan dalam action itu tidak dapat maksimal, apalagi ka nada beberapa SKPD yang menjalankan program ini.</p>	5
<p>I₁₋₂ : Kalau kendala untuk saat ini kalau menurut saya itu belum fokus dan belum mempunyai misi yang sama semua SKPD yang terkait dalam melaksanakan program pengembangan kawasan Agropolitan ini. banyak berangapan bahwa Agropolitan ini punya Dinas Pertanian, jadi SKPD yang lain kurang memiliki program itu. Perlu pemahaman dan membuka wawasan bahwa Agropolitan ini bukan punya Dinas Pertanian saja ada beberapa dinas yang terkait dalam pengembangan program ini seperti Dinas Pekerjaan Umum misalnya jadi begitu.</p>	6
<p>I₂₋₇ : Kalo dari pihak Kecamatan amat sangat sangat mendukung dengan diadakannya program pengembangan kawasan</p>	

<p>Agropolitan ini, tujuannya juga sangat jelas untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan umumnya masyarakat Kabupaten Serang, akan tetapi dalam pelaksanaannya dari pihak dinas pertanian sendiri kurang melakukan monitoring ataupun turun langsung mensosialisasikan maksud dan tujuan program kebijakan ini sehingga menyebabkan kebingungan dan kurang koordinasi</p>	
<p>Peneliti : Bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang ada dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?</p>	7
<p>I₁₋₁ : Kalau sumberdaya manusia di Bappeda yang menangani program Agropolitan ini saya rasa mampu, mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</p>	8
<p>I₁₋₂ : Sejauh ini kita dalam menangani program Agropolitan ini saling mendukung satu sama lain agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, adapun kendala yaitu sumberdaya manusia di sini masih kurang belum lagi kita melakukan monitoring dan pendampingan soalnya jarak yang lumayan jauh. Yang jelas kami kekurangan sumberdaya manusia dalam menjalankan program ini</p>	9
<p>I₂₋₁ : Jika melihat jumlah sumberdaya yang ada di Dinas Pertanian yang menangani program Agropolitan ini memang masih kurang. Jika yang menangani program ini 5 orang mungkin akan lebih baik dan efektif dalam melakukan pendampingan dan penjelasan mengenai program Agropolitan ini di Kecamatan Baros</p>	10
<p>I₂₋₂ : Memang pegawai kita masing kurang, apalagi seksi tanaman pangan ini hanya memiliki tujuh pegawai Padahal itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan program Agropolitan ini.</p>	11

<p>I₂₋₂ : Pendamping lapangan yang ada merupakan pendamping yang sangat kompeten dapat berkomunikasi dengan lancar yang selalu turun kelapangan untuk menyapaikan dan mengajarkan serta menjelaskan dari cara mekanisme dari konsep Agropolitan</p>	
<p>I₂₋₆ : Ada, tapi itu jarang banget ke sini Cuma ada beberapa kali pas memberikan bantuan bibit pohon dan alat untuk untuk membajak sawah itu, selebih nya belum pernah kesini dan tidak menjelaskan program Agropolitan itu, kami saja masih belum paham dengan program itu.</p>	12
<p>I₂₋₃: Kalo mengenai rentang waktu dalam pelaksanaan program ini sebenarnya cukup, program ini dimulai dari 2011 belm lagi kan memang program ini merupakan lanjutan dari Agropolitan yang ada di Waringin kurung, ya memang saya katakana berulang-ulang memang semua SKPD ini belum punya misi yang sama dalam menjalankan program ini.</p>	13
<p>I₂₋₁ : Sebenarnya target yang direncanakan ini sudah cukup realistis dan cukup untuk mengimplementasikan program ini,hanya saja memang harus dilakukan dengan baik.</p>	14
<p>Peneliti : Bagaimana karakteristik agen pelaksana dalam melaksanakan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?</p>	
<p>I₁₋₁ :Bappeda sebagai Agen pelaksana sekaligus sebagai perencana terselenggarakanya Program Agropolitan ini,bekerjasama dan mengkoordinasikan instansi-instansi pelaksana serta mengajak masyarakat untuk dapat mewujudkan program yang sangat baik ini, dan apabila ada kendala-kendala agar segera diselesaikan demi terwujudkannya kawasan Agropolitan yang terpadu.</p>	15
<p>I₂₋₁ : Pihak kami selaku Dinas Pertanian selalu bekerjasama dengan semua dinas terkait dalam pelaksanaan program Agropolitan ini seperti Dinas PU, Pariwisata, dan camat</p>	16

	<p>aparatur desa dan kelompok tani yang berada di Kecamatan Baros, semua kami ajak untuk mewujudkan kawasan Agropolitan secara efektif, kami selaku Dinas Pertanian yang menjadi pelaksana utama dari program ini kan bekerja semaksimal mungkin dan bertanggung jawab.</p>	
I 2-2	<p>: kami pihak Dinas Pekerjaan umum juga ikut serta mengimplementasikannya program Agropolitan ini dengan bergerak di pembangunan sarana dan prasarana, semua tender pengerjaan sarana dan prasarana terkait pengadaan untuk Agropolitan ini kami kerjakan secara maksimal, akan tetapi yang masuk ke kami baru bsatu yaitu pengerjaan jaringan irigasi.</p>	17
Peneliti	<p>: Adakah sosialisasi atau pelatihan khusus terkait mekanisme program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?</p>	
I 2-7	<p>: Kami selaku pihak kecamatan sangat mendukung dengan program kebijakan ini, apalagi kalau dilihat manfaat dan tujuan yang sangat baik bagi masyarakat petani di kecamatan Baros, akan tetapi pihak kecamatan kurang dilibatkan oleh Dinas Pertanian hanya ada pemberitahuan saja kalau di Kecamatan Baros itu di jadikan kawasan pengembangan Agropolitan, tapi terlepas oleh itu kami sangat mendukung akan program itu.</p>	18
I 2-6	<p>: Terkait sosialisasi memang kami menyadari memang kurang bahwa masyarakat disana tidak mengetahui apa yang sedang terjadi oleh sebab itu program ini memang masih sangat banyak kendala terkait sosialisasi dan koordinasi.</p>	19
Peneliti	<p>: Bagaimana Sikap/kecendrungan para pelaksana dalam program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?</p>	
I 2-1	<p>: Saya pribadi sangat mendukung dengan adanya program ini, karena masyarakat petani dapat meningkatkan hasil panen</p>	21

	<p>mereka dengan metode-metode yang baru serta mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan bertani mereka.</p>	
I ₂₋₃	<p>: Kami selaku pihak dari Dinas Pekerjaan Umum sangat senang dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan ini yang mana banyak pihak yang terlibat di dalamnya, karena masyarakat khusus ya Baros dan kabupaten Serang umumnya dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan menjadikan sector pertanian sebagai salah satu roda penggerak perekonomian.</p>	22
I ₃₋₁	<p>: Kami selaku pihak kecamatan Baros sangat senang dan mendukung dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan, karena dengan adanya kebijakan ini masyarakat Baros mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Serang dengan memberdayakan petani yang berada di Baros ini, maka dengan adanya program ini pihak kecamatan Baros pun ikut andil dalam mengawasi program tersebut agar terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang diharapkan.</p>	23
I ₂₋₇	<p>: Saya selaku kepala seksi UPT Pertanian Kecamatan Baros sangat mendukung sekali dengan adanya program pengembangan kawasan Agropolitan ini, dengan cara mengurus segala hal bentuk bantuan ataupun hal-hal yang terkait program ini yang turun dari Dinas Pertanian</p>	24
I ₁₋₁₂	<p>: Saya selaku kepala seksi tanaman pangan dan sebagai pelaksana program Agropolitan ini ikut langsung mensukseskan program tersebut dan sangat merespon dengan baik agar pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan berjalan dengan seaimana mestinya dan dapat mencapai hasil yang diharapkan.</p>	25

Peneliti	: Adakah kendala terkait karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?	
I ₃₋₁	: Penyusunan renstra pertanian di kita, itu Beppeda yang buat. Tanya aja nanti ke Bappeda	26
I ₁₋₅	: Kalau saya liat program disini banyak yang ga jalan ya, jadi cuma kelompok dadakan aja, banyak dari petani itu abis dapet bantuan misalnya, itu nantinya mereka jual lagi	27
I ₁₋₅	: Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam melaksanakan sebuah kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-sesalahan akan sangat kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya. Dari dimensi komunikasi ini, peneliti membagi dalam dua aspek penelitian yaitu koordinasi dan sosialisasi.	28
I ₁₋₅	: Syarat-syaratnya itu ada dokumen kelompok yang terdiri dari berita acara pembentukan, pengukuhan kelompok dari desa, susunan pengurus dan anggota, ada laporan produksi pertanian ada juga kumulatifnya.	29
Peneliti	: Adakah sosialisasi atau pelatihan khusus terkait mekanisme program pengembangan kawasan Agropolitan Baros	
I ₁₋₅	: Sosialisasi yang dirasakan sangat kurang ini yang menjadikan tingkat koordinasi yang sangat lemah kemudian masih banyak masalah yang memang belum dapat terselesaikan.	30
I ₁₋₆	: Sekarang sudah ada peningkatan, dari yang tadinya 7	31

	kelompok tani sekarang sudah ada 15 dan itu kan ada peran kita/binaan dinas lah.	
I ₂₋₃	: Kalau saya liat KUB disini banyak yang ga jalan ya, jadi cuma kelompok dadakan aja, banyak dari nelayan itu abis dapet bantuan kaya jaring misalnya, itu nantinya mereka jual lagi	32
I ₃₋₁	:	
Peneliti	: Adakah kendala terkait Sikap/kecendrungan agen pelaksana dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ?	
I ₂₋₄	: Kita belum punya data pasti mengenai pelanggaran tersebut, tapi selama ini setahu saya belum ada kasus seperti itu. Dari kecamatan juga ke kita belum ada laporan, paling yang ada itu berupa penyerahan bibit.	34
I ₁₋₁₂	:Mungkin ada aja, cuma kita ga tau pasti. Soalnya sampai saat ini kita masih belum punya pengawas, jadi kita belum bisa mengawasi aktivitas kelompok tani. Sehingga untuk mengetahui petani yang melanggar dalam hal pemakaian alat tersebut, kita masih belum tahu. Jadi kita cuma bisa mencegah saja.	35
I ₃₋₂	: Memang masih ada beberapa petani disini yang melanggar, padahal itu pun udah kita sosialisasiin ke petani kalo alat bantuan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kelompok saja.	36
Peneliti	: Bagaimana komunikasi antar dan aktivitas para pelaksana tersebut?	
I ₁₋₁	: Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan kawasa Agropolitan in, kami selalu	37

	mengkomunikasikan apabila ada bantuan terkait infrastruktur dan keuangan dan selalu merespon setiap masukan yang terjadi dilapangan terkait pelaksanaan program ini.	
I 1-2	: Bappeda Kabupaten Serang selalu berkoordinasi dengan Semua Dinas-Dinas yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan Baros ini karena memang dinas-dinas itulah yang terjun langsung ke lapangan.	38
I 2-8	: Oh udah lumayan bagus sekarang, tapi masih ada sih kekurangan kalau bisa lebih banyak lagi bantuan yang diberikan terkait program ini, jadi kami para petani dapat terselamatkan dan lebih baik lagi.	39
I 3-3	: Kalo lihat perkembangan sekarang udah lumayan lah, banyak lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan secara maksimal jadi dapat meningkatkan hasil produksi yang kemudian dengan itu terjadi kondisi yang lebih baik.	40
I 3-5	: Sudah sedikit maju dibanding tahun-tahun kemarin, bantuan juga udah mulai ada.	41
I 3-6	: Perkembangannya udah lumayan sih, lingkungannya juga udah nyaman.	42
Peneliti	: Bagaimana koordinasi sudah terjalin dengan baik?	
I 2-1	: Kami dari pihak Dinas Pertanian yang menjadi pioneer pelaksanaan Program ini merasakan koordinasi yang kurang baik, contoh nya kami dengan dinas Pekerjaan Umum saja kita tidak tau ketika mereka membangun kios-kios yang berdiri di tempat yang kurang strategis, seharusnya pembuatan itu atas rekomendasi dari kami pihak dinas Pertanian, begitu juga dinas yang lain pun sama jadi koordinasi antar SKPD ini sangat kurang baik.	44
I 3-2	: Koordinasi secara vertikal dan secara horizontal itu yang harus dijaga dan dielihara secara baik, kalau melihat kondisi	45

	<p>sekarang kami selalu mengalami sedikit kebingungan dalam melaksanakan program ini, kami di tuntut untuk mewujudkan kawasan Agropolitan ini sementara dari atas kurang jelas koordinasinya begitu juga antar dinas-dinas yang menangani juga jalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program ini</p>	
I ₃₋₁	<p>: Saya pun tidak tau menau soal Pengembangan Program Agropolitan ini hanya saja saya pernah dengan bawasanya di Kecamatan Baros ini digulirkan program Agropolitan seperti itu, pada tahun 2011 lalu ada penelitian dari Dinas Pertanian mengenai Agropolitan tetapi setelah itu tidak ada kabar yang jelas mengenai program ini, tidak ada koordinasi dari Dinas Pertanian secara jelas kepada kami.</p>	46
I ₂₋₃	<p>: Saya juga merasakan kalau tingkat koordinasi yang terjalin antar dinas-dinas ini kurang begitu baik, hal ini disebabkan karena ketidak jelasan kebijakan ini saya rasa, sehingga menyebabkan koordinasi yang kurang dalam mewujudkan kawasan Agropolitan ini.</p>	47
I ₂₋₅	<p>: terkait maslah koordinasi dan komunikasi memang itu selalu menjadi kendala dalam pelaksanaan program di manapun, jdi sebenarnya kalo berbicara koordinasi kaitanya dengan Agropolitan ini ya tidak ada sama sekali, saya harus akui itu hal in kemungkinan memang belum kuatnya program ini dan belum ada kesungguhan.</p>	48
I ₂₋₆	<p>: Dinas Pariwisata belum menerima limpahan dari Bappeda atau pun Dinas pertanian terkait pengembangan Kawasan Agropolitan yang katanya mau dibuat juga untuk sektor pariwisata dengan komoditas pertanian sebagai obyek wisata, hanya kita diundang ketika penyusunan program ini kalau Agropolitan ini akan dijadikan obyek wisata,akan tetapi setelah itu belum ada pemberitahuan terkait program itu.</p>	49
Peneliti	<p>: Bagaimana Sosialisasi sudah terjalin dengan baik ?</p>	

<p>I₁₋₁ : Sudah bagus, artinya selalu berupaya untuk mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan dalam penataan kegiatan Agropolitan. Baik sih tidak ada masalah.</p>	
<p>I₂₋₁ : sosialisasi dulu pernah kita lakukan terkait program ini, tapi memang masih kurang sehingga masyarakat disana itu belum banyak yang tau mengenai program ini kemungkinan hanya kelompok tani saja yang tau mengenai program ini itu pun cuman hanya tau dapat bantuan dari dinas pertanian begitu</p>	50
<p>I₂₋₂ :.</p>	51
<p>I₂₋₂ : Jadi Agropolitan itu semua para pihak terlibat harus ikut disitu, tidak hanya mendukung tapi harus ada interkasinya. Jadi percuma aja salah satu pihak matia-matian tapi pihak lainnya tidak, ya percuma. Kalo menurut saya ya, SKPD terkait belum terlihat geraknya karena Agropolitan itu kan berkaitan dengan pertanian, jadi ada anggapan SKPD yang harus melaksanakan adalah Dinas Pertanian saja.</p>	52
<p>I₂₋₄ : Memang saya akui sosialisasi program ini sangat lemah bahkan kalo kamu ke Kecamatan Baros tanya ke warga mengenai Agropolitan saya yakin mereka tidak tau, saya yakin itu karena apa ya memang sosialisasi yang lemah ini menyebabkan keadaan seperti itu terjadi. SKPD terkait saya liat belum begitu gereget/dominan lah mereka artinya belum dominan itu masih fokus ke hal-hal yang kelihatannya menurut mereka lebih penting, karena kalo sudah ada greget biasanya mereka sudah mulai gitu, artinya mulai itu begini, katakanlah Agropolitan ini kalo sesuai kajian sudah mulai harus di dukung sepenuhnya gitu ya, peran dinas tata kota misalnya, dinas tata, nah di kawasan sana tuh sudah mulau dihidupkan. Jadi ada sinergi antara SKPD dan ini keliatanya masih belum, mungkin memerlukan waktu ya. Jadi ini peran leading sangat penting</p>	53

	menurut saya.	
I 3-2	: saya belum pernah menerima informasi terkait program Agropolitan ini dengan bentuk sosialisasi dari pihak manapun, akan tetapi kalo informasi di Kecamatan Baros ini adanya program pengembangan kawasan Agropolitan saya mengetahui akan tetapi kalo sosialisasi yang menjelaskan detail program ini belum pernah.	
I 2-7	: Saya tidak tau apa itu Agropolitan yang saya tau kami mendapat bantuan bibit-bibit pohon setelah itu kami mendapatkan bantuan pompa air kata orang Kecamatan itu bantuan karena di kecamatan Baros dijadikan kawasan Agropolitan begitu, tetapi Agropolitan yang seperti apa tidak tahu	54
I 3-3	: Agropolitan itu seperti apa tidak terlalu paham saya karena sosialisasi ataupun pemberitahuan dari Dinas Pertanian tidak ada begitu, jadi saya pun ketika adek tanya saya tidak tau harus menjawab apa, saya cuma bisa jawab kalo warga sini pernah mendapat bantuan dan itu dari program Agropolitan begitu tapi selebihnya kami tidak tau, kurang paham mengenai program ini.	55
I 1-5	: Itu melibatkan, kan ada musrenbang itu, musrenbang yang biasanya digelar di kecamatan, musrenbang itu untuk menampung aspirasi masyarakat, nanti untuk cikal bakal untuk merancang perencanaan, ya kalo sesuai nanti orang-orang yang di atas bisa menyetujui usulan-usulan itu, nah kita juga sedikit banyaknya mendengar aspirasi. Tapi memang dari Dinas Pertanian yang tidak pernah ada sosialisasi.	56
Peneliti	: Bagaimana sejauh ini lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik ini?	
I 3-1	: Masyarakat yang berada di wilayah masing-masing, seperti	57

<p>kelompok PKK, tokoh masyarakat, karangtaruna dan kelompok-kelompok yang aktif di kelurahan, amat sangat mendukung dengan adanya program Agropolitan ini. Jadi, saya rasa implementasi program ini sangat di dukung oleh berbagai pihak, dan tujuannya pun jelas bahwa program ini membantu masyarakat petani guna meningkatkan kesejahteraan mereka</p>	
<p>I₃₋₂ : Saya rasa masyarakat dengan RT/RW mendukung sekali. Dan merespon baik dengan adanya program ini, dan mudah-mudahan sampai seterusnya masyarakat yang tahu keberadaan program ini akan selalu mendukung dan ikut mensukseskan.</p>	58
<p>I₃₋₁ : sebenarnya kami ini mau dikasih program seperti apa saja kami tetap mendukung dan menyambut dengan baik. hal itu dikarenakan kami kan orang tidak tau dan pendidikan kurang di kampung, jadi biar pegawai yang diatas saja yang memikirkan semua tentang kita.</p>	59
<p>Peneliti : Bagaimana menangani lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif yang dapat menjadi bing keladi dari kegagalan kinerja pelaksanaan kebijakan publik ini?</p>	
<p>I₃₋₁ : Dengan adanya bantuan semacam ini kami selaku pihak yang tidak terlibat secara langsung dan hanya ikut mengawasi saja dalam program pengembangan kawasan Agropolitan amat sangat merespon positif tentang adanya bantuan untuk para petani apalagi program tersebut berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Serang dan dana yang dipakai berasal dari APBD</p>	60
<p>Peneliti : Bagaimana kendala yang dihadapi terkait lingkungan sosial, ekonomi dan politik?</p>	61
<p>I₃₋₃ : Mendukung ya, artinya gini pemerintah harus benar-benar bisa melaksanakan program ini sehingga menyentuh ke masyarakat petani.</p>	

I ₃₋₃	: Mendukung ya,nama untuk kita para petani jadi bagaimana pun kita sangat mendukung.	62
I ₃₋₂	: Yang namanya pembangunan kita pasti dukung.	63
I ₃₋₁	: Mendukung selama pembangunan itu ga merugikan kita.	64
I ₃₋₁	: Masyarakat itu pastinya ikut saja dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah yang penting ada bantuna kita sudah bersyukur.	65

Koding data

<u>Kode</u>	<u>Kata Kunci</u>
1	Perencanaan Agropolitan menurut Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Serang
2	Perencanaan Agropolitan menurut Kepala Sub bidang Pertanian, SDA, & Energi Bappeda Kabupaten Serang.
3	Perencanaan Agropolitan menurut Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang
4	Perencanaan Minapolitan menurut Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang
5	Anggaran dari Pusat (APBN), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
6	Anggaran dari Pusat (APBN), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
7	Tanggapan Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten
8	Serang terkait alasan terpilihnya Kecamatan Baros. Tanggapan Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten
9	Serang terkait ketepatan Kecamatan Baros dijadikan Kawasan Agropolitan
10	secara geografis Keterlibatan Dinas Pertanian dalam mendukung Agropolitan.
11	Keterlibatan Dinas Tata Kota bidang Penataan Ruang dalam mendukung
12	Agropolitan
13	Keterlibatan Dinas Tata Kota bidang Perumahan dan Pemukiman dalam mendukung Agropolitan
14	Keterlibatan Disperindagkop bidang Perindustrian Kabupaten Serang dalam
15	mendukung Agropolitan.
16	Keterlibatan Disporaparbud bidang Destinasi Kabupaten Serang dalam
17	mendukung Agropolitan.
18	Belum tersusunya SK Pokja
19	Kurangnya sumber daya manusia

20	Kurang komitmen dan kurangnya keseriusan (greget) dari SKPD terkait
21	Keterbatasan anggaran
22	Kurangnya peran <i>leading sector</i>
23	Tanggapan Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Serang terkait SK Pokja Agropolitan .
24	Tanggapan Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang terkait kasus belum tersusunnya SK Pokja
25	Tanggapan dari petani pembina/pelanggan
26	Tanggapan Kepala bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Serang terkait Keterlibatan SKPD terkait
27	Tanggapan Kepala Sub bidang Pertanian, SDA, & Energi Bappeda Kabupaten Serang terkait Keterlibatan SKPD terkait
28	Tanggapan Kepala Seksi Kelautan Dinas Pertanian Kabupaten Serang terkait Keterlibatan SKPD terkait
29	Tanggapan pelibatan masyarakat menurut Kepala Bidang Perencanaan
30	Perekonomian Bappeda Kota Serang bidang
31	Tanggapan pelibatan masyarakat menurut Kepala Seksi Tanaman Pangan
32	Dinas Pertanian.
33	Tanggapan Kepala Seksi Tanaman Pangan Kabupaten Serang terhadap aspirasi dan kebutuhan petani dalam Perencanaan
34	Petani tokoh masyarakat mendukung pengembangan kawasan Agropolitan.
35	Keterangan Kepala bidang Perencanaan perekonomian Bappeda Kabupaten mengenai koordinasi antar instansi terkait.
36	Keterangan Kepala Sub bidang Pertanian, SDA, & Energi Bappeda Kabupaten Serang mengenai koordinasi antar instansi terkait
37	Keterangan Kepala Seksi Tanaman Pangan Kabupaten Serang mengenai
38	koordinasi antar instansi terkait
39	Keterangan Kepala Seksi Upt Dinas Pekerjaan Umum. mengenai koordinasi
40	antar pemerintah daerah terkait
41	Keterangan Disporaparbud bidang Pariwisata Kabupaten Serang mengenai

42	koordinasi antar pemerintah daerah terkait
43	Keterangan Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup Badan
44	Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Serang.mengenai koordinasi antar instansi terkait
45	Keterangan Sekmat Kecamatan Baros mengenai koordinasi dengan pemerintah daerah
46	Keterangan Kepala Desa Baros mengenai Koordinasi dengan pemerintah daerah
47	Keterangan Kepala Desa Sinar Mukti mengenai koordinasi dengan pemerintah daerah
48	Keterangan Kepala Desa Penyirapan mengenai koordinasi dengan pemerintah daerah
49	
50	Keterangan Kepala Seksi Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang
51	mengenai sosialisasi Agropolitan kepada masyarakat petani
52	Keterangan Kepala Dinas Pertanian mengenai sosialisasi Agropolitan kepada masyarakat Petani
53	
54	Keterangan Sekretaris Camat Kecamatan Baros mengenai mengenai sosialisasi Agropolitan kepada masyarakat petani
55	Keterangan Kepala Desa Baros mengenai sosialisasi Agropolitan kepada masyarakat petani
56	Tanggapan mengenai progres Agropolitan di Kabupaten Serang menurut Sekretaris Camat Kec. Baros
57	Tanggapan mengenai progres pengembangan Agropolitan menurut Kepala Desa Penyirapan
58	Tanggapan mengenai progres pengembangan Agropolitan menurut Kepala Desa Sinar Mukti

Catatan Lapangan

No	Tanggal	Waktu	Tempat	Hasil	Informan
1	9 Februari 2015	09:00 WIB	Kantor Desa Baros	Wawancara	Bapak Sahroji
2	9 Februari 2015	10:00 WIB	Kantor Desa Penyirapan	Wawancara	Bapak Yunus
3	6 April 2015	11:00 WIB	Bappeda Kab. Serang	Data <i>Business Plan, Master Plan,</i> Wawancara	Bapak Dahlan
4	15 April	09:00 WIB	Bappeda Kab. Serang	Wawancara	Ibu Mutya
5	12 Mei 2015	10:00 WIB	Kantor Kecamatan Baros	Wawancara dan Profil Kecamatan Baros	Bapak Suhada
6	13 Mei 2015	09:00 WIB	Upt. Pertanian Baros	Wawancara dan data Monograf	Bapak
7	28 Mei 2016	10:00 WIB	Kantor Dinas Pertanian	Wawancara dan data laporan Agropolitan	Bapak Zaldi
8	29 Mei 2015	09:00 WIB	Kantor Dinas Pertanian	Wawancara	Bapak Tendian
9	3 Juni 2015	13:30 WIB	Rumah Poktan	Wawancara	Bapak Suherman
10	3 Juni 2015	15:20 WIB	Rumah Poktan	Wawancara	Bapak Samsudin
11	25 November 2015	11:10 WIB	Bappeda	Data Perda dan wawancara	Ibu Mutya
12	9 Desember 2015	09:00 WIB	Bappeda Kab. Serang	Wawancara	Bapak Dahlan
13	11 Desember 2015	14:30 WIB	Bappeda Kab. Serang	Wawancara	Ibu Mutya

14	23 Desember 2015	08:00 WIB	Dinas Pertanian	Wawancara	Bapak Zaldi
15	23 Desember 2015	10:00 WIB	Dinas Pertanian	Wawancara	Bapak Samsul
16	29 Desember 2015	08:30 WIB	Dinas Pertanian	Wawancara	Ibu
17	6 Januari 2016	08:00 WIB	Dinas Pariwisata	Wawancara	Ibu
18	6 Januari 2016	11:00 WIB	Kantor Kecamatan Baros	Wawancara	Bapak Suhada
19	6 Januari 2016	13:30 WIB	Upt Pertanian Baros	Wawancara	Bapak
20	12 Januari 2016	10:20 WIB	Dinas Pekerjaan umum	Wawancara	Bapak
21	12 Januari 2016	14:00 WIB	Rumah Gapoktan	Wawancara	Bapak Koing
22	20 Januari 2016	10:10 WIB	Dinas Tata Ruang Wilayah	Wawancara	Bapak
23	28 Januari 2016	09:30	Kantor Desa Baros	Wawancara	Bapak Sahroji
24	28 Januari	11:05 WIB	Kantor Desa SinarMukti	Wawancara	Bapak Wawan Suherman
25	4 Februari 2016	15:30 WIB	Desa Penyirapan	Wawancara	Bapak Umar
26	5 Februarin 2016	10:40 WIB	Desa Sidangmandi	Wawancara	Bapak Jamal
27	5 Februari 2016	09:10 WIB	Kantor Kecamatan Baros	Data Profil Kecamatan Baros dan Wawancara	Bapak Endang
28	17 Februari 2016	11:14 WIB	Rumah Gapoktan	Wawancara	Bapak Fahrizal
29	17 Februari 2016	13:40 WIB	Rumah Gapoktan	Wawancara	Bapak Kusnandar

Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP





Identitas Pribadi

1. Nama : Galih Pratama
2. Tempat, tanggal lahir : Mesuji, 14 Mei 1992
3. Jenis Kelamin : Laki- Laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Alamat : Budi Aji Rt.01/05 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji-Lampung
8. Email : galihmplt91@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Budi Aji
2. SMPN 1 Simpang Pematang
3. SMAN 1 Simpang Pematang
4. Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

